

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 24

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

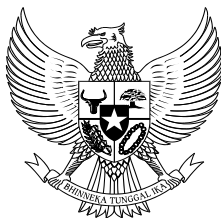
TANGGAL : 21 JULI 2025

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2025



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 73);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode Tahun 2026.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026;

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH; DAN

g. BAB VII : PENUTUP.

- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam:

- a. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- c. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dengan RAPBD hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan RAPBD Tahun 2026 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang disusun dalam rangka menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030.

RKPD merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun sesuai dengan tahapan dan alur yang telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, dokumen RKPD ini mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2026; dan

5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024, selanjutnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan kemudian Tingkat Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjangring masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kota Sukabumi. Berikutnya yaitu tahap Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan tetap menjangring masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2026. Selanjutnya tahapan pembahasan program prioritas dan prioritas pembangunan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.

Adapun penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode pendekatan melalui:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
2. *Bottom-Up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matriks program/kegiatan prioritas.
3. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *pentahelix-ABCGM* (*Academic, Business, Community, Government, Media*). *Academic* meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konspetor dengan melakukan identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori baru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Business meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis yang memberikan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat berperan sebagai *enabler* menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community* meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum perempuan, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijak inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander* yang berperan untuk mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya ini, media juga berfungsi sebagai perantara diseminasi informasi diantara pemangku kepentingan dan konsep *pentahelix*.

4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan APBD kota, APBD Provinsi, APBN, Pinjaman Daerah, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Utuk membiayai belanja setiap perangkat daerah, serta melibatkan secara aktif *stakeholder* diluar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial didalam penjabaran prioritas pembangunan daerah. Tentunya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, swasta dan lain-lain menjadi *support* anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diolah sedemikian rupa sehingga tepat sasaran dan tepat guna.

5. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilihan-pilihan kebijakan yang ditetapkan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang sering mengalami perubahan sehingga lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan serta senantiasa menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.
6. Implementasi *Scenario Planning (Scoppi)* untuk perencanaan inklusif guna mendorong keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak pada optimalisasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan ide bagi proses perencanaan pembangunan yang dilakukan. Melalui *Scoppi* disediakan fasilitas bagi individu/kelompok masyarakat dalam memberikan saran dan masukan sebagai sarana mengakomodir kelompok tertentu dalam pembangunan diantaranya remaja, disabilitas, dan lansia untuk memberikan saran dan masukan.
7. Sinkronisasi aplikasi dan dan interkoneksi data melalui:
 - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi;
 - b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. *e-Validata* Kota Sukabumi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik untuk Ketahanan Sosial Masyarakat”. Tema ini memiliki makna bahwa Tahun 2026 pembangunan Kota Sukabumi akan berfokus pada penguatan ekonomi inklusif, dimana pertumbuhan ekonomi difokuskan pada pemerataan manfaat ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya pada kelompok tertentu saja.

Selain itu pelayanan publik juga harus menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, telah dicantumkan lima Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi, meliputi:

1. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), terutama melalui normalisasi Pajak Daerah, Retribusi, BLUD dan BUMD;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan stunting;
3. Penciptaan Lapangan Kerja untuk mengurangi angka pengangguran;
4. Penataan Kota terutama penanganan sampah dan pencahayaan kota; serta
5. Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan, melalui penguatan nilai agama, sosial dan budaya serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

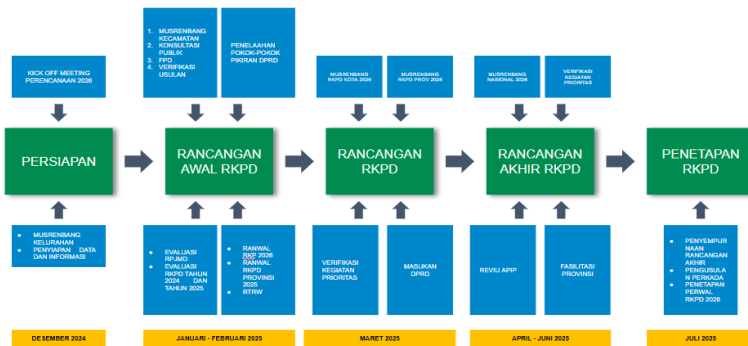
Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Diawali dengan *Kick Off Meeting* Perencanaan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024, dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran pembangunan dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kota Sukabumi. Kemudian tahapan Forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta rencana anggarannya dengan tetap menjaring masukan dan saran untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026. Rangkaian ini diakhiri dengan Musrenbang Tingkat Kota Sukabumi sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka membahas dokumen Rancangan RKPD Tahun 2026.

Selain melalui siklus rutin tersebut, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 juga menampung aspirasi atau masukan dari kaum pemuda melalui *Musrenbang Pemuda* serta dari kelompok disabilitas yang tergabung dalam *Disabilitass Group Planner*.

Usulan yang dihasilkan selanjutnya juga ikut dibahas dalam forum resmi di setiap perangkat daerah sesuai tematik usulan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang nantinya akan di analisis mana yang bisa di akomodir sebagai sebuah program di Perangkat daerah pengampu.

Beberapa alur dan tahapan proses penyusunan substansi RKPd Kota Sukabumi Tahun 2026 yang dilaksanakan, sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Alur dan Tahapan Proses Penyusunan Substansi RKPd
Kota Sukabumi Tahun 2026



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Adapun rencana jadwal penyusunan dokumen RKPd Kota Sukabumi Tahun 2026 disajikan dalam Gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Jadwal Penyusunan RKPd Kota Sukabumi Tahun 2026



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

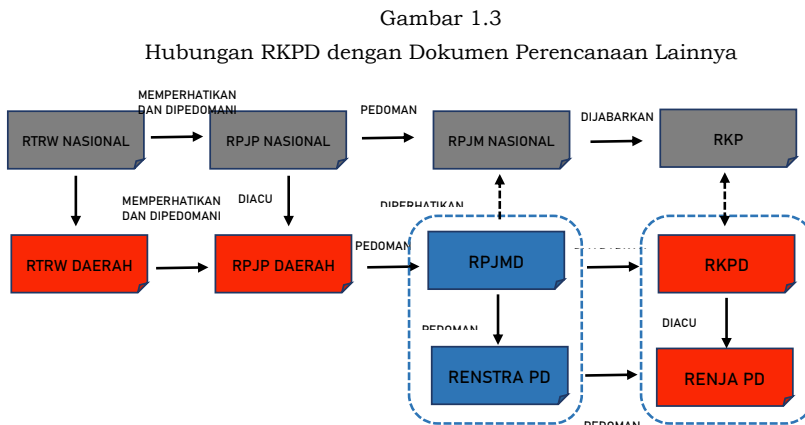
Secara struktur, dokumen perencanaan terbagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ruang lingkup perencanaan berskala daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042.

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Sukabumi Tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Hubungan antar dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan gambar di atas RPJMN dan RPD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program prioritas pembangunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026, serta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042.

Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD akan dijadikan penganggaran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2026, yang terdiri atas KUA-PPAS yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2026;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2026 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan RPD dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

1.5 Sistematika

Penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPd Kota Sukabumi Tahun 2026, yang terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPd tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan RKPd tahun berjalan sebagai bahan acuan yang terdiri dari:

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri dari:
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi;
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd sampai tahun berjalan serta realisasi RPD
 - 2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - 2.2.2 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - 2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, terdiri dari:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi tahun 2026, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2026 serta pendanaan lainnya.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun lalu, identifikasi permasalahan dan rancangan kerangka ekonomi serta kerangka pendanaan, terdiri:

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 sebagai penjelasan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang program prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi Tahun 2026

4.3 Inovasi Daerah

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026

Menjelaskan tentang sinkronisasi program prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, serta kegiatan prioritas Kota Sukabumi dalam rencana program dan kegiatan tahun 2026.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang realisasi dan proyeksi Indikator Makro Kota Sukabumi, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPd Tahun 2026 serta kaidah pelaksanaan RKPd.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum ini memberikan gambaran pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, juga mengidentifikasi faktor-faktor dan berbagai hal yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi dilihat dari beberapa aspek.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu selain tentunya memperhatikan Dokumen RPJMD dan Dokumen RPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi dari aspek geografi dan demografi Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran dari 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Dengan demikian, wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum.

Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

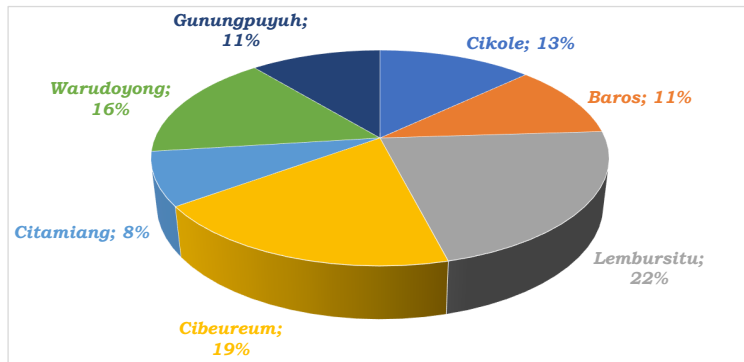
Luas dataran wilayah kecamatan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.1
Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,70
3	Cibeureum	9,13
4	Citamiang	4,00
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,13
7	Cikole	6,21
Luas Total		48,31

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

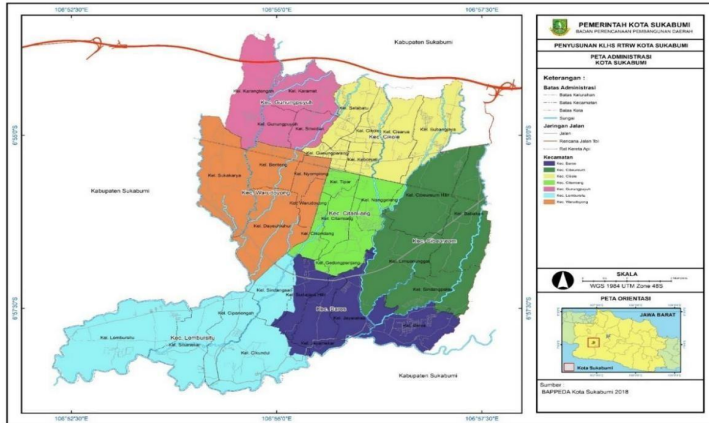
Gambar 2.1
Persentase Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan
di Kota Sukabumi



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Peta wilayah administrasi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber:
RPD
Kota

Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT – $106^{\circ} 45' 10''$ BT sampai dengan $6^{\circ} 49' 29''$ LS – $6^{\circ} 50' 44''$ LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan

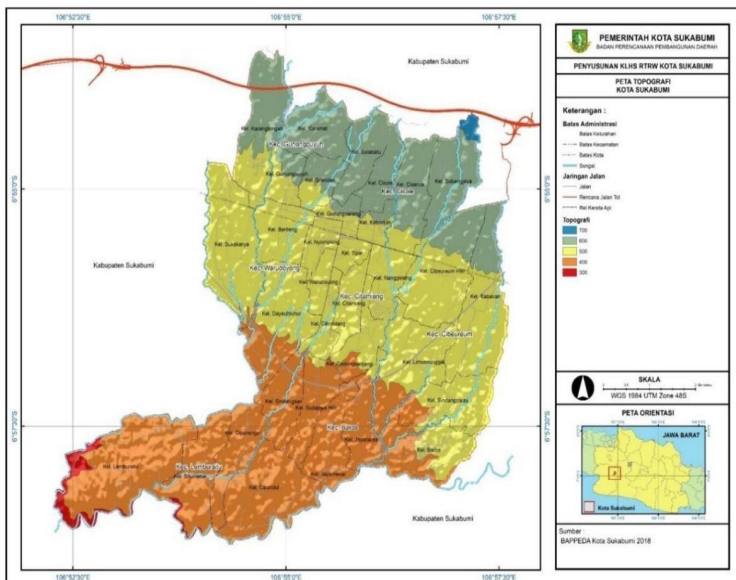
Wilayah Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km².

Secara morfologi, Kota Sukabumi dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi daratan dengan elevasi 385-600 mdpl, morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350-975 mdpl, morfologi pegunungan ber-relief sedang dengan elevasi 375-975 mdpl, dan pegunungan ber-relief kasar dengan elevasi 375-900 mdpl.

Kota Sukabumi memiliki tiga stasiun pengamatan cuaca yaitu Stasiun Cimandiri, Stasiun Situmekar dan Stasiun Ciaul. Jumlah curah hujan paling tinggi tercatat di Stasiun Ciaul di Bulan November yaitu sebesar 615 mm dengan total jumlah hari hujan sebanyak 24 hari.

Sementara dibagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam. Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0- 2% dan 2-15%. Peta kondisi topografi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Sukabumi



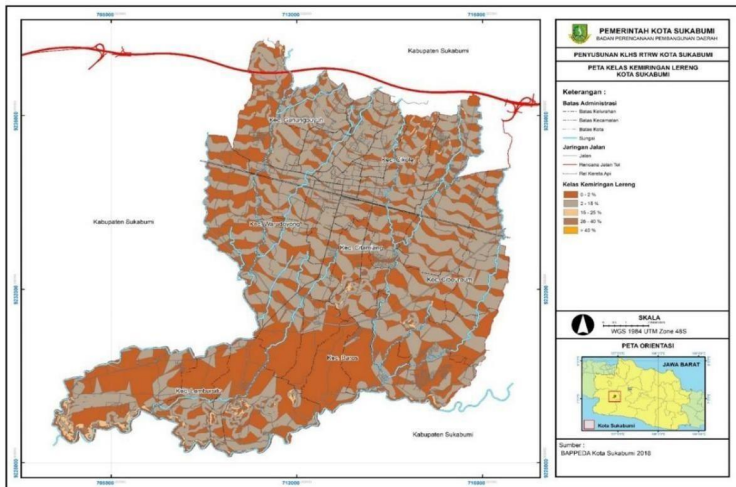
Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Luas Daerah Kota Sukabumi dengan kemiringan lereng 0-2% mencapai 2.228,795 Ha atau sekitar 45,59% dari total luas kota, dan kemiringan lereng 2-15% mencapai 2553.219 Ha atau sekitar 52,22% dari total luas kota.

Adapun kondisi kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4

Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

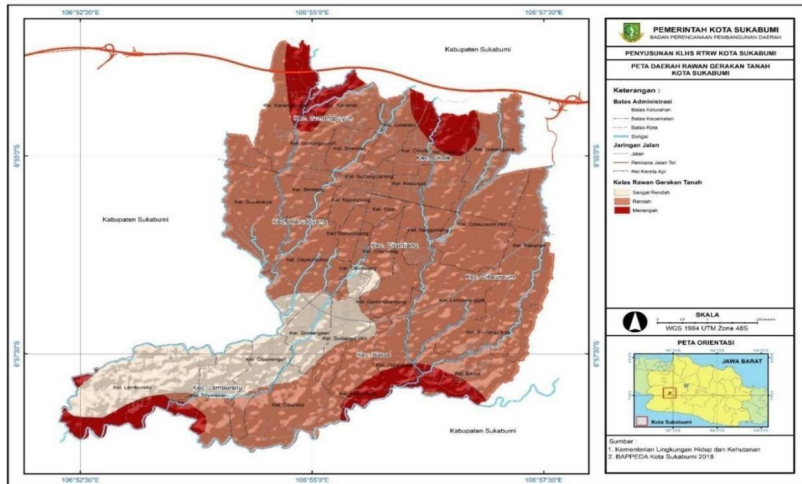
Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Kota Sukabumi termasuk kepada zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah dan sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini masih mungkin terjadi adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan yang tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun luas gerakan tanah di Kota Sukabumi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.2
Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
7	Warudoyong	Rendah	722,65
		Sangat Rendah	36,99

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar 2.5
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.4 Struktur Geologi

Berdasarkan peta geologi susunan litologi batuan di wilayah Kota Sukabumi dan daerah sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur Holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari Formasi Walat berumur Oligosen Awal yang merupakan satuan yang tertua dijumpai di daerah ini.

Formasi Walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari Oligosen Akhir sampai Miosen Awal.

Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur Miosen Awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

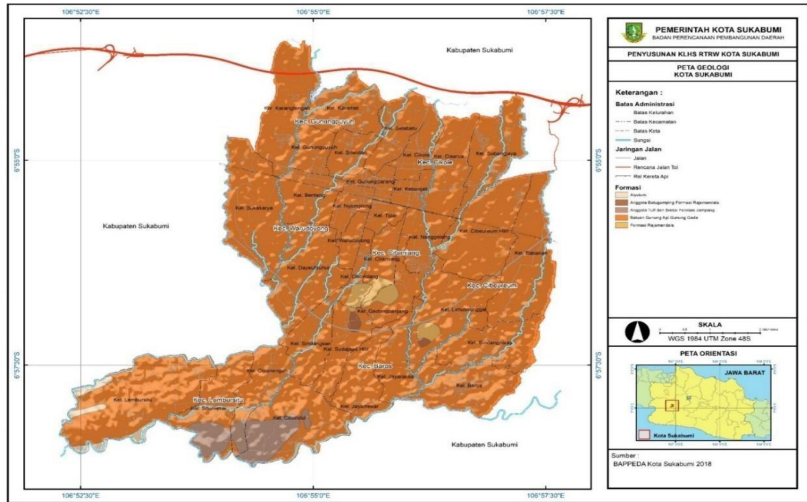
Formasi batuan sedimen di atas ditutupi oleh endapan vulkanik berumur Holosen yaitu batuan produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Satuan batuan vulkanik ini tersebar secara luas sehingga sebagian besar dari wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh singkapan batuan vulkanik. Endapan vulkanik Gunung Gede (Qvg) terdiri dari breksi tufan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, piroksen dan banyak sekali hornblenda, tekstur seperti trachit, umumnya lapuk sekali. Batuan ini tersebar pada wilayah yang cukup luas mulai dari bagian timur sampai bagian tengah dan mulai dari bagian utara sampai bagian selatan Kota Sukabumi. Sedangkan endapan vulkanik Gunung Pangrango (Qvpo) merupakan endapan yang lebih tua yang tersusun dari lahar dan lava, basal-andesit dengan oligoklas-andesin, labradorit, olivin, piroksen, dan hornblenda. Posisi stratigrafi satuan batuan ini relatif lebih tua daripada endapan vulkanik Gunung Gede dan penyebaran satuan ini terbatas di bagian barat dan barat laut wilayah Kota Sukabumi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.3
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri

No	Kecamatan	Simbol	Formasi		Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Baros	Qvg	Batuan	Gunung Api	550,52
			Gunung Gede		
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala		8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala		1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan	GunungApi	913,46
			Gunung Gede		
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala		3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala		15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan	Gunung Api	644,37
			Gunung Gede		
4	Citamiang	Qvg	Batuan	Gunung Api	333,51
			Gunung Gede		
		Tmor	Formasi Rajamandala		49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan	Gunung Api	514,23
			Gunung Gede		
		Qa	Aluvium		43,42
6	Lembursitu	Qvg	Batuan	GunungApi	894,87
			Gunung Gede		
		Tmjt	Anggota Breksi	Tuff dan Formasi	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan	GunungApi	759,64
			Gunung Gede		

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar 2.6



Peta Geologi Kota Sukabumi

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.5 Hidrologi

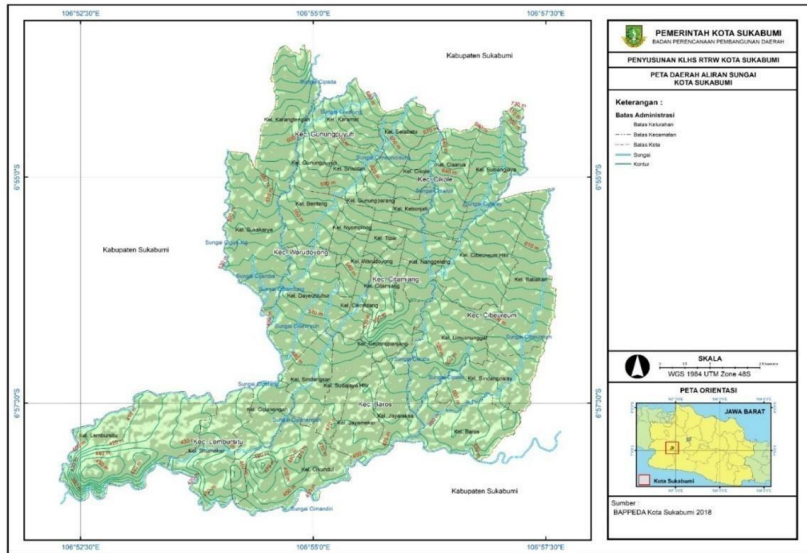
Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan, sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan berpenyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Kondisi air permukaan maupun air tanah (groundwater) baik dari sisi pergerakan, distribusi maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Kota Sukabumi dijelaskan tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m3/dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar 2.7



Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Sukabumi berkisar antara 26°C-28°C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Berikut keadaan iklim menurut bulan di Stasiun Pengamatan Cimandiri:

Tabel 2.5
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan
di Stasiun Pengamatan Cimandiri Tahun 2024

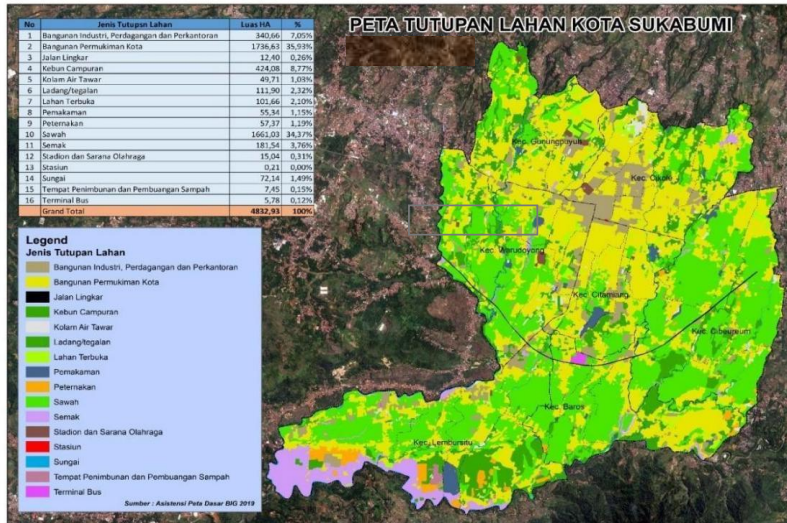
Bulan	Hujan Maksimum (mm)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	122	521	24
Februari	48	344	23
Maret	39	284	23
April	95	436	19
Mei	64	115	10
Juni	70	290	15
Juli	12	30	5
Agustus	10	18	4
September	35	65	9
Oktober	41	94	9
November	90	715	27
Desember	120	547	27

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Sukabumi, sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Takwa. Kota Sukabumi juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional, sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor.

Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Daerah rawan bencana yang berada di wilayah Kota Sukabumi meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

1. Daerah rawan letusan gunung berapi karena berlokasi relatif dekat dengan kawasan Gunung Gede Pangrango;
2. Daerah rawan gempa yang terletak di jalur daerah rawan gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung;
3. Daerah rawan banjir yang tersebar di beberapa titik wilayah. Secara umum penyebab terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota Sukabumi lebih banyak diakibatkan oleh kondisi saluran yang tidak terawat, tersumbat oleh sampah dan tingginya sedimentasi;
4. Daerah rawan gerakan tanah zona patahan aktif, yaitu patahan Cimandiri;
5. Daerah longsor di beberapa bagian daerah wilayah kota.

Berikut tabel jumlah kejadian bencana dan area terdampak bencana tahun 2023:

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi Tahun 2024

Jenis Bencana	Kejadian Bencana
(1)	(2)
Kebakaran	3
Kabakaran Pemukiman	25
Kebakaran Transportasi	-
Banjir	248
Tanah Longsor	100
Angin Puting Beliung	35
Gempa Bumi	6
Cuaca Ekstrem	182
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	599

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, 2025

Tabel 2.7
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Bulan
di Kota Sukabumi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
Januari	36
Februari	18
Maret	41
April	72
Mei	37
Juni	27
Juli	14
Agustus	2
September	16
Oktober	10
November	306
Desember	20
Jumlah	599

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, 2025

Tabel 2.8
Nilai Kerugian Akibat Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi (Rp) Tahun 2024

Jenis Bencana	Nilai Kerugian
(1)	(2)
Kebakaran	-
Kabakaran Pemukiman	1.214.500.000
Kebakaran Transportasi	-
Banjir	3.382.470.000
Tanah Longsor	1.944.950.000
Angin Puting Beliung	1.242.650.000
Gempa Bumi	86.250.000
Cuaca Ekstrem	1.780.430.000
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	9.651.250.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, 2025

2.1.1.9 Demografi

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (beridentitas).

Sebagaimana karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas terbatas, yakni 48,31 Km², serta jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 365.740 jiwa, kepadatan penduduk 7.570 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,46%. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan dan rasio jenis kelamin penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota
Sukabumi Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Baros	41,32	2,45
Lembursitu	44,69	2,04
Cibeureum	49,50	2,60
Citamiang	55,11	1,02
Warudoyong	61,34	1,06
Gunungpuyuh	50,03	0,95
Cikole	63,73	0,79
Jumlah	365,74	1,46

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.10
Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)
Baros	7.405	103,2
Lembursitu	4.178	97,9
Cibeureum	5.421	102,0
Citamiang	13.769	100,9
Warudoyong	8.112	102,3
Gunungpuyuh	9.745	102,6
Cikole	10.270	98,5
Jumlah	7.570	101,0

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

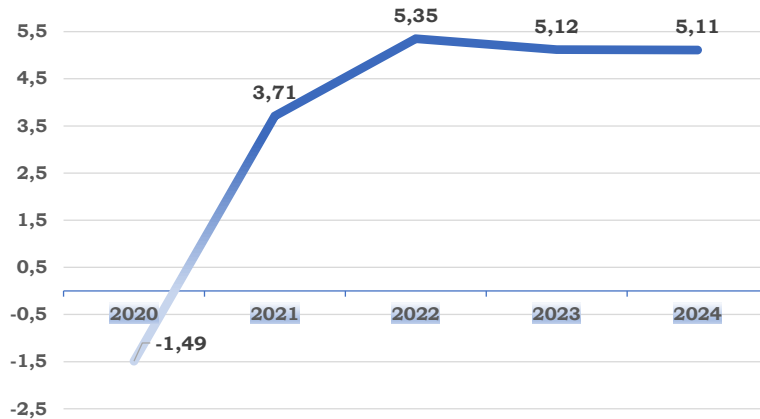
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (region) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pada publikasi ini yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut Lapangan Usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berdasarkan penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar Rp 15,35 triliun, sementara di tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi Rp 16,37 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,12 persen.

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, dan Kehutanan, Perikanan	435,77	447,76	491,17	547,17	591,88
Indusri Pengolahan	625,53	658,06	704,40	752,55	797,66
Pengadaan Listrik dan Gas	25,19	27,52	29,53	30,77	30,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,58	18,00	19,25	19,83	20,86
Konstruksi	843,35	892,12	943,84	1.041,63	1.112,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.715,44	4.941,55	5.410,49	5.769,43	6.029,76

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Transportasi dan Pergudangan	1.303,93	1.391,72	1.541,49	1.763,39	1.928,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	363,05	385,49	436,87	483,20	534,30
Informasi dan Komunikasi	516,89	556,42	558,91	625,56	653,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.417,86	1.522,26	1.624,98	1.720,80	1.910,78
Real Estat	141,54	153,33	169,07	180,11	192,55
Jasa Perusahaan	210,82	228,98	255,45	279,41	296,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	590,52	583,17	580,24	600,15	608,50
Jasa Pendidikan	558,13	585,18	640,08	695,88	753,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233,80	256,39	283,83	308,44	326,02
Jasa lainnya	403,14	405,09	472,64	531,37	583,60
Produk Domestik Regional Bruto	12.401,54	13.053,04	14.192,25	15.349,71	16.370,38

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.12

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	274,97	277,05	286,97	307,55	329,00
Indusri Pengolahan	448,37	459,55	481,63	503,98	534,04
Pengadaan Listrik dan Gas	15,59	16,99	18,00	18,57	18,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,86	11,73	12,47	12,73	13,38

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konstruksi	578,34	601,49	600,60	641,76	680,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.477,12	3.572,48	3.767,92	3.911,06	4.082,00
Transportasi dan Pergudangan	751,90	777,52	836,52	912,50	997,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,16	247,78	271,81	293,05	309,67
Informasi dan Komunikasi	493,86	534,52	571,97	607,26	635,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	891,90	934,62	958,67	990,62	1.020,26
Real Estat	108,13	116,52	123,86	130,72	136,22
Jasa Perusahaan	135,03	145,66	158,96	171,74	181,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	338,66	329,32	328,20	334,99	335,05
Jasa Pendidikan	334,49	344,12	371,97	393,52	413,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168,39	181,55	199,43	210,84	221,95
Jasa lainnya	295,94	300,15	335,16	360,99	394,66
Produk Domestik Regional Bruto	8.534,72	8.851,05	9.324,16	9.801,88	10.303,16

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.13
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Persen)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,51	3,43	3,46	3,56	3,62
Indusri Pengolahan	5,04	5,04	4,96	4,90	4,87
Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,21	0,20	0,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13
Konstruksi	6,80	6,83	6,65	6,79	6,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38,02	37,86	38,12	37,59	36,83
Transportasi dan Pergudangan	10,51	10,66	10,86	11,49	11,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,93	2,95	3,08	3,15	3,26
Informasi dan Komunikasi	4,17	4,26	4,15	4,08	3,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,43	11,66	11,45	11,21	11,67
Real Estat	1,14	1,17	1,19	1,17	1,18
Jasa Perusahaan	1,70	1,75	1,80	1,82	1,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	4,47	4,09	3,91	3,72
Jasa Pendidikan	4,50	4,48	4,51	4,53	4,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,96	2,00	2,01	1,99
Jasa lainnya	3,25	3,10	3,33	3,46	3,56
Produk Domestik Regional Bruto	100,0	100,0	100,0	100,	100,0

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.14

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,62	0,76	3,58	7,17	6,97
Indusri Pengolahan	-1,93	2,49	4,81	4,64	5,97
Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	8,98	5,90	3,19	-0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,85	8,02	6,32	2,09	5,10
Konstruksi	-4,06	4,00	-0,15	6,85	5,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,68	3,64	5,47	3,80	4,37
Transportasi dan Pergudangan	-6,98	3,41	7,59	9,08	9,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,41	2,74	9,70	7,81	5,67
Informasi dan Komunikasi	10,78	8,23	7,01	6,17	4,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,81	4,79	2,57	3,33	2,99
Real Estat	-0,86	7,76	6,30	5,54	4,21
Jasa Perusahaan	-7,67	7,87	9,13	8,04	5,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,93	-2,76	-0,34	2,07	0,02
Jasa Pendidikan	4,39	2,88	8,09	5,79	5,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,82	7,82	9,85	5,72	5,27
Jasa lainnya	-0,82	1,42	11,67	7,71	9,33
Produk Domestik Regional Bruto	-1,49	3,71	5,35	5,12	5,11

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.860,16	10.421,22	11.406,85	12.508,20	13.442,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	550,33	568,41	626,53	700,43	753,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.435,19	1.488,68	1.506,40	1.626,88	1.686,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.913,68	2.122,79	2.218,41	2.459,36	2.614,20
Perubahan Inventori	203,97	-110,39	-6,37	-2,46	-19,50
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.561,79	-1.437,66	-1.559,58	-1.942,70	-2.106,76
Produk Domestik Regional Bruto	12.401,54	13.053,04	14.192,25	15.349,71	16.370,38

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.427,90	6.661,37	7.022,52	7.393,93	7.734,92
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	369,67	376,61	402,50	434,30	456,90
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	886,09	898,70	888,30	933,63	946,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.319,26	1.319,21	1.396,15	1.493,84	1.582,57
Perubahan Inventori	136,63	-69,15	-3,98	-1,49	-11,23
Net Ekspor Barang dan Jasa	-604,83	-407,68	-381,33	-452,32	-406,22
Produk Domestik Regional Bruto	8.534,72	8.851,05	9.324,16	9.801,88	10.303,16

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.17
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kota Sukabumi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Rumah Tangga	Konsumsi	79,51	79,84	80,37	81,49	82,12
Pengeluaran LNPRT	Konsumsi	4,44	4,35	4,41	4,56	4,60
Pengeluaran Pemerintah	Konsumsi	11,57	11,40	10,61	10,60	10,30
Pembentukan Tetap Bruto	Modal	15,43	16,26	15,63	16,02	15,97
Perubahan Inventori		1,64	-0,85	-0,04	-0,02	-0,12
Net Ekspor Barang dan Jasa		-12,59	-11,01	-10,99	-12,66	-12,87
Produk Regional Bruto	Domestik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Rumah Tangga	Konsumsi	-1,39	3,63	5,42	5,29	4,61
Pengeluaran LNPRT	Konsumsi	-3,20	1,88	6,87	7,90	5,21
Pengeluaran Pemerintah	Konsumsi	-0,42	1,42	-1,16	5,10	1,35
Pembentukan Tetap Bruto	Modal	-6,33	5,45	0,36	7,00	5,94
Perubahan Inventori		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Net Ekspor Barang dan Jasa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Produk Regional Bruto	Domestik	-1,49	3,71	5,35	5,12	5,11

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

2.1.2.2 PDRB Per Kapita

Secara umum, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 44,76 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga 2024, masing-masing sebesar 24,72 juta rupiah dan 28,17 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak dipengaruhi inflasi lagi.

2.1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

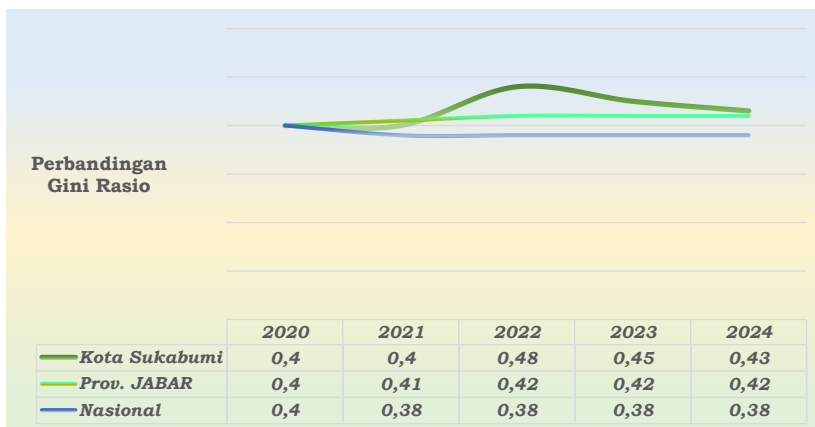
Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan alam suatu populasi. Semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang

sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,43 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berikut disajikan perbandingan indeks gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2019-2023:

Gambar 2.10
Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,43. Angka ini menurun 0,02 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2023. Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, Kota Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0.36-0,49). Kota Sukabumi termasuk wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu (1) Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; (3) Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki asset keuangan seperti properti dan saham; dan (4) Ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Hal ini terlihat saat terjadi goncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Pada September 2024, provinsi dengan *gini ratio* tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,43. Sementara itu, provinsi dengan *gini ratio* terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,25. Jika dibandingkan dengan *gini ratio* nasional yang sebesar 0,38, terdapat tujuh provinsi dengan angka *gini ratio* yang lebih tinggi, yaitu DKI Jakarta (0,43), DI Yogyakarta (0,42), Jawa Barat (0,42), Papua Selatan (0,42), Gorontalo (0,41), Papua (0,40), dan Papua Barat (0,38).

2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasi oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. Pada tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

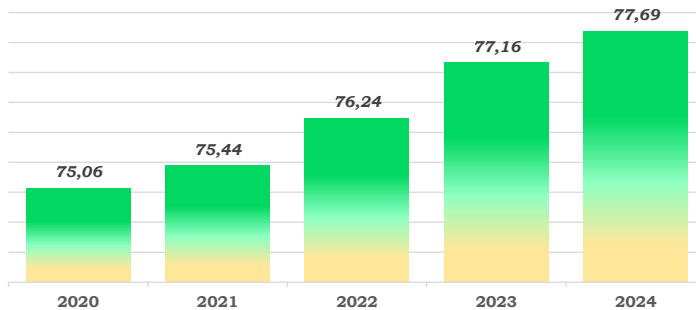
Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status Pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020-2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,69 pada tahun 2024. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode 2020-2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami akselerasi pertumbuhan di 2024 dibanding tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,29 persen, Rata- rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,10 persen, serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar 3,84 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat								
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)			Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
Pengetahuan								
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lama Sekolah		Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Lama Sekolah		Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
Sumber Hidup Layak								
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)			Rp 000	10.999	10.942	11.229	11.799	12.252
Indeks Pembangunan Manusia				75,06	75,44	76,24	77,16	77,69

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

Gambar 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

2.1.2.5 Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

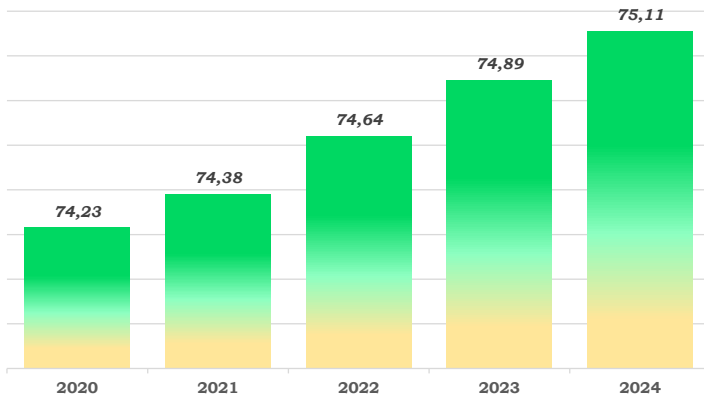
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

2.1.2.6 Dimensi Usia Panjang dan Sehat

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,88 tahun. Selama periode tersebut, rata-rata UHH Kota Sukabumi tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Sukabumi adalah 74,23 tahun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 75,11 tahun. UHH tahun 2024 meningkat sebesar 0,22 tahun (0,29 persen) jika dibandingkan tahun 2023. Terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan di 2024 dibanding tahun 2023 yang mencapai 0,33 persen.

Penambahan umur harapan hidup dari bayi yang baru lahir merupakan dampak positif dari keberhasilan upaya dalam meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, baik dari sisi prasarana, akses, hingga kualitas Kesehatan.

Gambar 2.12
Usia Harapan Hidup saat lahir Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



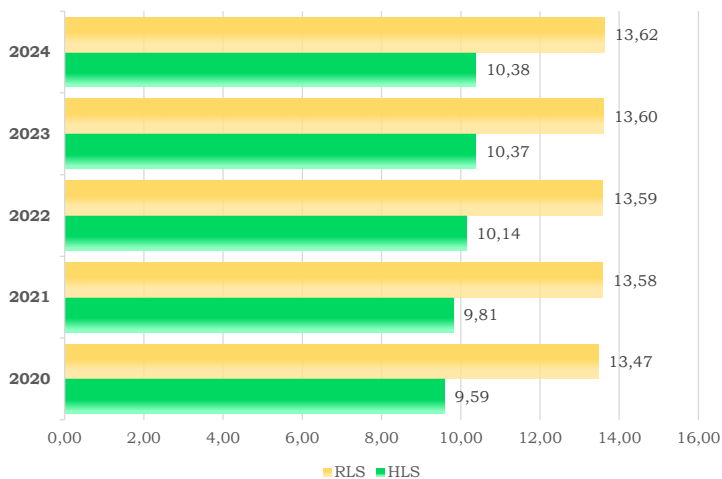
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

2.1.2.7 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata pertumbuhan HLS Kota Sukabumi sebesar 0,27 persen per tahun. Pada 2024, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,62 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I.

Gambar 2.13
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota
Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

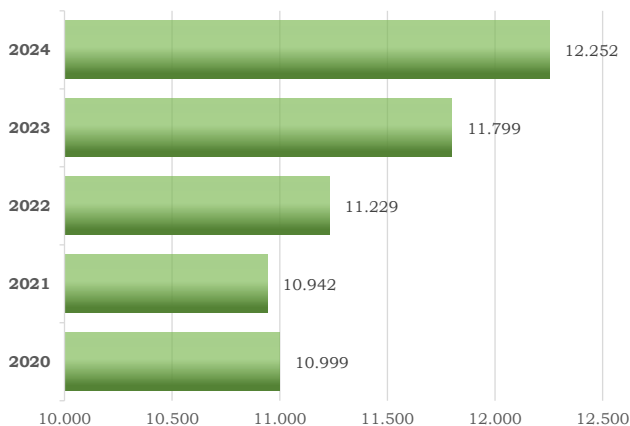
Sementara itu pada periode yang sama, RLS Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 2,01 persen per tahun. Pada 2024, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,38 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMS kelas X. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan dari program-program yang bersifat jangka pendek. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan hasil upaya pembangunan yang bersifat jangka panjang.

Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

2.1.2.8 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita per tahun (harga konstan 2012). Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 12,25 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp 453 ribu (3,84 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2020-2024, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 2,76 persen per tahun.

Gambar 2.14
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan), 2020-2024 (Rp000)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

2.1.2.9 Perbandingan IPM Kota Sukabumi Terhadap Provinsi Jawa Barat

IPM Kota Sukabumi yang berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat memiliki makna bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016.

Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang Kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2024, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,63 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,87 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 2,31 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), serta dua puluh kabupaten/kota dengan capaian IPM berkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan tiga kabupaten/kota dengan capaian IPM di kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). Sejak tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori “rendah”.

Tabel 2.20
IPM Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Sukabumi	75,60	75,44	76,24	77,16	77,69
Provinsi Jawa Barat	71,61	72,96	73,63	74,24	74,92

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

2.1.2.10 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan.

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2023 dari 7,50 persen menjadi 7,20 persen. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tahun 2020-2024:

Tabel 2.21
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50
2024	24,10	7,20

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan BPS yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berikut tabel dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.22
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2021-2024

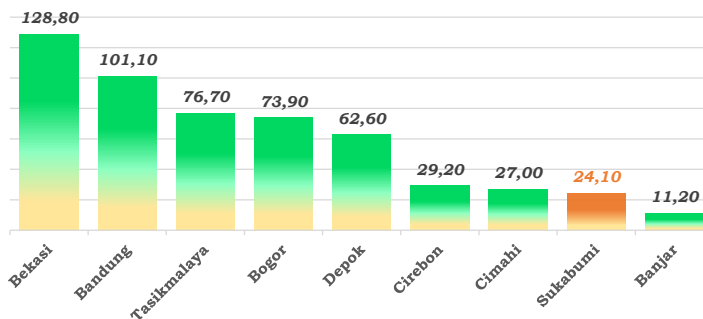
Indikator	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	27,19	26,59	24,96	24,10
Persentase Penduduk Miskin	8,25	8,02	7,50	7,20
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	567.734	594.118	644.276	678.258
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,39	1,27	1,21	0,88
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,36	0,38	0,31	0,18

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.15
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2025 (ribu orang)



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

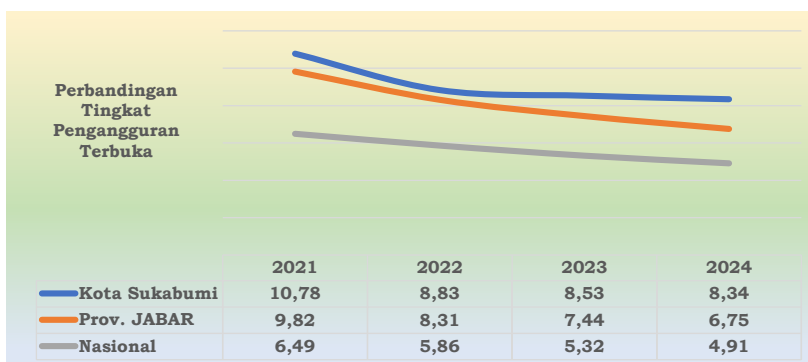
2.1.2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja.

Selalu lebih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Sukabumi dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional ini menandakan bahwa perbandingan antara laju pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja di Kota Sukabumi masih relatif besar, sehingga angkatan kerja yang tersedia yang tidak terserap pasar kerja lebih besar.

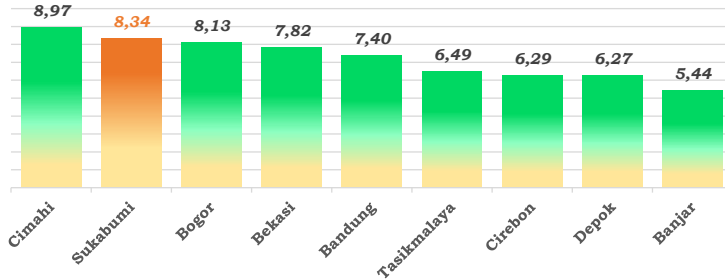
Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak memiliki sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat. Selama periode 2020-2023, kondisi TPT Kota Sukabumi turun sebesar 3,64 persen. Berikut tabel perbandingan persentase TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020-2023:

Gambar 2.16
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2021-2024



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Gambar 2.17
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025

TPT Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan Kota lain, berada pada urutan ke-2 (dua) tertinggi di Jawa Barat. Begitupun dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, TPT Kota Sukabumi lebih tinggi. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja ini diantaranya yaitu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan juga belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. Berikut tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin:

Tabel 2.23
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu
Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kota Sukabumi Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	29.926	14.852	44.778
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	4.974	5.065	10.039
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	6.335	2.540	8.875
Buruh/Karyawan/Pegawai	47.976	27.310	75.286
Pekerja bebas	8.902	2.206	11.108
Pekerja keluarga/tak dibayar	2.476	7.266	9.742
Jumlah	100.589	59.239	159.828

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

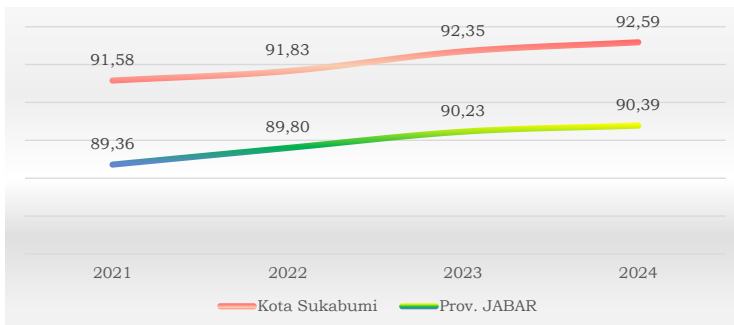
2.1.2.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian IPG Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Artinya pembangunan manusia secara gender di Kota Sukabumi lebih merata dibanding di tingkat Jawa Barat. Berikut grafik perbandingan capaian IPG Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan di Kota Sukabumi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara untuk Tahun 2019 yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	70,17	80,9	81,21	82,59
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,3	99,76	98,87	98,04
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,79	98,18	92,15	96,76
4	Tingkat partisipasi warga negara usia -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	78,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan pendidikan Kota Sukabumi yang menunjukkan peningkatan hanya pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya akses pendidikan PAUD dan meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Sementara pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar serta tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama capaiannya menurun di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan perlunya memperluas akses pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Dasar	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang terpenuhi)	100%	99,75
2	Pendidikan Kesenjangan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal/Kesenjangan yang terpenuhi	100%	99,65
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi	100%	74,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Tahun 2024.

Capaian SPM Pendidikan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar adalah 99,75%, jenjang kesetaraan capaiannya adalah 99,65% dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah 74,04%, untuk PAUD capaiannya belum optimal dikarenakan pada jenjang ini belum masuk dalam kategori Program Wajib Belajar, namun demikian capaiannya sudah dapat dikategorikan “Baik”.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2.26

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,45	0,4	3,23	3,30
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	101,91	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	103,83	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	108,69	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	99,15	95,90	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	80,73	95,79	96,97
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	90,16	41,35	67,79	96,90
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	75	89,47	97,70	118,18
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	89,54	84,13	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	87,63	89,36	95,89
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	94,79	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan kesehatan di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa 5 indikator capaiannya meningkat, dan 8 indikator capaiannya tetap 100 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kegiatan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya skrining kesehatan. Peningkatan kegiatan ini juga perlu dilakukan untuk anak pendidikan dasar, orang usia 15-59 tahun dan lansia karena capaian indikatornya belum mencapai 100 persen meskipun kinerja makin membaik

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1. 225. Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi = 370.096;
2. Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di Kota Sukabumi = 6;

3. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.785. Jumlah ibu hamil di Kota Sukabumi = 6.393;
4. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 6.346. Jumlah ibu bersalin di Kota Sukabumi = 6.346;
5. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.994. Jumlah bayi baru lahir di Kota Sukabumi = 5.994;
6. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 30.252. Jumlah balita di Kota Sukabumi = 30.252;
7. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 56.303. Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Sukabumi = 56.058;
8. Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 238.542. Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Sukabumi = 238.542;
9. Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 39.422. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Sukabumi = 39.422;
10. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 37.136. Jumlah penderita hipertensi di Kota Sukabumi = 37.136;
11. Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 6.480. Jumlah penderita DM di Kota Sukabumi = 6.480;
12. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 491. Jumlah penderita ODGJ di Kota Sukabumi = 512;
13. Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 10.680. Jumlah penderita TBC di Kota Sukabumi = 10.680;
14. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 13.404. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Sukabumi = 13.404;

Capaian indikator kinerja di atas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,96 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	96,72 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2024.

Dari 12 indikator capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Sukabumi, 10 indikator sudah mencapai target 100 persen. Adapun indikator yang capaiannya belum mencapai 100 persen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tidak mencapai target hanya sebesar 97,96% nilai pencapaian ini diperoleh dari persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 97,96 % (231.167 sasaran dilayani dari target 235.988 penduduk usia produktif) serta pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 97,96%;
- b. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tidak mencapai target hanya sebesar 96,72% nilai pencapaian ini diperoleh dari persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 95,90% (491 sasaran dilayani dari target 512 sasaran ODGJ) serta pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 100%.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.28

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	-	57,32	18,45	-
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	57,57	55,41	64,15	64,97
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	94,39	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	91,2	91,51	71,64	75,72
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	81,08	87,63	86,86	88,59
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	28,07	80,71
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	-	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Sukabumi secara umum menunjukkan peningkatan di tahun 2023. Namun terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian agar capaiannya meningkat yaitu berkaitan dengan pengendali banjir, layanan pengolahan air limbah domestik, dan kemantapan jalan. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir perlu ditingkatkan karena Kota Sukabumi rawan akan bencana banjir.

Layanan pengolahan air limbah domestik perlu ditingkatkan agar air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Sementara untuk tingkat kemantapan jalan masih perlu peningkatan agar memudahkan mobilitas orang dan kendaraan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 0 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 1;

2. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0. Kota Sukabumi secara geografis tidak memiliki wilayah pantai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042;
3. Luas irigasi kewenangan Kota Sukabumi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 852,15 Ha. luas daerah irigasi kewenangan Kota Sukabumi = 1.311,51 Ha;
4. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Sukabumi = 120.427. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Sukabumi = 120.427;
5. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 82.576. Jumlah rumah di Kota Sukabumi = 109.043;
6. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 5.407. Jumlah IMB yang berlaku = 5.407;
7. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 104.357 Jumlah total panjang jalan Kota Sukabumi = 117,796;
8. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 159. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Sukabumi = 197. Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 197. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 197.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2024.

- a. Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan ketersediaan air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas adalah hal mutlak. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan.
- b. Sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti untuk rumah tangga, industri, dan untuk kebutuhan lain berasal dari PDAM Bumi Wibawa, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindung, dan penampungan air hujan. Kualitas air yang ada cukup baik untuk dikonsumsi kecuali di beberapa daerah tertentu airnya agak kecoklatan sehingga bila akan diminum perlu dilakukan penyaringan terlebih dahulu.

- c. Masyarakat Kota Sukabumi yang sudah memanfaatkan air bersih perpipaan PDAM Tirta Bumi Wibawa masih sangat minim yaitu 12,75 % dari total jumlah penduduk Kota, hal ini disebabkan minimnya sumber mata air juga akibat keterbatasan biaya. Air minum perkotaan non PDAM adalah target utama dari prasarana penyediaan air minum berbasis masyarakat di Kota Sukabumi yang dilaksanakan melalui program DAK, PAMSIMAS maupun swadaya masyarakat.
- d. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2020-2026 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi setiap tahunnya.
- e. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak di kota sukabumi pada tahun 2024 telah mencapai 100%, sebanyak 559 SR untuk air minum serta untuk sanitasi sebanyak 267 RT yang sudah terlayani, yang kesemuanya tersebar di wilayah Kota Sukabumi.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	Persen	100	100	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Persen	89,3	0,15	25,25	55,171
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,87	1,41	1,39	3,40
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	0	35,01	31,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi yang masih perlu peningkatan terutama berkaitan dengan permukiman kumuh, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), dan PSU. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian untuk masing-masing indikator yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Hal ini penting agar produktivitas masyarakat makin meningkat karena lingkungan tempat tinggalnya bersih dan sehat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun $n = 74$
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun $n = 74$;
2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1;
3. Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 54.41. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 55,171;
4. Jumlah unit rumah tidak layak huni = 3.717. Jumlah total unit rumah Kota Sukabumi = 109.043;
5. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 4.911. Jumlah unit rumah Kota Sukabumi = 15.584.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi sebagai berikut:

Tabel 2.31

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2024.

Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni di Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah dilakukan dengan capaian 100%, terdapat 74 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi dan pembangunan baru yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni ini berdasarkan laporan dari Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan melalui anggaran APBD Kota sebanyak 74 unit, ada tahun 2024 tidak ada pelayanan terkait fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada target dan capaian untuk pelayanan tersebut.

2.1.3.1.4 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.32

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	31,18
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	2,92	1,52
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	8,5	8,9	10,34	10,21

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Sukabumi rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Namun indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang realisasinya mengalami penurunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat Kota Sukabumi masih rawan terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang ditangani = 38. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 38;
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 10 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 10;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 10.963;
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: 77;
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 11 Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 11;
6. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Sukabumi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Sukabumi = 56. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Sukabumi = 56;
7. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 10,21 menit.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, Tahun 2024.

2.1.3.1.5 Sosial

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Sosial di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 564. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Sukabumi = 564;
2. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah Warga Negara		
	penyanggah	penyanggah disabilitas yang		
	disabilitas	memperoleh rehabilitasi	100%	100%
	telantar	sosial diluar panti		
2	diluar panti			
	Rehabilitasi sosial	Jumlah anak telantar yang		
	dasar anak	memperoleh rehabilitasi	100%	100%
	telantar diluar panti	sosial diluar panti		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tahun 2024

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	1,91	27,88	8,85	9,08
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	91.711.23	156,96 4,655, 69775
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	29,33	25,61	47,24	50
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	41,1	48,54	59,32	48,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan tenaga kerja di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7;
2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 1.542. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 16.977;
3. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 10.303 Jumlah tenaga kerja = 6.564;
4. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 29. Jumlah Perusahaan = 58;
5. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.587. Jumlah pencaker yang terdaftar = 3.271.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.37

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	77,369	77,56	58,55	41,75
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,036	0,32	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	Persen	11,464	0,011	25,69	41,91

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 583.887,449,504. Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 1,398,304,671,680;
2. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Sukabumi yang didampingi = 83. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 83;
3. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 55. Jumlah penduduk perempuan = 131.206;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.3 Pangan

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2022	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya					
1	cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	133,081	138	116,9	106,80

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki cadangan pangan yang cukup yaitu sebanyak = 56,762 dari jumlah kebutuhan pangan = 53,144. Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.4 Pertanian

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	N/A	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	N/A	N/A	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	N/A	100	100	65,80

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pertanahan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 belum terealisasi dengan baik, dan belum mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerbitkan ijin lokasi pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.40

Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	60,3	59,71	60,0	62,53
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	85,94	73,76	73,21	99,19
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0	0,03	0	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara, Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan, Meningkatkan

kerjasama pengelolaan persampahan, Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sukabumi 62,53;
2. Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 67.348,53. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kota Sukabumi = 67.895,42;
3. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Sukabumi = 0. Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 38.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,45	99,11	99,32	99,58
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	49,75	45,09	61,25	72,53
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,02	98,83	99,43	99,95
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	41,93	62,5

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 264,288. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 265,394;
2. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 74,218. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 102,325;
3. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 108.774. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 108.825;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 10. Jumlah OPD = 16.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.42

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	0	2,03	2,12	2
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	75,52	74,64	69,99	72,23

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8,11	9,33	51,02	7,54

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2;
2. Jumlah peserta KB Aktif Modern = 34,601. Jumlas Pasangan Usia Subur = 47,900;
3. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 3,614. Jumlah Pasangan Usia Subur = 47.900.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.8 Perhubungan

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	100	1	1	0,9
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,38	0,37	0,33	0,32

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas Kota Sukabumi 0,9;
2. Kinerja lalu lintas Kota Sukabumi 0,32.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.9 Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	9,677
2	V/C Ratio di J alan Kabupaten/Kota	Persen	75,76	75,76	100	21,42
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	76,93	76,93	68,26	11,88

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city.

Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Persentase jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 9,677%;
2. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 12. Jumlah Layanan Publik = 56;
3. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Sukabumi = 30,088. Jumlah penduduk = 253,224;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	14,83	18,98	21,7	27,04
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi.

Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 66. Jumlah seluruh koperasi = 244;

2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 31.926. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 31.926;
3. (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota Sukabumi = 3.322.374.968.365. Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Sukabumi = 3.411.037.717.214.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.11 Penanaman Modal

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	451,16	-2,60	-54,51	-0,34

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi kurang baik dan tidak mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Menurunnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa investasi di Kota Sukabumi mengalami penurunan dengan jumlah investasi tahun 2024 sebesar 1,623.129,420,209. Capaian indikator kinerja diatas tidak selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	25,59	24,41	25,4	27,39
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,87	22,78	23,17	24,66
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	15	17	36	43

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi cukup baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Sukabumi = 23.930. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 87.352;
2. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sukabumi = 21,548 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 87.352;
3. Peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan 43 medali.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.13 Kebudayaan

Tabel 2.48

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	73,33	73,3	83,56	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa kinerja Kota Sukabumi mampu melestarikan cagar budaya sejumlah = 3, dari jumlah cagar budaya yang terdata = 3.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.14 Statistik

Tabel 2.49

Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Statistik di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;
2. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.15 Persandian

Tabel 2.50

Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	62,95	63,41	70,69	61,24

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Persandian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 belum terealisasi dengan baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, mengelola 25 sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik, dan mengamankan 25 titik system komunikasi. Adapun jumlah nilai per area keamanan informasi = 395 dengan jumlah area penilaian = 645.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.16 Perpustakaan

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,34	70,10	70,42	69,27
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	39,68	96,85	82,15	87,81

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 90.605 koleksi buku yang tersebar di berbagai perpustakaan, dikunjungi oleh 361.581 orang baik secara online maupun onsite, memiliki 280 tenaga perpustakaan, mengelola 43 perpustakaan berstandar nasional, melaksanakan 6 kegiatan sosialisasi gemar membaca.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.1.2.17 Kearsipan

Tabel 2.52

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Persen	56,03	63,12	64,61	64,79
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	51,67	66,67	71,67	72,5

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 99.200 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 112.000 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 2.500 arsip statis, dan 2.500 arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ kota (sumber data: one data KKP)	Jml (Ton)	1.388,70	1.401,11	102,89	100,20

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA).

2.1.3.3.2 Pariwisata

Tabel 2.54

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	1,99	2,24	7,78	8,12
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	21,74	21,97	23,01	19,45
3	Tingkat hunian akomodasi	Hari	36.000	887	102,06	102,42
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,95	2,95	3,17	3,26
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	46.86 1.100 .000	22.448 .213.6 98	24.61 0.383 .299	5,71

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan ekonomi kreatif, Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata *heritage*.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah membina pengelolaan 5 destinasi wisata, melengkapi infrastruktur dasar untuk 7 (tujuh) destinasi wisata, dan mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2024 = 315. Jumlah Wisatawan Tahun 2023 = 3.879;
2. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2024 = 105.574. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 542.663;
3. Jumlah kamar yang terjual = 411,599. Jumlah kamar yang tersedia = 401.865;
4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 3,26 %.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.3 Pertanian

Tabel 2.55

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Ton)	6,64	6,90	6,68	666,44
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0	0	-100	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian indikator Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi cukup baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 21.296,3. Luas panen = 3.195,5;
2. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2024 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2023 = 0. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2024 = 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	53,78	45,15	67,0	59,58
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	89,33	208,75	80,89	72,95

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 78. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Sukabumi = 78;
2. Realisasi = 1.225,44 Alokasi = 2,056,661;
3. Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 766. Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Sukabumi = 1,050 UTTP.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0,42	3,19	2,21	2,66
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	10	95	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan	Persen	0	100	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	0	0
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	85	85	95	55

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2024 : 74. Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 = 2780;
2. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.58

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	N/A	...	28,16	21,22
2	Rasio PAD	Persen	2,78	...	35,95	32,82
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	82,4	86,18	85,71	87,70
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian IKK urusan Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah PAD = 437,033,662,447;
2. Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 87,70%
Jumlah belanja APBD = 1.330,938,750,204.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.2 Pengadaan

Tabel 2.59

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	6,55	3,3	43,38	73,82
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	96,51	62,74	52,25	13,00

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengadaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 = 0. Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023 = 0;

2. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 1,213.
Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 1.643;
3. Jumlah nilai belanja langsung (Belanja Operasional) yang melalui pengadaan = 664.121.761.649. Total belanja langsung (Belanja Operasional) = 1.270.863.895.847.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.3 Kepegawaian

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	283,76	76,06	75,75	79,74
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,86	7,8	15,77	15,82
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84,75	37,6	50,81	56,03

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan manajemen pegawai ASN dan meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.169. Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah = 1.466;
2. Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) = 232. Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 1.466;
3. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi = 130. Seluruh Jumlah Pegawai Non Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 232.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.4 Manajemen Keuangan

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	2,8	3,87	10,38	4,56
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	14,71	0,31	16,66	4,83
3	Manajemen Aset	Persen	2	2	4	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	10,02	10,79	4,11	4,32

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Manajemen Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1,330,938,750,204. Total belanja APBD dikurangi satu = 1.272,828,818,997;
2. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = 437.033.662.447. Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 416.860.686.061;
3. Nilai realisasi SiLPA = 50.052.498.010. Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.156.864.434.915.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.62

Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	0	0	96,30	98,01
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	41,67	41,67	83,33	66,66

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda.
Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
2. Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 8. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi

2.1.4.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga kosntan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke-n1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atas balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (region) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB mencerminkan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 15.349,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.157,46 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 14.192,25 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha dan adanya inflasi.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berdasarkan penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar Rp 15,35 triliun, sementara di tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi Ro 16,37 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,12 persen.

Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 27 kabupaten/kota, dengan 18 wilayah merupakan kabupaten dan 9 wilayah merupakan kota. Perbedaan karakteristik antar wilayah mempengaruhi perbedaan nilai indikator sosial ekonomi. Dari segi jumlah penduduk, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

2.1.4.2 Daya Saing SDM

2.1.4.2.1 Pendidikan

Indeks Pendidikan Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Dimensi pengetahuan sebagai cerminan hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk melihat seberapa baik kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya akan berdampak kepada tingkat produktivitas manusia itu sendiri. Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Pada Tahun 2024 Indeks Pendidikan Kota Sukabumi capaiannya melampaui target yang telah ditentukan yaitu 72,40 atau mencapai 101 % dari target di tahun 2024 sebesar 71,58.

Indeks pendidikan terdiri dari dua indikator perhitungan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, indeks pendidikan mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Angka Rata-rata lama sekolah dan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah Adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah. indikator ini menunjukan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah diselesaikan atau ditamatkan. Sedangkan Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sukabumi tahun 2024 adalah 10,38 tahun Angka ini menunjukan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas jika di rata-ratakan sudah sampai bangku kelas 1 SMA (sudah melebihi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun).

Harapan Lama Sekolah Kota Sukabumi tahun 2024 adalah 13,62. Angka ini menunjukan bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun keatas dimasa mendatang adalah selama 13.62 tahun atau setara Diploma I.

2.1.4.2.2 Literasi

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid sehingga mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Rata-rata kemampuan literasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan peningkatan dan termasuk dalam kategori BAIK. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan numerasi siswa-siswi Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori BAIK dan didapatkan data bahwa 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Seiring dengan meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang semakin membaik. Berdasarkan penilaian IKK atau Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kota Sukabumi merupakan terbaik ketiga tingkat nasional. Sementara untuk kinerja bidang kearsipan, merupakan terbaik keempat di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian permasalahan pembangunan literasi masyarakat di Kota Sukabumi masih perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat ditengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, serta terbatasnya pustakawan.

2.1.4.3 Daya Saing Infrastruktur

2.1.4.3.1 Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

IKLI Kota Sukabumi termasuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

2.1.4.3.2 Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa, sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan dapat dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tingkat kemajuan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik, sedangkan sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan. Kondisi sarana jalan banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia, dalam hal ini kendaraan. Saat ini, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2.1.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Sepanjang tahun 2024, Kota Sukabumi mencatat kemajuan signifikan dalam penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pertumbuhan nilai investasi, serta penyerapan tenaga kerja yang meningkat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil menerbitkan 14.572 NIB sepanjang 2024, mencapai 162% dari target Provinsi Jawa Barat yang sebesar 8.974 NIB. Keberhasilan ini didukung oleh program inovatif seperti Si Jimat Boss (Siap Jemput Perizinan Masyarakat Bersama OSS) dan sistem informasi Caang Muka Usahaku (Cambuk) yang mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

Berkat upaya pengawasan dan pendampingan yang intensif, Kota Sukabumi berhasil meningkatkan peringkatnya dalam realisasi investasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, naik dari peringkat ke-27 menjadi peringkat ke-10, terdapat tiga kecamatan yaitu Baros, Cibeureum, dan Lembursitu dikenal sebagai kawasan prospektif untuk investasi. Ketiga wilayah ini masih memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha baru, menjadikannya target utama bagi investor. Dengan pencapaian ini, Kota Sukabumi menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama atau IKU Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dalam Perda tersebut ditetapkan jumlah indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 12 (dua belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 4 (empat) indikator tujuan, 8 (delapan) indikator sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5	6	7
I	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,37	5,11	95,16
a	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,40	4	N/A	
b	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	89	30,93	96	100
II	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks pembangunan Manusia	Poin	77,16	75,55	77,69	100
a	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	72,34	71,58	72,4	100
b	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,34	0,33	0,35	100
c	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	38	34,001	N/A	

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
III	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni/Indeks Kenyamanan	Poin	23,82	65,00	65,74	100
a	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	87,36	86	80,23	100
b	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Poin	76,33	75,4	75,4	100
IV	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	74,78	73	87,43	100
a	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024

Berdasarkan dokumen Rancangan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh Indikator kinerja Utama (IKU), 12 indikator memiliki tingkat capaian kinerja $\geq 91\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja SANGAT TINGGI.

Pencapaian IKU pada seluruh misi yang ada dalam RPJMD Tahun 2024, ditembak oleh 64 Program, 106 Kegiatan dan 276 Sub Kegiatan, didukung sumber daya anggaran total alokasi anggaran sebesar 295,755 Milyar dengan efisiensi anggaran sebesar 26,45 Milyar dari APBD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Persentase capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang dipilah berdasarkan masing-masing Misi RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Persentase Kategori Capaian IKU Kota Sukabumi
Tahun 2024 Berdasarkan Misi RPJMD

No	Kategori Capaian IKU	Nilai	Jumlah IKU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan I (Jumlah IKU = 3 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	$\geq 91\%$	6	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	0	0
Tujuan II (Jumlah IKU = 4 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	$\geq 91\%$	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		4	100,00

No	Kategori Capaian IKU	Nilai	Jumlah IKU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan III (Jumlah IKU = 3 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	$\geq 91\%$	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		4	100,00
Tujuan IV (Jumlah IKU = 2 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	$\geq 91\%$	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		4	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum.

Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2024 ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	876.196.581.489	849.913.746.988	91,63	92,35	91,28	98,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.416.931.179	167.969.358.637	97,99	100,00	97,99	97,99
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.238.550.750	79.504.035.755	99,08	100,00	99,10	99,10
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800	59.889.800	60,01	15,00	15,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	26.400.000	26.360.000	99,85	90,00	90,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
Dinas Kesehatan	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.460.863.013	401.350.957.375	97,31	100,00	95,83	95,83

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.859.053.295	69.532.416.123	88,17	100,00	97,00	97,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.217.581.856	2.069.579.456	93,33	100,00	100,00	100,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	370.356.000	367.962.560	99,35	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.543.822.575	3.509.834.900	99,04	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	102.177.748.665	101.460.424.829	98,41	69,96	68,02	97,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.759.097.195	13.536.674.504	98,38	90,00	70,59	78,43
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.676.876.004	5.806.911.126	98,81	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.136.249.800	2.100.847.150	98,34	99,50	99,50	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.620.278.900	6.572.979.005	99,29	54,00	54,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.437.390.150	7.279.844.046	97,88	47,00	47,00	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.663.206.500	4.591.054.013	98,45	20,00	20,00	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.404.772.000	3.381.031.050	99,30	86,22	86,22	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	58.132.387.100	57.861.123.915	99,53	82,85	82,85	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	50.000.000	100	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	297.491.016	279.960.020	94,11	80,00	80,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	1.179.346.570	1.171.875.310	99,39	99,12	99,12	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.285.970	140.225.400	99,95	98,90	98,90	100,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	405.225.000	398.478.500	98,34	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	545.035.600	545.015.600	100,00	98,90	98,90	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	88.800.000	88.155.810	99,27	98,90	98,90	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.007.840.038	11.516.923.465	91,61	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.297.783.088	10.188.789.465	98,94	100,00	100,00	100,00
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.599.407.500	1.217.773.000	76,14	100,00	100,00	100,00
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	110.649.450	110.361.000	99,74	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.584.587.590	3.569.431.271	99,23	100,00	99,96	99,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.214.785.040	3.204.066.071	99,67	100,00	99,92	99,92
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	369.802.550	365.365.200	98,80	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Sosial	8.053.610.158	7.804.697.507	94,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.572.572.448	4.489.351.930	98,18	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.283.577.200	2.238.227.200	98,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	1.500.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	802.756.550	715.936.617	89,18	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	284.743.900	264.871.700	93,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	93.845.060	80.195.060	85,45	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.615.000	14.615.000	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Dinas Tenaga Kerja	3.881.256.980	3.712.725.276	91,24	83,75	83,75	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.407.080	3.327.947.876	99,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	429.700.000	288.490.000	67,14	80,00	80,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	28.000.000	27.937.500	99,78	80,00	80,00	100,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	69.149.900	68.349.900	98,84	75,00	75,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.843.982.235	7.583.539.916	93,01	87,14	87,14	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.292.954.375	6.214.185.894	98,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.269.700	165.210.222	97,60	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	524.883.860	521.171.500	99,29	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	25.000.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	244.265.100	193.521.100	79,23	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.740.000	66.591.689	96,87	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	518.869.200	411.736.200	79,35	85,00	85,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.955.589.544	9.857.468.453	99,78	67,80	69,63	102,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.574.050.094	9.476.180.503	98,98	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	17.760.100	17.760.100	100	10,00	10,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	341.834.950	341.583.450	99,93	40,00	49,13	122,83
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.195.000	15.195.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	6.749.400	100	89,00	89,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Dinas Lingkungan Hidup	31.202.248.952	30.995.077.965	112,16	78,13	75,00	96,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.440.868.602	25.273.323.588	99,34	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.286.250	167.286.250	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	167.587.300	167.471.117	99,93	48,50	48,50	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	435.477.500	430.558.300	98,87	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.745.000	8.745.000	99,94	12,00	12,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.167.050	64.167.050	100	100,00	75,00	75,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	22.874.850	22.874.850	100	14,00	14,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	82.429.800	82.379.800	99,94	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.812.812.600	4.778.272.010	99,28	50,50	50,50	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.046.276.788	8.011.085.541	99,87	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	7.556.618.038	7.521.636.291	99,54	100,00	87,50	87,50
II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.543.150	405.371.150	99,96	100,00	100,00	100,00
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.490.600	44.490.600	100	100,00	100,00	100,00
IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	30.250.000	30.212.500	99,88	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000	9.375.000	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.001.024.525	4.944.976.728	98,96	76,18	72,94	95,75
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA						
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	287.452.000	284.652.000	99,03	85,00	71,65	84,29
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.149.066.150	2.139.725.150	99,57	76,00	76,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.564.506.375	2.520.599.578	98,28790 455	67,53	71,17	105,39
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Dinas Perhubungan	17.991.411.166	17.608.699.473	97,77	90,50	89,74	99,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.205.295.966	14.889.042.539	97,92	100,00	98,47	98,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.786.115.200	2.719.656.934	97,61	81,00	81,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.799.575.831	5.735.322.515	97,66	88,33	91,11	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.251.742.881	5.195.315.413	98,93	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	434.593.250	433.117.402	99,66	90,00	90,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	113.239.700	106.889.700	94,39	75,00	83,33	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	12.657.412.755	12.297.276.922	98,78	167,02	159,16	95,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.317.941.225	8.073.987.142	97,07	100,00	99,17	99,17
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.229.050	1.229.050	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.851.100	6.801.100	99,27	100,00	50,00	50,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	531.236.000	531.235.100	100	64,00	64,74	101,16
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000	80.100.000	98,4	19,00	14,05	73,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.718.755.380	3.603.924.530	96,91	86,15	86,15	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	464.500.000	463.500.000	99,78	700,00	700,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.416.402.958	5.326.247.584	98,13	100,00	95,40	95,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.232.485.573	4.163.793.516	98,38	100,00	97,63	97,63
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	657.909.885	649.100.168	98,66	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.664.600	71.164.600	97,94	100,00	83,33	83,33
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89.192.900	85.539.300	95,90	100,00	91,42	91,42
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000	347.200.000	97,89	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.450.000	9.450.000	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.774.617.552	14.634.327.993	98,95	100,00	98,95	98,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.177.539.052	6.058.102.206	98,07	100,00	99,85	99,85

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	906.225.000	896.627.072	98,94	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.690.853.500	7.679.598.715	99,85	100,00	97,00	97,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
Dinas Komunikasi dan Informatika	29.658.000	29.658.000	100,00	60,00	68,75	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.658.000	29.658.000	100	60,00	68,75	114,58
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.962.850	108.132.850	99	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.962.850	108.132.850	99,24	60,00	60,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	328.439.950	306.326.150	95,62	89,50	88,28	98,64

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	57.549.450	57.509.450	99,93	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	140.358.700	120.358.700	85,75	100,00	95,14	95,14
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	65.531.800	65.500.000	99,95	78,00	78,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.000.000	62.958.000	96,85	80,00	80,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.954.557.878	4.925.321.457	99,57	66,00	66,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.567.991.898	4.539.668.085	99,38	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	386.565.980	385.653.372	99,76	32,00	32,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	140.701.750	132.701.650	94,31	64,00	64,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	140.701.750	132.701.650	94,31	64,00	64,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.917.830.978	9.683.102.371	97,91	80,87	76,20	93,72
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	641.189.350	638.915.150	99,79	33,57	28,39	84,57
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	570.764.650	568.505.150	99,60	25,67	25,67	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.424.700	70.410.000	99,98	42,31	31,11	73,53
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.603.103.000	1.596.295.385	99,76	96,25	96,25	100,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	714.320.000	707.597.401	99,06	85,00	85,00	100,00
Program Pemasaran Pariwisata	116.835.500	116.835.500	100	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	66.947.500	66.942.500	99,99	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	705.000.000	704.919.984	99,99	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.627.667.228	2.603.016.936	99,45	65,40	66,52	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.346.347.750	1.330.788.448	98,84	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	804.769.913	797.983.008	99,16	40,00	45,60	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	307.584.965	305.280.880	99,25	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.750	8.629.750	100	80,00	80,00	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160.334.850	160.334.850	100	7,00	7,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.575.518.300	2.510.500.300	90,66	100,00	95,22	95,22
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.474.330.050	2.414.277.350	97,57	100,00	100,00	100,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.263.750	3.652.750	85,67	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	10.800.000	8.879.000	82,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86.124.500	83.691.200	97,17	100,00	80,89	80,89
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.434.253.600	2.298.373.600	98,05	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.327.795.000	2.191.915.000	94,16	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	48.432.000	48.432.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	58.026.600	58.026.600	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
Dinas Tenaga Kerja	36.099.500	36.001.000	100	90	90	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.099.500	36.001.000	99,73	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Sekretariat Daerah	57.236.235.624	55.650.358.900	97,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.059.735.044	38.234.099.544	97,89	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.550.408.940	16.806.725.734	95,76	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	626.091.640	609.533.622	97,36	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.523.811.588	39.483.226.037	92,85	100,00	100,00	100,00
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	17.554.175.650	17.398.706.776	99,11	100,00	94,29	94,29
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.881.084.025	14.382.277.124	97,95	93,33	93,33	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.203.794.925	9.747.527.470	95,53	80,00	80,00	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.950.711.950	1.943.239.849	99,62	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.726.577.150	2.691.509.805	98,71	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
KEUANGAN	57.244.122.977	54.977.295.050	95	100	98	98

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	57.244.122.977	54.977.295.050	94,83	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.118.097.918	40.184.558.203	95,41	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.788.136.709	9.713.704.225	99,24	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.498.968.850	1.287.788.703	85,91	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.838.919.500	3.791.243.919	98,76	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
KEPEGAWAIAN	7.454.019.586	7.269.134.851	96	100	93	93
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.454.019.586	7.269.134.851	95,95	100,00	92,91	92,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.922.989.736	5.805.149.376	98,01	100,00	98,72	98,72
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	575.027.150	529.551.080	92,09	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	956.002.700	934.434.395	97,74	90,00	90,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.209.698.400	1.202.749.680	99,43	32,50	32,50	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.128.251.773	9.064.045.820	100	77	99	129
INSPEKTORAT DAERAH						
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	9.064.045.820	99,61	76,67	99,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.726.902.918	7.667.330.537	99,23	70,00	70,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	256.395.000	256.220.165	99,93	70,00	60,00	85,71
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	367.385.500	366.176.996	99,67	3	3,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR KEWILAYAHAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
KECAMATAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
Kecamatan Cikole	12.511.893.818	12.407.281.276	99,61	100,00	99,70	99,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.255.815.868	8.160.176.400	98,84	100,00	98,81	98,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1.884.580.500	1.884.477.643	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.300.333.850	2.291.463.633	99,61	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.163.600	71.163.600	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Gunung Puyuh	9.785.452.579	9.572.300.674	99,18	100,00	99,71	99,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.674.128.229	6.467.502.257	96,90	100,00	99,74	99,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.453.042.100	1.452.969.100	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.576.048.250	1.570.016.517	99,62	100,00	99,42	99,42
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.844.000	66.422.800	99,37	100,00	99,37	99,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.390.000	15.390.000	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Citamiang	10.378.608.685	10.236.432.626	99,49	100,00	99,42	99,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.470.494.635	7.332.644.461	98,15	100,00	97,11	97,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.226.365.950	1.226.102.447	99,98	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.625.799.900	1.621.769.120	99,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.718.200	54.691.598	99,95	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.230.000	1.225.000	99,59	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Warudoyong	10.914.648.303	10.792.170.135	99,13	75,00	75,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.306.781.653	7.202.982.066	98,58	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.608.654.950	1.606.260.648	99,85	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.894.926.500	1.879.614.223	99,19	40,00	40,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.597.200	48.625.198	98,04	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.688.000	54.688.000	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Baros	8.258.347.594	8.108.041.482	98,37	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.770.659.844	5.631.238.790	97,58	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.177.172.350	1.175.974.900	99,90	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.251.454.550	1.243.845.712	99,39	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.559.050	39.483.230	95,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.501.800	17.498.850	99,98	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Lembursitu	10.029.232.742	9.916.113.828	99,20	100,00	99,93	99,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.864.193.060	6.758.893.156	98,47	100,00	99,64	99,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.688.750	1.459.648.850	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.643.329.332	1.636.340.885	99,57	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.921.600	47.210.937	98,52	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.100.000	14.020.000	99,43	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Cibeureum	9.208.765.969	9.077.855.804	98,47	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.581.848.994	6.457.336.335	98,11	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.812.500	31.812.500	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.184.889.275	1.184.863.950	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.365.703.200	1.361.763.613	99,71	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.512.000	42.079.406	94,53	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.705.161.706	3.631.965.433	98,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	919.206.183	884.195.633	96,19	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	859.104.039	857.189.039	99,78	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	746.829.100	681.829.100	91,30	100,00	89,74	89,74
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	351.800.000	351.800.000	100,00	100,00	100,00	74,90
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.983.275.400	14.953.025.400	99,80	100,00	94,12	94,12
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diklasifikasikan dengan kriteria, sebagai berikut:

Tabel 2.66
Skala Nilai Peringkat Kinerja

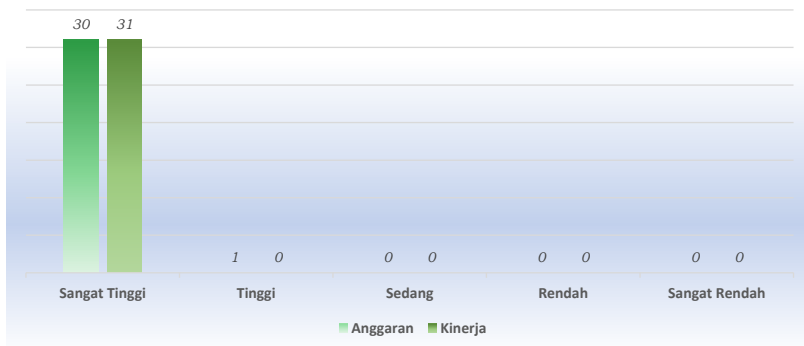
Interval Nilai	Kriteria
$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing- masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2024 sangat baik. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat tinggi dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan tidak ada perangkat daerah yang masuk dalam kriteria sedang atau lebih rendah dari itu.

Jumlah Perangkat Daerah di Kota Sukabumi berdasarkan kriteria capaian anggaran dan kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.12
Jumlah Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria
Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2024



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Tabel 2.67
Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF DAN EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	98.91	< 100			
2	DINAS KESEHATAN	97.82	100	2.18	11.318.046.650	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	97.74	< 100			
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	98.38	100	1.62	229.061.814	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98.26	100	1.47	66.599.884	
6	DINAS SOSIAL	98.33	< 100			
7	DINAS TENAGA KERJA	91.53	100	8.55	422.272.191	
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	99.03	< 100			
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99.07	100	0.93	355.827.812	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.56	100	1.44	96.432.489	
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	98.58	< 100			
12	DINAS PERHUBUNGAN	98.48	< 100			

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF DAN EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99.12	< 100			
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	97.74	100	2.26	276.716.205	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	98.54	< 100			
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	83.63	100	16.37	2.519.474.476	DAK tidak terserap
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	98.37	100	1.63	171.808.072	
18	INSPEKTORAT DAERAH	98.48	< 100			
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	98.45	100	1.53	284.364.178	
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	96.79	< 100			
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	98.04	100	1.96	163.014.777	
22	SEKRETARIAT DAERAH	96.78	100	3.22	1.793.135.785	
23	SEKRETARIAT DPRD	99.25	100	0.75	465.544.254	
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	99.08	< 100			
25	KECAMATAN CIKOLE	99.34	100	0.66	91.818.636	
26	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	99.61	100	0.39	40.639.561	

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF DAN EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
27	KECAMATAN CITAMIANG	98.85	100	1.15	135.455.293	
28	KECAMATAN WARUDOYONG	99.01	100	0.99	124.662.357	
29	KECAMATAN BAROS	99.07	100	0.93	86.583.684	
30	KECAMATAN LEMBUR SITU	99.22	100	0.78	90.328.820	
31	KECAMATAN CIBEUREUM	98.74	100	1.26	127.398.034	

Dari data diatas, terdapat 3 Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran dan kinerja terbaik, yaitu:

1. SATPOLPP;
2. Dinas Kesehatan;
3. Kecamatan Warudoyong.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Per Urusan sampai Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Per Urusan Kota Sukabumi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	972,112,313,957	212,605,836,078	45.84	Sangat Rendah	21.87	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	847,929,562,327	182,804,977,441	19.62	Sangat Rendah	21.56	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	253,123,968,327	48,513,049,829	19.17	Sangat Rendah	19.17	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	505,371,959,394	118,275,733,823	23.40	Sangat Rendah	23.40	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52,038,043,428	8,535,592,120	16.40	Sangat Rendah	16.40	Sangat Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12,325,301,400	98,771,900	0.80	Sangat Rendah	0.80	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17,415,018,357	5,256,728,983	30.19	Sangat Rendah	30.19	Sangat Rendah
1.06	Sosial	7,655,271,421	2,125,100,786	27.76	Sangat Rendah	27.76	Sangat Rendah
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	124,182,751,630	29,800,858,637	72.07	Sedang	24.00	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.07	Tenaga Kerja	4,594,862,620	995,899,248	21.67	Sangat Rendah	21.67	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,881,140,591	2,103,880,594	23.69	Sangat Rendah	23.69	Sangat Rendah
2.09	Pangan	10,960,569,395	2,812,493,951	25.66	Sangat Rendah	25.66	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan	20,750,000	3,355,000	16.17	Sangat Rendah	16.17	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	29,224,310,613	7,376,611,089	25.24	Sangat Rendah	25.24	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6,816,205,639	2,472,644,008	36.28	Sangat Rendah	36.28	Sangat Rendah
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-		Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,640,370,000	10,730,000	99.00	Sangat Tinggi	0.23	Sangat Rendah
2.15	Perhubungan	18,358,329,505	4,134,857,886	97.80	Sangat Tinggi	22.52	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	6,684,904,593	1,788,141,220	95.77	Sangat Tinggi	26.75	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10,393,662,624	2,304,512,095	91.12	Sangat Tinggi	22.17	Sangat Rendah
2.18	Penanaman Modal	5,867,989,145	1,500,099,149	95.13	Sangat Tinggi	25.56	Sangat Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	10,036,124,361	2,738,104,531	98.31	Sangat Tinggi	27.28	Sangat Rendah
2.20	Statistik	51,123,000	5,350,000	100.00	Sangat Tinggi	10.46	Sangat Rendah
2.21	Persandian	125,041,450	3,280,000	100.00	Sangat Tinggi	2.62	Sangat Rendah
2.22	Kebudayaan	441,114,000	30,000,000	100.00	Sangat Tinggi	6.80	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.23	Perpustakaan	6,901,830,544	1,451,805,866	99.35	Sangat Tinggi	21.04	Sangat Rendah
2.24	Kearsipan	184,423,550	69,094,000	100.00	Sangat Tinggi	37.46	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN	4,753,056,536	636,555,800	100.00	Sangat Tinggi	13.39	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	499,884,700	58,306,250	100.00	Sangat Tinggi	11.66	Sangat Rendah
3.26	Pariwisata	1,422,268,000	270,861,686	100.00	Sangat Tinggi	19.04	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	1,643,437,886	118,903,864	100.00	Sangat Tinggi	7.24	Sangat Rendah
3.28	Kehutanan						

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral						
3.30	Perdagangan	746,194,950	119,461,000	100.00	Sangat Tinggi	16.01	Sangat Rendah
3.31	Perindustrian	379,271,000	37,371,000	100.00	Sangat Tinggi	9.85	Sangat Rendah
3.32	Transmigrasi	62,000,000	31,652,000	100.00	Sangat Tinggi	51.05	Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111,084,836,790	29,342,930,545	94.84	Sangat Tinggi	26.41	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.01	Sekretariat Daerah	53,724,322,055	13,593,143,798	92.30	Sangat Tinggi	25.30	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	57,360,514,735	15,749,786,747	97.38	Sangat Tinggi	27.46	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	93,968,626,523	20,503,515,379	97.65	Sangat Tinggi	21.82	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	16,687,390,653	3,683,328,229	97.53	Sangat Tinggi	22.07	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	67,370,770,898	15,004,581,682	98.47	Sangat Tinggi	22.27	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	7,376,851,786	1,759,623,068	92.27	Sangat Tinggi	23.85	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1,071,321,186	4,913,200	100.00	Sangat Tinggi	0.46	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1,462,292,000	51,069,200	100.00	Sangat Tinggi	3.49	Sangat Rendah
5.06	Penghubung						
5.07	Pengelolaan Perbatasan Daerah						
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11,837,447,854	2,891,547,008	94.81	Sangat Tinggi	24.43	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	11,837,447,854	2,891,547,008	94.81	Sangat Tinggi	24.43	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	89,732,873,641	14,102,226,748	97.56	Sangat Tinggi	15.72	Sangat Rendah
7.01	Kecamatan	89,732,873,641	14,102,226,748	97.56	Sangat Tinggi	15.72	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6,044,866,306	971,637,400	98.28	Sangat Tinggi	16.07	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	6,044,866,306	971,637,400	98.28	Sangat Tinggi	16.07	Sangat Rendah
	TOTAL	1,289,534,021,607	281,054,248,958	84.35	Tinggi	21.80	Sangat Rendah

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025

Adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Triwulan I

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253,565,082,327.00	48,543,049,829.00	19.14	69.45	4.09	5.89
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76,897,790,200.00	13,313,737,650.00	17.31	100	17	17.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	37,270,000.00		0.00	100	1	1.00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	79,889,800.00	6,324,800.00	7.92	15	3	20.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	35,000,000.00	-	0.00	90	0	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	135,489,000.00	30,000,000.00	22.14	13	4	30.77
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	170,000,000.00	-	0.00	55	0	0.00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20,000,000.00	-	0.00	60	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50,000,000.00	-	0.00	76	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65,625,000.00	-	0.00	55	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176,064,018,327.00	35,192,987,379.00	19.99	100	20	20.00
Dinas Kesehatan	505,371,959,394.00	118,275,733,823.00	23.40	99.70	8.00	8.02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72,187,372,135.00	7,584,491,267.00	10.51	98.5	11	11.17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,457,546,000.00	10,721,000.00	0.44	100	0	0.00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	806,391,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3,880,512,000.00	3,933,000.00	2.16	100	3	3.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426,040,138,259.00	110,596,588,556.00	25.96	100	26	26.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	64,384,094,828.00	8,637,719,020.00	13.42	100	9.07	9.07
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2,846,589,000.00	904,824,099.00	31.79	57.37	32	55.78
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5,827,517,953.00	49,031,300.00	0.84	100	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,465,689,400.00	43,900,000.00	1.27	57.95	2	3.45
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	771,500,000.00	8,647,000.00	1.12	42.46	1	2.36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5,823,002,050.00	70,002,683.00	1.20	9.38	1	10.66
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,942,008,625.00	267,721,000.00	6.79	78.95	7	8.87
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12,737,579,745.00	3,078,241,200.00	24.17	85.51	25	29.24
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	193,200,250.00	62,600,000.00	32.40	38.01	33	86.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	614,396,978.00	25,778,000.00	4.20	70	2	2.86

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	462,037,350.00	5,629,500.00	1.22	100	2	2.00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10,684,809,400.00	39,562,400.00	0.37	10	0	0.00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	861,930,800.00	6,965,000.00	0.81	1.36	0	0.00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	316,523,850.00	46,615,000.00	14.73	11.38	2	17.57
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20,750,000.00	3,355,000.00	16.17	70	3	4.29

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,816,559,427.00	4,024,846,838.00	25.45	100	26	26.00
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13,236,221,593.00	3,851,572,520.00	29.10	100	38.33	38.33
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,630,136,850.00	470,649,500.00	28.87	100	29	29.00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	280,999,000.00	167,420,000.00	59.58	100	57	57.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,325,085,743.00	3,213,503,020.00	28.38	100	29	29.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,178,796,764.00	1,405,156,463.00	33.63	100.00	27.00	27.00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	363,335,000.00	107,333,100.00	29.54	100	29	29.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3,815,461,764.00	1,297,823,363.00	34.01	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Dinas Sosial	7,655,271,421.00	2,125,100,786.00	27.76	89.29	21.43	24.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,139,440,000.00	385,593,000.00	33.84	25.00	7	28.00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9,640,000.00	130,000.00	1.35	100	2	2.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	402,198,150.00	58,020,000.00	14.43	100	15	15.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520,458,500.00	83,768,000.00	16.10	100	16	16.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	397,031,000.00	69,575,000.00	17.52	100	20	20.00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	31,915,000.00	19,775,000.00	61.96	100	60	60.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,154,588,771.00	1,508,239,786.00	29.26	100	30	30.00
Dinas Tenaga Kerja	4,656,862,620.00	1,027,551,248.00	22.07	100	14.67	14.67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,945,646,820.00	977,695,348.00	24.78	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	396,156,000.00	6,100,000.00	1.54	100	2	2.00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	140,000,000.00	5,045,000.00	3.60	100	4	4.00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	113,059,800.00	7,058,900.00	6.24	100	7	7.00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62,000,000.00	31,652,000.00	51.05	100	50	50.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	13,521,510,591.00	2,114,610,594.00	15.64	100	14.10	14.10
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	84,377,000.00	5,901,560.00	6.99	100	7	7.00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160,710,000.00	7,000,000.00	4.36	100	5	5.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	403,350,000.00	43,379,175.00	10.75	100	11	11.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8,688,000.00	1,238,000.00	14.25	100	15	15.00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	11,498,250.00	4,848,250.00	42.17	100	42	42.00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	401,919,547.00	8,414,500.00	2.09	100	3	3.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	291,745,000.00	95,879,250.00	32.86	100	33	33.00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,514,976,900.00	5,845,000.00	0.23	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	2,125,393,100.00	4,885,000.00	0.23	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,518,852,794.00	1,937,219,859.00	25.76	100	25	25.00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13,103,891,981.00	2,989,704,065.00	22.815	87.45	23.82	27.23
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	0.00	25	0	0.00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	544,768,250.00	67,454,000.00	12.38	22	13	59.09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113,650,000.00	-	0.00	90	0	0.00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6,749,400.00	2,477,300.00	36.70	89	38	42.70
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	405,932,700.00	54,381,250.00	13.40	26	14	53.85
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	93,952,000.00	3,925,000.00	4.18	110	5	4.55
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	341,783,500.00	40,357,250.00	11.81	100	12	12.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	793,956,000.00	65,974,114.00	8.31	100	100	100.00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	177,248,336.00	3,055,000.00	1.72	100	3	3.00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	320,450,050.00	4,667,500.00	1.46	100	2	2.00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10,000,000.00	4,850,000.00	48.50	100	48	48.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10,295,401,745.00	2,742,562,651.00	26.64	100	27	27.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Dinas Lingkungan Hidup	29,224,310,613.00	7,376,611,089.00	25.24	78.25	13.00	16.61
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	260,636,250.00	17,280,500.00	6.63	100	7	7.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	424,660,000.00	35,416,574.00	8.34	100	9	9.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	296,589,000.00	13,010,000.00	4.39	25.5	5	19.61
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	10,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50,875,050.00	11,622,000.00	22.84	100	23	23.00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100,000,000.00	-	0.00	33	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30,018,500.00	763,000.00	2.54	25	3	12.00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84,815,650.00	25,967,000.00	30.62	100	31	31.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,407,901,370.00	349,436,500.00	24.82	99	25	25.25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,558,814,793.00	6,923,115,515.00	26.07	100	27	27.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,816,205,639.00	2,472,644,008.00	36.28	100	34.4	34.40

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	307,698,850.00	71,184,000.00	23.13	100	23.00	23.00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94,765,100.00	27,230,000.00	28.73	100	30.00	30.00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136,617,200.00	19,315,000.00	14.14	100	14.00	14.00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	19,983,000.00	13,245,000.00	66.28	100	67.00	67.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,257,141,489.00	2,341,670,008.00	37.42	100	38.00	38.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Komunikasi dan Informatika	6,861,069,043.00	1,796,771,220.00	26.19	84.60	17.20	20.33
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	496,747,000.00	168,158,000.00	33.85	90	34	37.78
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	330,562,000.00	31,294,000.00	9.47	93	10	10.75
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51,123,000.00	5,350,000.00	10.46	60	11	18.33
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125,041,450.00	3,280,000.00	2.62	100	3	3.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,857,595,593.00	1,588,689,220.00	27.12	80	28	35.00
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	11,519,128,574.00	2,461,344,095.00	21.37	100	8.35	8.35
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35,010,000.00	680,000.00	1.94	100	2	2.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	44,200,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81,400,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	785,948,950.00	58,042,000.00	7.38	100	8	8.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	45,066,300.00	1,995,000.00	4.43	100	5	5.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	339,320,450.00	68,847,000.00	20.29	100	21	21.00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	70,904,500.00	17,540,000.00	24.74	100	25	25.00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	130,990,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130,980,000.00	33,074,000.00	25.25	100	27	27.00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	74,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	174,571,000.00	20,201,000.00	11.57	100	12	12.00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	60,550,000.00	2,865,000.00	4.73	100	7	7.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	144,150,000.00	14,305,000.00	9.92	100	10	10.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,027,037,374.00	2,243,795,095.00	24.86	100	25	25.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,867,989,145.00	1,500,099,149.00	25.56	100.00	21.50	21.50
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64,999,500.00	17,577,500.00	27.04	100	27	27.00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	427,473,500.00	68,348,000.00	15.99	100	16	16.00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130,606,800.00	12,983,000.00	9.94	100	10	10.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109,688,500.00	38,616,000.00	35.21	100	35	35.00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	75,000,000.00	10,640,500.00	14.19	100	15	15.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,060,220,845.00	1,351,934,149.00	26.72	100	26	26.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11,458,392,361.00	3,008,966,217.00	26.26	55.43	16.14	29.11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	957,759,950.00	410,562,950.00	42.87	80	43	53.75
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	2,540,273,350.00	339,031,850.00	13.35	18	14	77.78
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	325,320,000.00	186,991,186.00	57.48	20	10	50.00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	231,835,500.00	20,975,500.00	9.05	4	0.36	9.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	96,900,000.00	3,150,000.00	3.25	16	3	18.75
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	768,212,500.00	59,745,000.00	7.78	150	11.6	7.73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,538,091,061.00	1,988,509,731.00	30.41	100	31	31.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7,086,254,094.00	1,520,899,866.00	21.46	67.1	15.2	22.65
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,473,510,520.00	116,794,700.00	7.93	72	8	11.11
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	41,298,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	162,923,550.00	69,094,000.00	42.41	63.5	43	67.72
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	21,500,000.00	-	0.00	66,8	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5,387,022,024.00	1,335,011,166.00	24.78	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sekretariat Daerah	53,724,322,055.00	13,593,143,798.00	25.30	100	21.33	21.33
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,986,930,008.00	1,296,241,900.00	10.81	100	12	12.00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	576,978,100.00	125,885,810.00	21.82	100	22	22.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41,160,413,947.00	12,171,016,088.00	29.57	100	30	30.00
Sekretariat DPRD	57,360,514,735.00	15,749,786,747.00	27.46	100	28.50	28.50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20,474,902,550.00	5,205,755,853.00	25.43	100	27	27.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,885,612,185.00	10,544,030,894.00	28.59	100	30	30.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18,149,682,653.00	3,734,397,429.00	20.58	100	16.25	16.25
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,939,619,000.00	759,409,539.00	25.83	100	26	26.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,054,013,500.00	255,571,328.00	6.30	100	7	7.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,462,292,000.00	51,069,200.00	3.49	100	4	4.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,693,758,153.00	2,668,347,362.00	27.53	100	28	28.00
Inspektorat Daerah	11,837,447,854.00	2,891,547,008.00	24.43	89.33	15.33	17.16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,230,935,000.00	107,630,000.00	8.74	78	9	11.54

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	648,184,000.00	53,770,000.00	8.30	100	9	9.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,958,328,854.00	2,730,147,008.00	27.42	90	28	31.11
Dinas Perhubungan	18,358,329,505.00	4,134,857,886.00	22.52	100	18.50	18.50
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,376,803,150.00	268,688,357.00	11.30	100	12	12.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,981,526,355.00	3,866,169,529.00	24.19	100	25	25.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	67,370,770,898.00	15,004,581,682.00	22.27	100	17.00	17.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,640,911,230.00	13,076,605,837.00	28.65	100	29	29.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,636,028,068.00	704,918,426.00	4.82	100	5	5.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,440,257,350.00	190,277,150.00	13.21	100	14	14.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,653,574,250.00	1,032,780,269.00	18.27	100	20	20.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,448,172,972.00	1,764,536,268.00	20.89	100	11.33	11.33
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	687,021,800.00	50,423,526.00	7.34	100	8	8.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,071,321,186.00	4,913,200.00	0.46	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,689,829,986.00	1,709,199,542.00	25.55	100	26	26.00
Kecamatan Cikole	15,846,261,351.00	819,822,660.00	5.17	100	11 2/5	11.40
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,848,921,926.00	25,004,600.00	1.35	100	1	1.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,403,240,150.00	79,077,800.00	1.80	100	2	2.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68,199,950.00	13,489,600.00	19.78	100	20	20.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,357,500.00	2,880,000.00	18.75	100	19	19.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,510,541,825.00	699,370,660.00	7.35	100	15	15.00
Kecamatan Gunung Puyuh	12,106,702,085.00	2,008,453,879.00	16.59	100	9	9.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN	1,411,998,708.00	8,704,800.00	0.62	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,919,040,900.00	56,494,500.00	1.94	100	2	2.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52,698,000.00	8,586,000.00	16.29	100	17	17.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47,500,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7,675,464,477.00	1,934,668,579.00	25.21	100	26	26.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kecamatan Citamiang	12,984,122,323.00	2,460,596,726.00	18.95	99.4	11.6	11.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,235,396,222.00	84,761,500.00	6.86	97	7	7.22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,148,094,000.00	24,362,900.00	0.77	100	0	0.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000.00	11,541,000.00	23.08	100	23	23.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,250,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,520,382,101.00	2,339,931,326.00	27.46	100	28	28.00
Kecamatan Warudoyong	13,896,380,505.00	2,460,677,477.00	17.71	97.6	17	17.42
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,567,557,682.00	22,622,800.00	1.44	88	2	2.27

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,545,108,400.00	77,634,300.00	2.19	100	3	3.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43,558,200.00	9,437,800.00	21.67	100	22	22.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49,980,000.00	15,575,000.00	31.16	100	31	31.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,690,176,223.00	2,335,407,577.00	26.87	100	27	27.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Baros	10,363,706,723.00	1,802,997,991.00	17.40	100	12.2	12.2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,144,236,860.00	58,269,900.00	5.09	100	6	6.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,423,652,700.00	12,422,000.00	0.51	100	0	0.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36,768,200.00	6,465,000.00	17.58	100	18	18.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN	23,854,000.00	2,590,000.00	10.86	100	11	11.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,735,194,963.00	1,723,251,091.00	25.59	100	26	26.00
Kecamatan Lembursitu	13,345,659,864.00	2,447,771,373.00	18.34	100	15.6	15.6
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,512,299,912.00	59,245,050.00	3.92	100	4	4.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN	3,081,829,150.00	52,672,800.00	1.71	100	2	2.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74,871,600.00	8,100,000.00	10.82	100	11	11.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76,295,000.00	25,815,000.00	33.84	100	34	34.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,600,364,202.00	2,301,938,523.00	26.77	100	27	27.00
Kecamatan Cibeureum	11,190,040,790.00	2,101,906,642.00	18.78	77.2	10.4	13.47

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,177,917,668.00	58,374,800.00	4.96	80	5	6.25
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,526,604,750.00	22,118,600.00	0.88	31	0	0.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52,648,000.00	5,864,400.00	11.14	75	11	14.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,227,000.00	2,470,000.00	8.17	100	8	8.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,402,643,372.00	2,013,078,842.00	27.19	100	28	28.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,044,866,306.00	971,637,400.00	16.07	100	12.6	12.6
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	913,532,900.00	162,817,900.00	17.82	100	18	18.00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	909,688,506.00	6,097,500.00	0.67	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	747,281,500.00	32,312,000.00	4.32	100	5	5.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	420,381,000.00	63,425,000.00	15.09	100	16	16.00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3,053,982,400.00	706,985,000.00	23.15	100	24	24.00

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 diolah, Bappeda 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan kinerja hingga triwulan I tahun 2025 belum ada yang mencapai target karena masih banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, misalnya karena belum waktunya dilaksanakan atau masih dalam tahapan persiapan. Dalam kerangka acuan kerja masing-masing subkegiatan di perangkat daerah rata-rata capaian kinerja baru dapat terlihat di awal triwulan III.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang diencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari pendayagunaan kekuatan yang belum optimal serta kelemahan yang belum teratasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor.

2.4.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Alih fungsi lahan yang massif untuk permukiman; (2) Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau; (3) Pengelolaan kawasan lindung yang belum optimal; (4) Sistem pangan yang belum optimal (5) Risiko bencana terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor cukup besar.

Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk; (2) Kontribusi perempuan dalam pembangunan belum optimal; (3) Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi baik sektor publik maupun swasta serta pemberdayaan yang inklusif; dan (4) Keberlangsungan kehidupan masyarakat adat ditengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

2.4.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabumi antara lain: (1) Adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat; (2) Pertumbuhan ekonomi masih cenderung stagnan dan berada dibawah angka Jawa Barat; (3) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal; (4) Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi; dan (5) IPM skala kota masih cukup rendah dibanding kota lain di Jawa Barat.

2.4.2.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama/permasalahan daerah yang harus diselesaikan Kepala Daerah serta seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.4.2.3 Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi antara lain: (1) Belum merata dan tercukupinya SDM Kesehatan serta penanganan ketahanan kesehatan; (2) Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial; (3) Minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial; (4) Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (5) Rendahnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga; (6) Kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional; (7) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat; dan (8) Masih tingginya kenakalan remaja.

2.4.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.3.1 Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum optimalnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; (2) Kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan; (3) Belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; (4) Belum optimalnya ekosistem wirausaha; (5) Masih rendahnya IKM produktif;

(6) Proses perizinan usaha yang dianggap masih berbelit dan mahal; (7) Inklusivitas pembangunan ekonomi; dan (8) Penguatan ekosistem ekonomi digital.

2.4.3.2 Daya Saing SDM

Permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih rendah; (2) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kerja masyarakat; (3) Kurang optimalnya pengembangan *softskill*; (4) Kurangnya literasi digital masyarakat; (5) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah; (6) Belum optimalnya pendidikan karakter masyarakat.

2.4.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain: (1) Konektivitas antar wilayah masih belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (2) Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur; dan (3) Belum optimalnya penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan.

2.4.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, diantaranya: (1) Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi UMKM; (2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; (3) Masih adanya pelanggaran PERDA; dan (4) Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Daerah Tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting. Memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Hasil kajian dan analisis berkenaan dengan rancangan kerangka ekonomi Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan pada proses perencanaan hingga menjadi penganggaran sampai nanti dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2026 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2024 dan awal Tahun 2025, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2025 dan 2026. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan segenap infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km², serta jumlah penduduk Tahun 2024 sebanyak 370,096 jiwa, kepadatan penduduk 7.465 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,42%. Jumlah penduduk, Luas wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang cukup padat menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan potensi ekonomi di Kota Sukabumi.

Namun demikian, letak geografis yang cukup strategis di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah Bandung Raya dan wilayah megapolitan Jakarta, menciptakan suatu peluang yang dapat dikembangkan sebagai modal dasar dalam menggerakkan roda perekonomian. Posisi geografis tersebut memberikan keunggulan potensial dalam segi arus lintas barang dan jasa. Seyogyanya pengembangan ekonomi di Kota Sukabumi mengarah pada pendayagunaan potensi sosio-geografis yang dimilikinya.

Berdasarkan kondisi di atas, maka Arah Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 telah dirumuskan melalui 5 (lima) Prioritas Pembangunan, meliputi:

1. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Penciptaan Lapangan Kerja
4. Penataan Kota
5. Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan.

Dari 5 (lima) Prioritas Pembangunan tersebut, tiga prioritas yaitu prioritas satu, dua dan tiga sangat berhubungan erat dengan sektor ekonomi dan ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi. Peningkatan PAD akan dipengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat serta banyaknya masyarakat yang memiliki pekerjaan, di sisi lain peningkatan PAD akan membuat masyarakat semakin sejahtera dan lapangan kerja akan semakin bertambah.

3.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.

Kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh pada kisaran 3,2% pada 2024 dan 2025. Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024, dimana lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan. Sejumlah indikator sektor riil, diantaranya PMI Manufaktur juga tetap ekspansif di level 51,2, dengan permintaan domestik yang kuat, serta optimisme konsumen yang stabil tercermin dari IKK yang terus optimis dan Indeks Penjualan Riil yang tumbuh positif.

Berbagai program akhir tahun yang digalakkan Pemerintah mampu mencapai target yang impresif mulai dari transaksi Harbolnas mencapai Rp31,2 triliun atau meningkat sebesar 21,4% dari tahun 2023, transaksi BINA mencapai Rp25,4 triliun atau meningkat 15,5% dari tahun 2023, serta transaksi EPIC Sale mencapai Rp14,9 triliun atau meningkat 14,9% dari tahun 2023.

Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu. Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya.

Pemerintah kedepan telah menargetkan pertumbuhan ekonomi agar mampu mencapai angka 8% dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mencanangkan 17 Program Prioritas mulai dari swasembada pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan sistem pendapatan negara. Selain itu, dalam kurun waktu Pemerintahan yang baru berjalan saat ini, sejumlah capaian juga telah terwujud seperti bergabungnya Indonesia dalam BRICS hingga pelaksanaan Program Makanan Bergizi.

Lebih lanjut, Pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian nasional, seperti produk nikel pada tahun 2023 yang diekspor hingga USD33,52 miliar, atau meningkat 745% dibandingkan tahun 2017 yang hanya USD4 miliar.

Upaya hilirisasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global.

Selain itu, potensi besar dalam mendorong hilirisasi juga dapat dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang yang telah menunjukkan dampak nyata peningkatan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2024, KEK telah berhasil menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang.

Pertumbuhan 8% dalam 5 tahun ke depan dan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen bersama. Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat mengubah berbagai tantangan menjadi peluang.

Tantangan ekonomi nasional antara lain dampak dari konflik di Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

3.1.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai Rp 724,69 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 448,06 triliun. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,05 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,08 persen. Triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 Juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,99 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,33 persen. Ekonomi Jawa Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen melambat dibanding capaian tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,34 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 12,09 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh Industri Pengolahan dengan andil sebesar 1,51 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,00 persen

Sejumlah tantangan yang harus dihadapi pembangunan Jawa Barat mendatang, salah satunya adalah target pemerintahan di bawah Presiden Prabowo yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0 persen dan pertumbuhan ekonomi 8 persen, ini menjadi permasalahan dan tantangan sementara Arah pembangunan Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jabar 2025-2045 tentang visi dan misi Jabar di 2045 ada tahapan yang menjadi target yang dimulai tahun 2025. Seperti target pertumbuhan ekonomi 2025-2029 sebesar 4,9 persen hingga 6 persen dengan target PRDB per kapita 3.900 dolar hingga 5.300 dolar AS. Sementara di tahun 2040-2045 target puncak yang harus dicapai untuk mewujudkan Visa Jabar sebagai Provinsi Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan adalah laju pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 6 persen. Laju pertumbuhan ini jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi yang menjadi target pemerintahan Prabowo yakni 8 persen. Sedangkan dalam masalah penurunan angka kemiskinan adalah ketidakadanya data yang satu. tingkat kemiskinan di Jabar saat ini 0,7 persen. Angka ini dibawah angka kemiskinan nasional yakni 0,8 persen.

3.1.3 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksiyang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (region) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pada publikasi ini yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut Lapangan Usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha.

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 16,37 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 10,303 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami perlambatan yaitu menjadi sebesar 5,11 persen dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh positif sebesar 5,12 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan serta jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,33 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 dari sisi lapangan usaha disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda dengan andil sebesar 36,83 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran PMTB sebesar 5,94 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2024 yaitu sebesar 36,83 persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 82,12 persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2024 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen sepanjang tahun 2024. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi).

Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 36,83 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 71,94 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2024. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2024, Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 yaitu mencapai 9,08 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 0,29 persen. Selain itu terdapat pula jenis lapangan usaha yang mengalami penurunan seperti kategori C, D, G, J, M, N, O dan Q.

Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2021 yang sebesar 3,71 persen. Geliat perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 terjadi secara signifikan, terbukti dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,35 persen dan Tahun 2023 sebesar 5,12 persen. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah tercermin hasilnya pada pertumbuhan positif di hampir seluruh lapangan usaha. Di tahun 2024 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,11 persen. Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antar tahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M, N (Jasa Perusahaan) tampil mendominasi, maka di tahun 2024 lapangan usaha G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) adalah yang tertinggi dibanding yang lain.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2024 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 82,12 persen terhadap PDRB tahun 2024, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 15,97 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,30 persen dan komponen Konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,60 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar -12,87 persen dan -0,12 persen. Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2025 dan Tahun 2026 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2024 dan awal 2025, maka telah ditetapkan target pencapaian indikator makro bidang ekonomi sebagai dasar dan bahan bagi perencanaan Tahun 2026.

Proyeksi indikator makro tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Berikut target ekonomi makro Kota Sukabumi Tahun 2026 dibandingkan dengan target Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.1

Proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi disandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Indikator	RPJMN 2026	JAWA BARAT 2026	KOTA SUKABUMI 2024	RPJMD KOTA SUKABUMI 2026	RKPD KOTA SUKABUMI 2026
	(Target)	(Target)	(Capaian)	(Target)	(Target)
LPE (%)	5,7 – 6,2	4,96 - 5,69	5,11	4,96-5,96	5,43
PDRB perkapita (juta rupiah)	63,9 – 65,6	0,38 - 52,75	44,76	50,38-51,35	51,02
Kontribusi PDRB	12,80	0,58		0,58	0,58
Tingkat Kemiskinan (%)	5,50 – 6,00	5,99 - 6,54	7,20	5,99-6,54	6,40
TPT (%)	6,30 – 6,65	7,41 - 7,82	8,34	7,25-7,91	8,00
Rasio Gini (Poin)	0,381 – 0,410	0,352 - 0,420	0,428	0,448-0,439	0,420
IPM / IMM (Poin) Indeks Pembangunan Manusia (Indikator Proxy. Poin)	0,57	79,07	77,69	78,31	78,31
Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/Miliar)	6,97	0,45	-	0,45	0,45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	64,31	61,53	61,28	61,53	61,79
Prevalensi Stunting (%)		21,96	16,8	22,11	21,96

Sumber: Ranhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029

Selain indikator makro di atas, maka berdasarkan hasil analisis dari capaian perekonomian terutama PDRB tahun-tahun sebelumnya, telah ditetapkan target dari PDRB sektor yang nantinya secara keseluruhan tentu akan mempengaruhi progres dari pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Target PDRB sektor tersebut seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Proyeksi Capaian dan Target PDRB Sektor Kota Sukabumi Tahun 2026

Lapangan Usaha	Capaian			Target	
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.58	7.17	6,97	7,24	7,50
Indusri Pengolahan	4.81	4.64	5,97	4,54	4,74
Pengadaan Listrik dan Gas	5.9	3.19	-0,02	3,19	3,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.32	2.09	5,10	2,09	2,23
Konstruksi	-0.15	6.85	5,99	6,73	6,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.47	3.8	4,37	3,28	3,34
Transportasi dan Pergudangan	7.59	9.08	9,33	9,47	9,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.7	7.81	5,67	7,88	7,98
Informasi dan Komunikasi	7.01	6.17	4,63	6,36	6,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.57	3.33	2,99	3,48	3,67
Real Estat	6.3	5.54	4,21	5,56	5,78
Jasa Perusahaan	9.13	8.04	5,76	8,06	8,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	-0.34	2.07	0,02	1,65	1,97
Jasa Pendidikan	8.09	5.79	5,07	6,02	6,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.85	5.72	5,27	5,82	5,96
Jasa lainnya	11.67	7.71	9,33	7,90	7,98
Produk Domestik Regional Bruto/LPE	5.35	5.12	5,11	5.39	5.64

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Melihat capaian indikator makro yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2026 sebagai berikut:

1) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 LPE kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022.

Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Di tahun 2024, perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,11 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, keterbatasan sumber daya alam, serta jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, Kota Sukabumi tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari LPE Kota Sukabumi yang lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2023 dan 2024.

Target LPE pada Ranhir RPJMD Kota Sukabumi untuk Tahun 2026 adalah sebesar 5.64 - 6.14 persen sama dengan target yang disampaikan Provinsi dan tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Target tersebut cukup tinggi dan memerlukan keseriusan semua pihak dalam mencapainya. Pemerintah selaku regulator perlu mengorkestrasi peningkatan ekonomi di semua sektor terutama sektor unggulan di Kota Sukabumi.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah

kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 berdasarkan data BPS adalah sebesar 7,20 persen, sedangkan target Rantir RPJMD pada tahun 2026 yang juga sama dengan target RPJPD sebesar 6.21 - 6.76 persen. Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan konstruksi.

Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen di tahun 2023 menjadi 8,34 persen di tahun 2024.

Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa).

Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 28,02 persen di tahun 2024.

Tahun 2026 target TPT Kota Sukabumi telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 serta dalam Ranhir RPJMD 2025-2029 adalah sebesar 7.25 - 7.92. Target cukup signifikan penurunannya dari capaian Tahun 2024 yaitu sebesar minimal 4,2 point. Penurunan angka kemiskinan untuk mencapai target bukanlah pekerjaan mudah, karena diperlukan kerjasama dan keseriusan semua pihak terutama pemerintah dan sektor usaha.

4) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah sebesar 77,69 meningkat 0,53 poin (0,69%) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 77,16. Selama periode 2020-2024, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87% per tahun.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2024, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,63 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,87%. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74% per tahun dengan kenaikan IPM 2,31 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat. IPM Kota Sukabumi yang berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat memiliki makna bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,69 pada tahun 2024. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat dan Nasional sepanjang periode 2020 - 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak.

Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2024, dari semula 11.999 di Tahun 2023 menjadi sebesar 12.252 pada Tahun 2024. Tiga indikator lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan di 2024 dibanding tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup (UHH) dari semula 74,89 naik menjadi 75,11, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami sedikit kenaikan dari 13,60 menjadi 13,62, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 10,37 naik sedikit menjadi 10,38 di Tahun 2024.

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2026 berdasarkan target Ranhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebesar 78,310 yang juga sesuai dengan target yang disampaikan oleh Provinsi dan tertuang pula dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045.

Di tahun 20226 target tersebut sangat berpeluang besar untuk tercapai, namun demikian tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk peningkatan sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari sisi pendidikan, dengan rencana akan dimulainya kembali pendidikan dengan tatap muka semoga juga menjadi pendorong peningkatan IPM dan dari sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2024 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian.

Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Sesuai dokumen Rambah RPJMD Kota Sukabumi, Target Rasio Gini Tahun 2025 sebesar 0,432 - 0,439, maka dengan melihat realisasi pada 2024 serta adanya arahan dari Provinsi maka dilakukan penyesuaian target pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini yaitu menyesuaikan dengan target dalam Rambah RPJMD dan Perda RPJPD.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2026 diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;

5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Konsep dasar ditetapkan Peraturannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah supaya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini mengamanatkan bahwa penganggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang diarahkan dan dikelola berasaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat

menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025 serta asumsi pendapatan Tahun 2026.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2026, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah.

Dengan demikian, secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
 - (a) peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah;
 - (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan *refocusing* belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Adapun strategi yang ditempuh dalam perencanaan Tahun 2026 adalah:

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan;
2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja daerah dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*);
3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan daerah, dan penilaian kekayaan daerah untuk menentukan nilai ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan daerah;
5. Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta;
6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan resiko yang minimal.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Hasil pendapatan daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2024 sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hasil tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2024, dimana dari target pendapatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1,307,949,268,093,- dengan realisasi sebesar Rp.

1,331,427,011,097,- atau realisasi sebesar 101,80 %. Dari tiga komponen pendapatan, dua komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer sesuai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah belum mencapai target dimana realisasi baru mencapai 99,34%.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2026 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2025, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi pada tahun 2025 ini, pengaturan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi yang akan dilakukan. Selain itu, di Kota Sukabumi diyakini masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun proyeksi pendapatan pada tahun 2026, berdasarkan dokumen Ranhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, serta estimasi yang dilakukan berdasarkan kondisi terkini terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
PENDAPATAN TAHUN 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025 – 2026

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	437,033,662,447	452,802,605,328	513,908,787,137	527,629,653,424	527,629,653,424
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	81,185,960,291	102,382,037,679	122,582,045,838	130,102,411,352	130,102,411,352
1.1.2	Hasil Retribusi	33,434,908,759	36,354,805,378	39,381,243,118	44,487,592,504	44,487,592,504

KOD E	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI I RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
	si Daerah					
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,942,863,937	4,753,064,486	4,677,922,256	4,777,922,256	4,777,922,256
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	317,469,929,460	309,312,697,785	347,267,575,925	348,261,727,312	348,261,727,312
1.2	Pendapatan Transfer	878,073,016,646	803,910,562,722	799,198,241,860	633,226,837,559	633,226,837,559
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	777,238,827,981	755,592,824,000	753,209,282,436	591,897,889,000	591,897,889,000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	756,381,673,981	755,592,824,000	753,209,282,436	591,897,889,000	591,897,889,000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	595,150,163,142	598,957,434,000	598,313,947,000	591,897,889,000	591,897,889,000
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil	80,051,234,000	75,414,516,000	78,345,868,000	75,414,516,000	75,414,516,000

KOD E	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Bukan Pajak					
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	515,098,929,142	523,542,918,000	519,968,079,000	516,483,373,000	516,483,373,000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	161,231,510,839	156,635,390,000	154,895,335,436	-	-
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	31,119,020,494	16,918,396,000	16,918,396,000		
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	130,112,490,345	139,716,994,000	137,976,939,436		
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah /Fiskal	20,857,154,000	-	-		
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100,834,188,665	48,317,738,722	45,988,959,424	41,328,948,559	41,328,948,559
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil	76,033,340,588	48,317,738,722	43,569,964,944	41,328,948,559	41,328,948,559
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	24,800,848,077	-	2,418,994,480	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERA	16,320,332,004	14,937,000,000	14,865,152,039	14,835,000,000	14,835,000,000

KOD E	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD (RKPD Perubahan))	PROYEKSI I Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI I RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
	H YANG SAH					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,331,427,011,097	1,271,650,168,050	1,327,972,181,036	1,175,691,490,983	1,175,691,490,983

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2026 berdasarkan dokumen RKPD adalah sebesar Rp 1,175,691,490.983,- berkurang sebesar Rp 155,735,490,983,- atau 11.70 Persen dari target yang ditentukan dalam dokumen APBD Tahun 2025.

Penurunan ini disebabkan pendapatan bersumber transfer khusus yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi belum dimasukan sebagai unsur pendapatan. Hal tersebut didasari bahwa kelompok pendapatan tersebut merupakan dana transfer yang bersifat belum pasti dan tergantung pada menu atau prioritas pusat dan provinsi serta senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Pendapatan ini akan dimasukan pada saat sudah adanya kepastian pendapatan transfer berdasarkan peraturan yang berlaku.

- 2) Target penerimaan pendapatan pada pos PAD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 527,629,653,424,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 90,595,990,977,- (20,73 %) dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp 452,802,605,328,-. Penambahan proyeksi pendapatan ini berasal dari komponen pajak daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu berupa pendapatan BLUD.
- 3) Pada pos Pendapatan Transfer Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 633,226,837,559,- mengalami penurunan sebesar Rp 244,846,179,087,- atau 27,88 % dari target yang telah ditentukan dalam dokumen APBD Tahun 2026. Hal tersebut dikarenakan pendapatan bersumber DAK Fisik dan Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi belum dimasukan sebagai bagian dari pendapatan daerah

- 4) Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 14,835,000,000,- menurun sekitar 0,68 % dibandingkan target APBD Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan estimasi pendapatan kapitasi JKN diperkirakan akan mengalami penurunan di tahun 2026 ini.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - c) Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - d) Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - e) Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - f) mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - g) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari BUMD juga dilakukan melalui pengembangan unit atau jenis usaha lain sesuai ketentuan.
- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026, dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penataan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur layanan
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap
 - d. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah secara terpadu
 - e. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sistem informasi pajak daerah
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, DPRD, DPR RI, DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer
3. Strategi pencapaian anggaran lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Modal digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang bersifat fisik yang akan

dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai kejadian yang bersifat luar biasa dan bencana.

Belanja Daerah Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga) yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah Tahun 2026 juga memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2026 yaitu: 1) Peningkatan PAD; 2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Penciptaan Lapangan Kerja; 4) Penataan Kota; dan 5) Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
2. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2026 belanja gaji ASN disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *access* dan kenaikan tunjangan-tunjangan serta mempertimbangan gaji dan tunjangan tenaga P3K.
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2026 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 yaitu sebanyak 5 (lima) prioritas pembangunan;
5. Pemenuhan pencapaian program prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
6. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
7. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's);

8. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBD
9. Pengalokasian anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang diantaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
12. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
14. Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.
15. Belanja daerah lainnya sesuai ketentuan.

Selain kebijakan belanja diatas, pada Tahun 2026 direncanakan akan mulai dilakukan implementasi pembiayaan kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU), yang rencananya berupa pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh pelosok Kota Sukabumi.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2026.

Berdasarkan uraian diatas, maka proyeksi belanja daerah Tahun 2026 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Operasi	1,245,687,121, 044	1,226,865,604 ,837	1,285,837,512 ,047	1,133,079,480,3 44	1,133,079,480,344
2.1.1	Belanja Pegawai	561,438,335,09 0	571,766,844,0 18	596,390,273,5 19	537,807,779,89 8	537,807,779,898
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605,825,509,80 9	603,754,893,7 43	644,804,083,9 91	568,897,669,44 0	568,897,669,440
2.1.5	Belanja Hibah	77,955,276,145	51,010,367,07 6	44,309,654,53 7	25,990,531,006	25,990,531,006

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	468,000,000	333,500,000	333,500,000	383,500,000	383,500,000
2.2	Belanja Modal	81,795,600,160	55,592,340,97 2	85,627,512,02 2	48,402,143,584	48,402,143,584
2.2.01	Belanja Modal Tanah		0	718,950,000	392,500,000	392,500,000
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,894,675,909	37,708,909,79 3	51,189,217,79 7	24,405,692,184	24,405,692,184
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16,571,754,461	5,083,685,400	18,329,096,34 9	11,286,251,400	11,286,251,400
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15,685,111,012	10,065,217,54 9	13,006,093,97 6	12,062,350,000	12,062,350,000
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,169,223,478	2,734,528,230	2,024,153,900	55,000,000	55,000,000

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	474,835,300		360,000,000	200,350,000	200,350,000
2.3	Belanja Tidak Terduga	3,456,029,000	11,391,595,318	4,379,654,977	5,071,595,318	5,071,595,318
	JUMLAH BELANJA	1,330,938,750, 204	1,293,849,541 ,127	1,375,844,679 ,046	1,186,553,219,2 46	1,186,553,219,246
	Total Surplus/(Defisit)	488,260,893	- 22,199,373,077	- 47,872,498,010	-10,861,728,263	-10,861,728,263

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa estimasi belanja daerah pada RKPD Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp144,385,530,958,- atau sebesar 10.85 %. Belanja daerah di estimasikan sebesar sebesar Rp1,186,553,219,246,- sedangkan Belanja APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp1,293,849,541,127,-.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kota Sukabumi sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 yang seluruhnya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik dari proses perencanaan maupun penganggaran.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (APBD Murni)	TARGET 2025 (RKPD Perubahan)	PROYEKSI Ranhir RPJMD 2026	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	51,384,237,117	24,199,373,077	49,872,498,010	18,960,513,300	18,960,513,300
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	51,384,237,117	24,199,373,077	49,872,498,010	18,960,513,300	18,960,513,300
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	8,098,785,037	8,098,785,037
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	8,098,785,037	8,098,785,037
	Pembiayaan Neto	49,384,237,117	22,199,373,077	47,872,498,010	10,861,728,263	10,861,728,263
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	49,872,498,010	-	-	-0	-0

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2026 terhadap anggaran APBD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.38,522,508,854,-atau sebesar 78,01 persen.
2. Penerimaan Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2026 terhadap anggaran APBD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.32,423,723,817- atau sebesar 63,10 persen. Pengurangan ini terjadi karena adanya asumsi pendapatan SiLPA TAHUN 2026 akan berkurang seiring semakin tingginya penyerapan belanja.

3. Pengeluaran Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2026 terhadap anggaran APBD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.6,098,785,037,- atau sebesar 304,94 persen, hal tersebut terjadi karena untuk melakukan penyertaan Modal Pada Bank BJB cabang Kota Sukabumi

Selain berdasarkan uraian di atas, pada Tahun 2026 akan dimulai pembayaran pertama cicilan pinjaman daerah sebagai resiko dilakukannya pinjaman daerah melalui mekanisme KPBU. Adapun secara angka, berapa yang harus dilakukan pembayaran, sampai saat ini masih dalam proses perhitungan dan kajian yang mendalam. Hal tersebut diantaranya adalah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang selama ini dimiliki dengan terus berupaya meningkatkan pendapatan.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan 6) Hibah. Adapun secara penjelasan dari masing-masing sumber pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN berupa dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas fiskal Kota Sukabumi masih pada kategori lemah.

Hal tersebut didasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2022 masih berkisar 30,58 persen. Sekitar 68,20 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer Pemerintah Pusat. Karena itu, untuk membiayai program prioritas ataupun program yang selaras dengan prioritas nasional, dukungan pembiayaan dari APBN merupakan salah satu solusi yang realistis untuk beberapa tahun ke depan.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3) Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Sukabumi adalah melalui dana masyarakat/umat, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar.

tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat.

- 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

- 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang telah menyadari pentingnya kontribusi pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Pembiayaan daerah untuk infrastruktur masih banyak mengalami kendala karena adanya hambatan keterbatasan anggaran. APBD masih harus difokuskan pada pembiayaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, penanganan bencana dan lain-lain.

Pada konsisi ini maka skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dapat menjadi salah satu solusi, di mana pemerintah, BUMD serta swasta bahu membahu untuk membiayai akselerasi pembangunan terus dengan prinsip gotong royong.

6) Hibah.

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan, Kota Sukabumi akan mencoba menjajaki melakukan mekanisme pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU). Pemerintah Kota Sukabumi sedang menyiapkan kajian dan persyaratan untuk mengusulkan skema pembiayaan KBPU. Nantinya apabila anggaran ini disetujui maka seluruh anggarannya akan dipergunakan untuk melaksanakan program prioritas “Sukabumi Kota Bercahaya” yaitu berupa pembangunan dan pengadaan penerangan jalan umum di seluruh pelosok wilayah Kota Sukabumi baik di lingkungan perkotaan maupun perkampungan. Dengan kondisi lingkungan yang sangat terang diharapkan akan mengurangi angka kejahatan serta yang penting adalah meningkatkan potensi pengembangan ekonomi bagi seluruh masyarakat, karena bertambahnya lokasi yang strategis dan memadai untuk dijadikan tempat usaha.

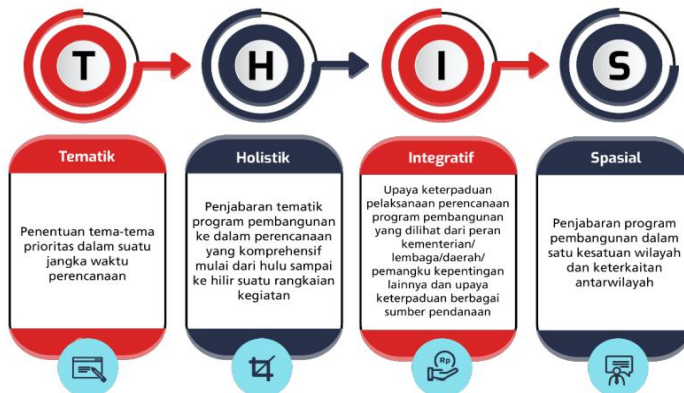
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan atau diharapkan tercapai pada akhir periode sebuah dokumen perencanaan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPD Provinsi serta isu-isu strategis pembangunan Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan tahap pembangunan tahun pertama dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substansi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Pendekatan perencanaan berbasis T-H-I-S



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2023

Pendekatan T-H-I-S tersebut secara implementatif dilakukan melalui:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan 5 (lima) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD RI serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Selanjutnya rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 tersebut akan tetap mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RTRW Kota Sukabumi;
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
3. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 Triwulan 1;
4. Prioritas Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
5. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; dan
6. Kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2026.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan daerah, maka ditetapkan sejumlah indikator makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya yang nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi yang tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dokumen RPD termasuk isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu acuan utama, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan triwulan 1 Tahun 2024 beserta permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas program pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026. Penjelasan di atas sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kota Sukabumi Tahun 2026



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2025

4.1.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (Lima) tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam implementasi RPJPN tahun 2025-2045 yaitu untuk melaksanakan dasar dasar tranformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *Engine Of Growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara, berdaulat, maju dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Ruma Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Kalimat sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut:

Gambar 4.3
Target Sasaran Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi sebagai berikut: transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial; transformasi ekonomi hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja;

transformasi tata kelola kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, meperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketaguhan diplomasi, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujutkan melalui upaya transformasi super prioritas (*game changers*) sebagai berikut:

Gambar 4.4
Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers)



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2029, 2025

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2026 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2026.

Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2026 ditujukan pada pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 4.5
Visi Misi Presiden



Asta Cita tersebut selanjutnya memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 4.6
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar dibawah ini.

Gambar 4.7
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

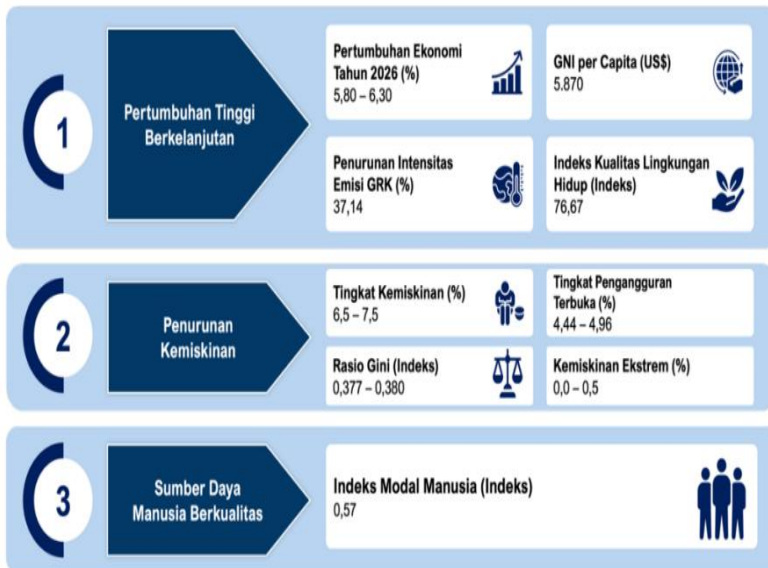


Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pertanian (KSPP)/food estate untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran *ethanol*, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Pembangunan pada tahun 2026 akan difokuskan dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada Gambar sebagai berikut.

Gambar 4.8
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: RKP Tahun 2026

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari pengiatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 4.9
Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: RKP Tahun 2026

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis yang Ungul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi “pusat *cutting-edge* industry, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Penikatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di jawa barat, jawa tengah, jawah timur;
2. Pembangunan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan jawa timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan jalan tol trans jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (tanjung priok dan tanjung perak);

4. Pengelolaan *urban governace* pada WM Jakarta, WM bandung, WM semarang, dan WM Surabaya, termasuk pembangunan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan sanitasi, perumahan dan pemukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efesien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu *global brain hub*;
6. Peningkatan pertahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada Kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

RKP 2026 menjadi fondasi strategi untuk mencapai Indonesia emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, energi, IKN, digital, IPTEK dan inovasi, serta agama dan kebudayaan.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global.

Pengarusutamaan pembangunan RKP Tahun 2026 memuat rencana pelaksanaan pengarusutamaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029: (i) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial; (ii) Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs); (iii) Transformasi Digital; (iv) Pembangunan Rendah Karbon; dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim. Masing-masing kebijakan diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mencakup perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang setara, inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pengarusutamaan pembangunan ini tidak hanya memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif.

Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2025- 2029 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD provinsi Jawa Barat pada tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET		
								2025	2026	2027
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang CagEUR, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer			Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,57	0,58	0,58
			1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,16	75,29	75,56
					b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,52	19	17,86
			1.2	Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya	a	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	76,47	74,79 - 74,85	75,13 - 75,60
					b	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	Belum Rilis	54,70 - 54,73	55,29 - 55,95
			1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	a	Tingkat Kriminalitas	Angka	Belum dihitung	Belum dihitung	Belum dihitung
					b	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	Belum Rilis	51,78	52,53
					c	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	N/A	50,01 (-74,51)
					d	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	Belum Rilis	3,02	3,08
			1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	a	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Tahun	8,87*	9,52 - 9,53	9,64 - 9,66
					b	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,8	12,87 - 12,88	12,91 - 13

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET		
									2025	2026	2027
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	a	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	51,17*	63,36	65,63	67,6
					b	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44*	69,71	70,61	71,29
					c	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,482*	460	457	448
					d	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,15*	71,95	73,12	73,87
					Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	4,95	4,96 - 5,37	5,15 - 6,2	5,23 - 7,48
					Kontribusi PDRB Provinsi		Persen	12,82	12,72	12,45	12,34
					Indeks Ekonomi Hijau Daerah		Poin	Belum Rilis	61,3	61,73	62,69
					Indeks Ekonomi Biru Indonesia		Poin	45,29	48,19	51,38	54,78
			2.1.1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	a	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Poin	41,39	41,46	41,39	41,38
			2.1.2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	a	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Poin				
			2.1.3	Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	a	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Poin	14,5	14,4	14,3	14,3
		b	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Persen	3,15	7,88	7,7	7,53			
		c	Tingkat Inflasi	Persen	2,25 (YoY per Juli 2024)	3,3 - 3,8	3,12 - 3,77	2,95 - 3,74			
		d	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	94,22	94,45	94,69			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
									2025	2026	2027			
		Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	2.1.4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	a	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	N/A	22,81	22,58	22,36			
					b	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	3,07	3,15	3,21-3,46	3,28-3,65			
					PDRB per Kapita		Juta Rupiah	56,08	57,41 - 57,77	63,65 - 66	68,22 - 71,6			
			2.2.1	Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	a	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75	6,42 - 6,99*	6,31 - 6,66	6,05 - 6,49			
					b	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	Belum Rilis	24,72	23,84 - 24,73	24,00 - 24,77			
					d	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Poin	45						
			2.2.2	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	a	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	84.31	68,19	68,52	68,84			
			2.2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	a	Nilai Tukar Petani	Persen	N/A	4,58	4,42	4,23			
			3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan			Rasio Gini		Poin	Belum Rilis	0.383 – 0.390*	0.382 - 0.395	0.382 - 0.395
								Penurunan Intensitas Emisi GRK		Persen	Belum Rilis	6,61*	7,2	7,98
3.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	a				Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	Belum Rilis	59,51	62,28	63,78			
		b				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	58,11	59,26			
		c				Indeks Desa	Poin	Belum Rilis	9,560,709	9,748,137	9,935,564			
		d				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06*	64,31	64,56			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET			
									2025	2026	2027	
					e	Persentase Penurunan Emisi GRK						
						a. Kumulatif	Persen	Belum Rilis	2,66	3,31	4,02	
						b. Tahunan	Persen	Belum Rilis	9,27	10,63	12,46	
						f	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	108	107
						b	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)		125,44 (2023)	145,15	142,56	140,85
						a						
			3.2	Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil	a	Rasio Kewirausahaan Daerah	Poin	Belum Rilis	3,5	3,79	3,97	
			3.3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	a	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	
					b	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	44,57	45,07	46,57	48,27	
			4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi			Indeks Daya Saing Daerah		Poin	Belum Rilis	3,87
4.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	a				Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	71,76	72,26	72,76	
4.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	a				Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	Belum Rilis	Tinggi (83,55)	83,79	89,02	
		Indeks Reformasi Birokrasi				Poin	Belum Rilis	90,7	91,14	91,59		
4.3	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	a				Indeks Pelayanan Publik	Poin	Belum Rilis	4,6	4,62	4,64	
	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan											

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

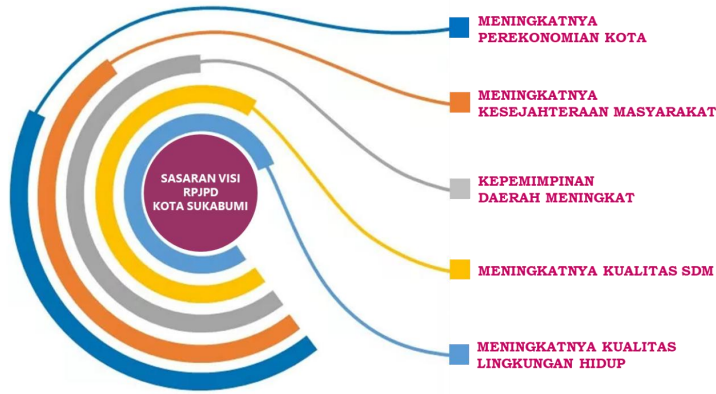
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sesuai tabel di atas akan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan delapan prioritas pembangunan nasional. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2025-2029.

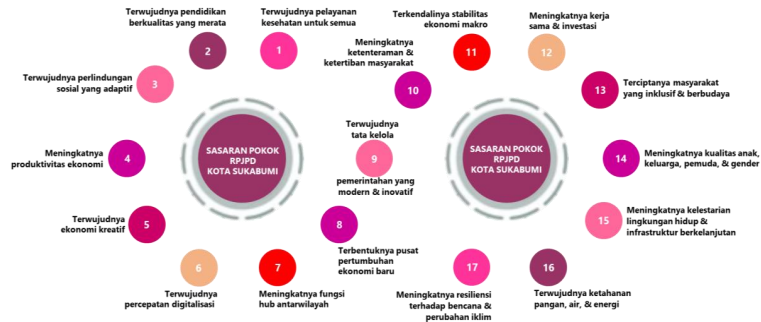
Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD. Selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 yaitu: “Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan”.

Gambar 4.10
Sasaran Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Gambar 4.11
Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 seperti pada gambar di atas merupakan gambaran ketercapaian Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Berdasarkan kedua hal tersebut dan disandingkan dengan isu strategis jangka menengah Kota Sukabumi maka rumusan keadaan/kondisi Kota Sukabumi tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis”.

Gambar 4.12
Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, 2025
(diolah)

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut:



Inovatif menekankan pentingnya kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik;
- Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan;
- Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih baik;
- Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam teknologi dan inovasi;
- Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan teknologi; dan
- Terjalinnnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru untuk masalah lokal.



Mandiri berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif;
- Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa mengandalkan bantuan eksternal;
- Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri; dan
- Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.



Agamis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;
- Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan keputusan pemerintah;
- Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya kerukunan antar umat beragama;
- Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan
- Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik.



Nasionalis berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan nasional. Kondisi ini tergambar dengan:

- Ditempatkannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas nasional;
- Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional; dan
- Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusunlah Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi untuk mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” adalah:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.

2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum

Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tersebut akan memperkuat kohesi dan integrasi sosial.

Hal ini didukung dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim investasi.

3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kota. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih diarahkan pada industri MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions*).

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik

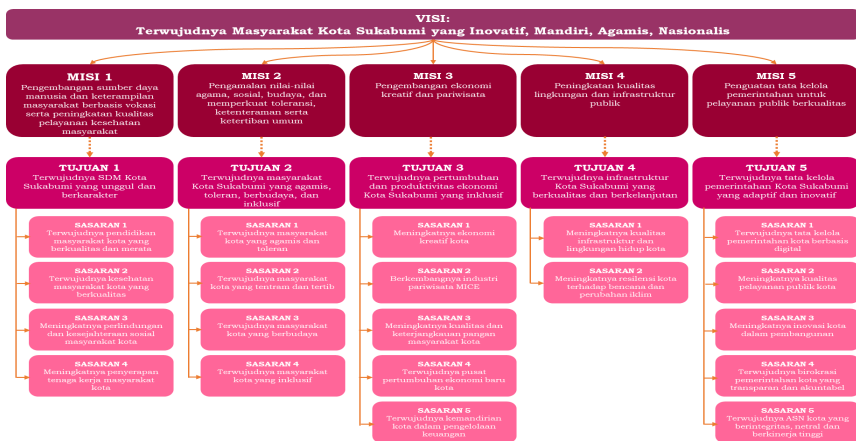
Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin nyata terjadi. Sementara itu, pengembangan infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk pengembangan kehidupan yang lebih baik.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas

Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata kelola yang inovatif.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi, maka ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.13
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Tabel 4.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis" Misi: Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	77,69	77,90	78,31	78,75	79,22	79,68	80,14
		Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,63	13,68	13,73	13,78	13,84	13,89
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,38	10,50	10,62	10,74	10,86	10,98	11,10
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,11	75,31	75,52	75,73	75,94	76,15	76,36
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Angka Kemiskinan (Persen)	7,20	6,36	5,99	5,19	4,23	3,11	2,72
					-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	8,34	7,54	7,25	7,24	7,20	7,18	7,13
					-	-	-	- 7.87	-	-
					8.21	7.92	7.91		7.85	7.80

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif		Indeks Rasa Aman (Poin)	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18
Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36
Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas		Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Poin)							
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya (Poin)	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Poin)		60,46	61,76	63,06	64,36	64,55	66,25
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	44,76	45.29 - 45.65	50.38 - 51.35	54,02 - 55,77	57.92 - 60,72	62,09 - 66,24	66.78 - 72.99
		Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif (Poin)	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90.56	91,23

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen)	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	80,90	82,52	84,17	85,85	87,57	89,32	91,10
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (Persen)	0	0	0	0	0	25	25
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)	2,47						
	Terwujudnya infrastruktur Kota		Indeks Kota Layak Huni (Poin)	65,74	66,75	67,74	68,75	69,74	70,75	71,74

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) (Poin)	76,36	78	80	81	82	83	84
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit (Poin)	77,69	77,90	78,31	78,75	79,22	79,68	80,14

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah Tahun 2025-2029.

Gambar 4.14
Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Prioritas nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai prioritas nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 yang menjadi integrasi kebijakan yang tangguh dalam mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045.

1) Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan merata.

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 yang tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM				
1	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾	79,51 (2023)	81,69 - 85,23	82,12 – 85,66
2	Indeks HAM ²⁾	2,70 (2023)	2,75	2,80

Sumber RKP 2026

2) Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya.

Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan				
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	15,7	16,0	17,0
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	65,6	65,7	65,8
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,80 (2020)	67,50	68,00
4	<i>Global Cybersecurity Index</i>	100	100	95
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	61
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan secara Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 ^{a)}	73,2	75,4
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,67	2,30	2,38
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8,27	7,21	6,55
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>)				
9	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,82
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) ^{b)}	14,68	20,00	20,00
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>)				
11	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,50
12	Kapasitas Tampung Air (m ³ /kapita) ^{b)}	59,59	59,31	60,16
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	24,00 (2020)	39,20	42,24

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) ^{b)}	10,25	12,50	17,00
Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan				
15	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	3 (2023)	3	2
16	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	41,26
17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	43	41
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
18	Indeks Ekonomi Hijau	60,37 (2023)	68,34	71,01
19	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64 (2023)	58,00	60,00
20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ^{b)}	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	28 (17 terdaur ulang)
21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	17,47 (2023)	18,37	19,07
22	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) ^{b)}	28,53 (2023)	26,67	27,35
23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,47
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,53 (2024)	76,49	76,67

Sumber: RKP Tahun 2026

- 3) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Tabel 4.5
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,00 (2019)	46,50	47,00

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	169,10	188,50	188,04
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,21	66,90	64,51
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	6,81	8,00	7,63
5	Aset Asuransi/PDB (%) ^{a)}	8,93	9,10	9,30
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,72	57,80	59,90
7	Total Kredit/PDB (%)	35,35	37,80	38,46
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70 (2023)	91,00	91,50
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) ^{b)}	24,50	35,00	37,95
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	0,97	1,10	1,12
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,15
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,18
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,72 (2022)	4,20-4,30	4,60-4,70
14	Devisa Pariwisata (miliar USD)	16,71	17,10-18,30	22,00-24,70
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,30-7,90	7,40-8,00

Sumber RKP Tahun 2026

- 4) Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (*human capabilities*) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya.

Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi.

Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Tabel 4.6
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,45
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,36
3	Rata-rata Nilai PISA			
	(a) Membaca	359 (2022) ³⁾	396	396
	(b) Matematika	366 (2022) ³⁾	404	404
	(c) Sains	383 (2022) ³⁾	416	416
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	(a) Literasi Membaca	63,06	64,89	65,89
	(b) Numerasi	55,92	57,36	58,86
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) ⁴⁾	32,00 ²⁾	33,94	34,92
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,20 ²⁾	11,11	11,49
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,14 ²⁾	68,32	68,50
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	72,39 ²⁾	74,43	74,68
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,11 ⁴⁾	2,10	2,10
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) ⁴⁾	189 (2020) ²⁾	122	109

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) ^{c)}	21,50 (2023) ⁵⁾	18,80	17,50
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) ^{c)}	387 (2023) ⁶⁾	329	252
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) ^{c)}	98,42 ⁷⁾	98,60	98,70
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	73,83
2	Indeks Perlindungan Anak ^{a)}	68,29 (2023)	70,19	72,33
3	Indeks Pembangunan Pemuda ^{b)}	60,59 (2023)	65,16	67,24
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) ²⁾	0,430	0,421
5	Indeks Pembangunan Gender	91,85 ³⁾	92,02- 92,11	92,11- 92,21
6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94,00	94,50
7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69,00	69,50
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	52
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50 - 5,00	4,44-4,96
3	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) ^{c)}	0,28 (2020)	0,30	0,31
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) ^{c)}	56,42	56,30 - 58,80	56,40- 59,31
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
1	Peringkat pada Asian Games	13 (2023) ⁸⁾	- ^{d)}	9-11 ⁸⁾

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
2	Peringkat pada Asian Para Games	6 (2023) ⁹⁾	- d)	5-7 ⁹⁾
3	Peringkat pada ASEAN Para Games	1 (2023) ¹⁰⁾	- d)	1-2 ¹⁰⁾
4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	9,04 (2023) ¹⁾	10,36 - 11-45	10,80- 11,94 ¹⁾

Sumber: RKP Tahun 2026

- 5) Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

Untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026 pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,98 ^[a]	20,80	21,20

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
1	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	13,30
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,15 ^[a]	29,37	29,44
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22,2	21,7	22, 7

Sumber: RKP Tahun 2026

- 6) Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Tabel 4.8
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan				
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57 ^[1]	7,0 - 8,10	6,5-7,5
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) ^{c)}	1,47	0,5-1,0	0-0,5
3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,13	17,50	18,2
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^{b)}	31,21	32,15	34,99
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	9,07 (2023)	10	10,40
Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan				
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,25	67	68,66
Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan				
1	Persentase Desa Mandiri (%)	22,85 ^{d)}	23,29	23,91 ^{d)}
Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
1	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%) ^{a)}	56,56 (2022)	57,29	57,70
2	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%) ^{b)}	44,13 (2022)	44,35	44,58

- 7) Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.8
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,70
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00 - 64,99	65,00 - 66,99
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani				
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98 ^{a)}	71,38	72,8 ^{a)}
2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	94
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba				
1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%) ^{b)}	1,73 (2023)	1,70	1,70 ^{a)}
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
1	Return on Asset (RoA) BUMN	3,14 (2023)	3,21	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,84	12,36	12,17-13,35
2	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,08	10,24	10,46-11,40
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
1	Tingkat Inflasi (persen)	1,57	2,5±1,0	2,5 ± 1,0

- 8) Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tabel 4.9
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	66,15
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	58,99
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	77,14
Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,136

Sumber: RKP Tahun 2026

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional yang telah diuraikan sebelumnya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangkamenengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis provinsi Jawa Barat tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025. Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. *Green and blue economy* serta pembangunan inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green and blue economy* yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green and blue economy* dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam Indonesia Development Forum (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029. Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini untuk menjamin kelancaran pembangunan dalam jangka panjang. Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Keberlanjutan penataan ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.

5. Kualitas tata kelola pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan. Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:

“Penguatan SDM dan Konektivits Daerah”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pentingnya proses pengembangan SDM berkualitas dan memprioritaskan keterhubungan antar wilayah maupun antar komponen pembangunan pada Tahun 2026.

Proses penyusunan isu strategis tahun 2026 perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 dan mengacu pada arah kebijakan pada RPJMD provinsi jawa barat tahun 2025-2029, serta memastikan keterkaitan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP 2026.

Keterkaitan isu strategis berdasarkan RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.10

Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
1	2	3	4	5	6	7
Kemiskinan, pengangguran, ekonomi yang tidak berkelanjutan	Peetumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau dan biru		Transformasi kedalam ekonomi hijau dan ekonomi biru		Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan	<i>Green dan Blue Economy: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal</i>
Jumlah penduduk yang meningkat, akses layanan dasar, literasi digital, pendidikan vokasi, budaya sosial kemasyarakatan	Perlindungan sosial yang belum optimal dan kurang adaptif;	Bonus demografi 2030	Bonus demografi	Arahan pembangunan dan peran Jabar dalam Regional Jawa-Bali	Peningkatan produktivitas daerah; Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang	Kualitas dan Daya Saing SDM: Perkembangan penduduk menciptakan potensi SDM yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial

PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
1	2	3	4	5	6	7
					sehat dan budaya masyarakat maju	masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat
Ketimpangan penyediaan dan kualitas infrastruktur	Kualitas dan pemerataan pendidikan; Pelayanan kesehatan yang belum merata	Pemerataan pembangunan dan keberadaan penduduk kelas menengah	Pemindahan ibukota negara; Konektivitas dan infrastruktur dasar	Ketimpangan pembangunan Utara-Selatan	Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar: Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar
Kerawanan bencana, pengelolaan lingkungan pesisir, pencemaran, penyediaan RTH perkotaan	Kualitas infrastruktur lingkungan; Penanggulangan bencana dan perubahan iklim; Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup	Persaingan sumber daya alam	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Perubahan iklim dan Bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan: Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko

PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
1	2	3	4	5	6	7
						dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana
Kebutuhan ruang, alih fungsi lahan, pengendalian pemanfaatan ruang	Pengelolaan DAS	Urbanisasi dan pembangunan perkotaan serta transportasi berkelanjutan				Keberlanjutan Penataan Ruang: Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan

PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
1	2	3	4	5	6	7
Birokrasi yang kurang adaptif, integritas pemerintahan, ekosistem inovasi	Tata kelola pembangunan wilayah			Tata Kelola Pemerintahan terkait kerjasama regional	Tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan

Sumber: Analisis Bappeda 2025

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu:

1. Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan);
2. Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir;
3. Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan
4. Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk 9 Langkah Ngawangun Jabar (Sembilan Langkah Membangun Jabar) sebagai berikut:

1. Langkah Kesatu

Langkah Kesatu yaitu Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan, dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari jalan nasional hingga jalan desa (jalan leucir), pembangunan rumah rakyat miskin, pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani jaringan listrik, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, untuk mewujudkan Jabar ODF/BABS (Open Defecation Free/Bebas Buang Air Besar Sembarangan).

2. Langkah Kedua

Langkah Kedua yaitu Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian, dilaksanakan dengan melalui perbaikan dan pembangunan irigasi yang didukung dengan pompanisasi sawah tadah hujan dengan tenaga surya. Langkah Kedua juga mendorong terciptanya Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah swasembada sapi. Langkah ini dilaksanakan melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta penggunaan alat pertanian modern dan tepat guna.

3. Langkah Ketiga

Langkah Ketiga yaitu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru, dalam rangka menjaga kesetaraan jumlah ruang kelas Sekolah Negeri SD, SMP, dan SMA.SMK.

Pengembangan pendidikan berkarakter dilaksanakan melalui percepatan program wajib belajar dengan penambahan SMP dan SMA, pembangunan SMK di kawasan industri bekerja sama dengan dunia industri dan usaha untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, pendidikan vokasi untuk mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah melalui beasiswa di politeknik berorientasi terapan, dan penguatan pendidikan budi pekerti dan agama.

4. Langkah Keempat

Langkah Keempat yaitu Pengembangan Lapangan Kerja Baru, dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi melalui kemudahan perizinan, penyediaan lahan, dan kesiapan tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota yang bertata ruang industri, serta pariwisata, ekonomi kreatif, dan smart city. Langkah ini didukung juga dengan pengembangan usaha muda di berbagai bidang, termasuk start-up.

Upaya pengembangan lapangan kerja baru ini meliputi dorongan terhadap investasi di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk memperkuat rantai nilai tambah, menciptakan keterkaitan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan industri besar, serta mengembangkan sentra-sentra IKM unggulan.

5. Langkah Kelima

Langkah Kelima yaitu Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus, dilaksanakan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dengan pemberian beasiswa dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat, serta pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lokal.

Penambahan layanan khusus meliputi layanan kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan stroke dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya, termasuk penyediaan ambulans ICU dan ambulans transport dengan dokter pendamping untuk pemeriksaan langsung bagi warga sakit darurat yang dapat menjangkau daerah terpencil, pengembangan puskesmas rawat inap terutama di wilayah perbatasan provinsi, penyediaan laboratorium kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan holistik/tradisional.

6. Langkah Keenam

Langkah Keenam yaitu Penanganan Stunting dan Gizi Buruk, dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan asupan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi, serta peningkatan peran kader PKK dan Pos KB Desa.

Langkah Keenam yaitu Penataan Kawasan, dilaksanakan melalui penataan tata ruang perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat, pengembangan arsitektur berbasis budaya Sunda, dan renovasi rumah tidak layak huni. Penataan kawasan termasuk juga penataan kampung nelayan, tempat pelelangan ikan, pelabuhan pendaratan kapal nelayan serta normalisasi muara di pesisir Jawa Barat.

7. Langkah Ketujuh

Langkah Ketujuh yaitu Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat, dilaksanakan melalui reboisasi hutan dan lahan, perlindungan dan penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, daerah aliran sungai, dan kampung nelayan, dan lingkungan perkotaan. Pemulihan kondisi lingkungan didukung oleh pembangunan infrastruktur rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global.

8. Langkah Kedelapan

Langkah Kedelapan yaitu Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri, didukung dengan pengelolaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri dilaksanakan secara terintegrasi sampai dengan tingkat RT (Rukun Tetangga).

9. Langkah Kesembilan

Langkah Kesembilan yaitu Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi, dengan tujuan untuk membentuk karakter birokrasi yang jujur, bersih, dan tulus melayani masyarakat. Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, ajengan, dan guru ngaji.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024- 2026 untuk tahun 2024, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025.

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

- Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku.

2) Kesehatan

- Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Untuk segera membuat *Master plan Drainase* sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.
- Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.

4) Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.
- Pendataan RTLH serta penaggulangan nya.

5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.

6) Bidang Sosial

- Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan.
- Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

- Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat.
 - Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.
 - Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- 3) Bidang Ketahanan Pangan
- Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
 - Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.
- 4) Bidang Pertanian
- Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat.
 - Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.
- 5) Bidang Lingkungan Hidup
- Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
 - Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola *typing fee*.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Kelurahan)
- Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia.
- 7) Bidang Koperasi Dan UMKM
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.
 - Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.
 - Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.
- 8) Bidang Penanaman Modal
- Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi.
 - Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPSTP.

9) Bidang Kebudayaan

- Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Pariwisata

- Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan.
- Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.
- Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi *Great sale*.
- Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri
- Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.

2) Bidang Pertanian

- Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.
- Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian.
- Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.
- Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi.

3) Bidang Perdagangan

- Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.
- Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional.
- Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.

- Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.
- Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.

4) Bidang Perindustrian

- Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
- Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha- usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.

5) Bidang Transmigrasi

- Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.
- Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.

6) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Bidang Perencanaan

- Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
- Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.

b. Bidang Keuangan (Peningkatan PAD)

- Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.
- Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.
- Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara *online*.
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.

c. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS .
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja
- Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS.

d. Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.
- Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Bidang Hukum dan HAM

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah
- Tersedianya *database* tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya.
- Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

f. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

- Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif.
- Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- Meningkatkan peran lembaga/*stake holders* dalam mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.
- Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.

g. Penanggulangan Bencana

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.
- Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi.
- Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran.

h. Kebijakan BUMD

a. Perusahaan Daerah Air Minum

- Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.
- Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.
- Menekan tingkat kebocoran air.
- PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.

i. Lain-lain

- Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu;
- Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU);

- Pembangunan sarana prasarana pencegah banjir;
- Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau.

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Perumusan isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2026 dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2024;
2. Kondisi terkini Tahun 2025;
3. Arah kebijakan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029;
4. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat;
5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; dan
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka proses penyusunan isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
▪ Distribusi penduduk belum merata ▪ Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi ▪ Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi ▪ Kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat yang relatif tinggi ▪ IPM untuk skala kota tahun 2024 masih cukup rendah dibanding kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Perlunya penguatan dan pendampingan di beberapa puskesmas untuk meningkatkan IKS ▪ belum merata dan tercukupinya SDM kesehatan ▪ Umur Harapan Hidup, masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Indeks Pembangunan Keluarga masuk kategori siaga ▪ Indeks Perlindungan Anak termasuk rendah ▪ Ruang-ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan masih ter	Polarisasi sosial	<i>Aging population</i>	<i>Mismatch pendidikan-DUDI</i>	▪ Penduduk usia produktif dan kualitas SDM ▪ Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal	Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi Masyarakat inklusif, berbudaya dan religius

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
▪ Rendahnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga ▪ Rata-rata pendidikan masyarakat setara dengan tamatan SMP atau sederajat ▪ Kemampuan numerasi siswa masih dalam kategori sedang ▪ Budaya literasi masyarakat mengalami penurunan ▪ Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi ▪ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban					
▪ Rendahnya kontribusi PDRB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat ▪ PDRB per Kapita termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dalam perekonomian kota ▪ Adanya kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan ▪ Ekosistem digital belum terbangun dengan baik ▪ Belum optimalnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan SDM kreatif	▪ Krisis sumber daya alam ▪ <i>Cyber insecurity</i> ▪ Disrupsi teknologi	Dampak hilirisasi	Pemanfaatan teknologi	Investasi dan optimalisasi potensi ekonomi	Ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
▪ Alih fungsi lahan untuk permukiman cukup besar ▪ Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik ▪ Kualitas lingkungan hidup cenderung stabil di angka 60 ▪ Risiko gempa bumi, banjir, dan tanah longsor masih cukup besar ▪ Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang ▪ Konektivitas antarwilayah agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan ▪ Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur ▪ Belum optimalnya penyediaan air minum ▪ Belum optimalnya pengelolaan air limbah ▪ Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Iklim dan <i>biodersity</i>	▪ Penerapan standar <i>sustainability</i> ▪ Transisi energi	▪ Degradasi lingkungan ▪ Kerentanan dan potensi bencana ▪ Kesenjangan pembangunan wilayah	▪ Lingkungan hidup dan ketahanan bencana ▪ Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur	Lingkungan dan infrastruktur perkotaan
▪ Penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi ▪ Indeks SPBE masih terendah jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat		Sinkronisasi kebijakan makro-sektoral			Tata kelola pemerintahan berkualitas

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
▪ Perlunya peningkatan pelayanan publik karena Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan					

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (hasil analisis)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, kemudian berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sesuai dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, isu strategis pembangunan Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi

Kota Sukabumi tidak memiliki sumber daya alam sehingga modalitas utama dalam pembangunan bertumpu pada SDM yang dimilikinya. SDM yang ada saat ini rata-rata masih setara dengan lulusan SMP/ sederajat dan kondisi kesehatan masyarakat yang diukur dari UHH capaiannya masih di bawah kota lain di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, penyiapan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif diperlukan untuk memperkuat modalitas pembangunan dan sebagai fondasi untuk transformasi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM.

2. Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius

Sebagai kota yang masyarakatnya heterogen, Kota Sukabumi perlu untuk meningkatkan inklusivitas masyarakatnya. Penghargaan dan pengakuan atas keberadaan atau eksistensi dari perbedaan dan keberagaman itu membutuhkan perlakuan yang setara, tidak diskriminasi, dan tidak diperlakukan semena-mena. Perlakuan tersebut terutama ditujukan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Di sisi lain, modernisasi dan urbanisasi berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperburuk dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan. Untuk itu diperlukan penguatan budaya dan moralitas agar citra kota yang dikenal sebagai Kota Santri dapat dipertahankan.

3. Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai itu diperlukan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik investor, pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada industri kreatif dan pariwisata, dan pengembangan pusat pelayanan dan pertumbuhan baru agar potensi ekonomi kota dapat dimaksimalkan dan lebih merata.

4. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi sangat diperlukan di tengah perkembangan kota yang masif disertai dengan ancaman bencana dan perubahan iklim. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh pada daya dukung lingkungan terutama air dan pangan. Sementara pembangunan kota terutama pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur perkotaan lainnya akan tetap diperlukan namun ke depannya diarahkan kepada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Hal tersebut akan disertai dengan upaya mendorong transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

5. Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas

Peningkatan tata kelola pemerintahan berkualitas diperlukan mengingat Reformasi Birokrasi yang dilakukan masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat dituntut lebih prima seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi ini perlu dioptimalkan dalam sistem pemerintahan mengingat penerapannya masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan secara simultan dengan penguatan peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat

Berdasarkan rumusan 5 (lima) isu strategis di atas, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Penahapan pembangunan untuk tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan nilai-nilai agama, sosial dan budaya
3. Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan normalisasi PAD
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar
5. Pengembangan kapasitas ASN

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	▪ Meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat pelatihan dengan memastikan kondisi yang memadai dan akses yang mudah ▪ Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan untuk memungkinkan lebih banyak warga kota mengikuti program vokasi ▪ Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran ▪ Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja ▪ Meningkatkan fasilitas pelatihan vokasi, seperti pusat pelatihan dan laboratorium, serta menyediakan peralatan yang diperlukan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
2.	Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum	▪ Menjalin kemitraan dengan perusahaan dan industri lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan merancang program pelatihan yang relevan ▪ Menyediakan kesempatan magang dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mempermudah transisi ke dunia kerja
3.	Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata	▪ Menyediakan layanan konseling karir dan bimbingan untuk membantu individu memilih jalur vokasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat ▪ Membangun, memperbarui, atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan yang baik dan mampu menangani kebutuhan kesehatan masyarakat
4.	Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik	▪ Memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dengan standar pelayanan prima ▪ Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, vaksinasi, dan pencegahan penyakit ▪ Mengadakan program kesehatan gratis dan memberikan bantuan untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan asuransi kesehatan daerah yang inklusif ▪ Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, untuk memastikan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru ▪ Menyelenggarakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, dan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat ▪ Mengembangkan sistem manajemen data kesehatan yang efisien untuk melacak kesehatan masyarakat, memonitor tren penyakit, dan mengelola informasi pasien ▪ Menerapkan teknologi telemedicine untuk memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau ▪ Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan melalui forum kesehatan dan konsultasi publik ▪ Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk melengkapi dan memperluas upaya kesehatan ▪ Mengembangkan rencana darurat dan respons cepat untuk situasi kesehatan krisis, seperti wabah penyakit atau bencana alam, untuk melindungi kesehatan masyarakat secara efektif ▪ Menyediakan pelatihan dan simulasi bagi tenaga kesehatan dan responden darurat untuk memastikan kesiapan dalam menangani situasi darurat ▪ Menyediakan berbagai program sosial untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan sosial,

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		program pemberdayaan masyarakat, dan layanan kesehatan sosial ▪ Menyediakan bantuan sosial langsung untuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka ▪ Membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan ▪ Mendukung penyelenggaraan acara dan perayaan keagamaan serta memperkuat kerja sama antar umat beragama ▪ Menyediakan dan mendukung program pendidikan agama di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk pelatihan bagi pendidik agama ▪ Mengadakan kursus dan seminar tentang nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan etika sosial ▪ Menciptakan forum untuk dialog antar umat beragama guna meningkatkan saling pengertian dan toleransi antar kelompok agama yang berbeda ▪ Mendorong kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk membangun rasa kebersamaan dan toleransi ▪ Menyediakan layanan penyuluhan dan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi masalah sosial, seperti kekerasan domestik, penyalahgunaan narkoba, dan masalah kesehatan mental ▪ Mengembangkan kebijakan yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan,

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas ▪ Menyelenggarakan program kesadaran tentang hak-hak sosial dan hukum untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketidakadilan ▪ Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan komunitas untuk memperkuat solidaritas sosial ▪ Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan sosial dan proyek-proyek komunitas ▪ Melindungi dan melestarikan warisan budaya lokal, seperti situs bersejarah, tradisi, dan seni, melalui program pemeliharaan dan restorasi ▪ Menyelenggarakan festival, pameran, dan acara budaya yang merayakan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal ▪ Mengintegrasikan pendidikan tentang budaya lokal dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran dan apresiasi sejak dini ▪ Menggunakan media lokal untuk mempromosikan budaya dan seni, serta menyediakan platform untuk seniman lokal dan kelompok budaya ▪ Membangun kerja sama dengan organisasi budaya, komunitas seni, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan acara dan program budaya ▪ Mendorong pertukaran budaya dengan daerah lain atau negara lain untuk

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		memperluas wawasan budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap keragaman ▪ Menyelenggarakan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis ▪ Menggunakan media sosial, poster, dan materi kampanye untuk menyebarkan pesan-pesan tentang persatuan dan toleransi ▪ Membuat forum atau kelompok diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu terkait keberagaman dan mencari solusi bersama ▪ Menyelenggarakan acara bersama, seperti festival budaya, hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan semua komunitas untuk membangun rasa saling pengertian ▪ Mendukung dan memfasilitasi acara budaya dan seni yang merayakan keberagaman, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam acara-acara tersebut ▪ Mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi dalam kurikulum sekolah, serta menyediakan pelatihan bagi tenaga pendidik ▪ Menyediakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat tentang keterampilan sosial, empati, dan cara menghadapi perbedaan dengan positif ▪ Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program yang mempengaruhi

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		kehidupan mereka, memastikan bahwa suara semua kelompok terdengar ▪ Mendukung organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lokal dalam kegiatan yang mempromosikan persatuan dan kerja sama antar kelompok ▪ Memberikan dukungan kepada inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan, seperti program-program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lintas budaya ▪ Menyediakan pendanaan atau sumber daya bagi proyek-proyek yang mempromosikan keberagaman dan integrasi sosial ▪ Menyediakan layanan mediasi dan resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan atau ketegangan yang mungkin timbul antara kelompok-kelompok masyarakat ▪ Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menangani kasus-kasus intoleransi atau diskriminasi dengan cepat dan adil ▪ Mengawasi situasi sosial dan memantau potensi konflik atau ketegangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan ▪ Menegakkan hukum dan peraturan yang melarang diskriminasi dan kebencian berbasis ras, agama, atau etnis ▪ Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga agama, dan kelompok budaya untuk mengimplementasikan program-program yang mendukung toleransi dan persatuan ▪ Membentuk jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk memastikan koordinasi yang

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		baik dalam upaya mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ▪ Mengimplementasikan program pemberdayaan sosial yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi kelompok rentan ▪ Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial, seperti kekerasan domestik atau ketergantungan narkoba ▪ Menyediakan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak ▪ Membentuk forum atau kelompok diskusi untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program-program kesejahteraan ▪ Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, program kesejahteraan, dan pengambilan keputusan lokal ▪ Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan program kesejahteraan dan memaksimalkan dampaknya ▪ Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung program-program sosial dan memberikan sumber daya tambahan ▪ Mendirikan atau mendukung pusat kreatif dan inkubator yang menyediakan ruang, peralatan, dan sumber daya untuk para pelaku ekonomi kreatif, seperti seniman, desainer, dan pengusaha kreatif

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		▪ Menyediakan ruang usaha yang terjangkau dan strategis untuk bisnis kreatif, termasuk studio seni, galeri, dan ruang kerja bersama ▪ Menyediakan akses ke pembiayaan, hibah, dan pinjaman dengan syarat yang fleksibel untuk mendukung start-up dan usaha kecil dalam sektor kreatif ▪ Menerapkan program insentif untuk mendorong investasi dan pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif ▪ Menyediakan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam bidang seperti desain grafis, multimedia, seni, dan pemasaran digital ▪ Mengintegrasikan mata pelajaran terkait kreativitas dan inovasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi ▪ Memfasilitasi program mentoring dengan para ahli dan pelaku industri untuk membantu pengembangan bisnis dan keterampilan individu ▪ Menyediakan bimbingan karir untuk membantu individu memilih jalur karir di sektor kreatif dan mengembangkan portofolio mereka ▪ Menciptakan atau mendukung platform digital untuk memasarkan produk dan jasa kreatif secara lebih luas, baik secara lokal maupun global ▪ Menyelenggarakan event, pameran, dan festival kreatif untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada publik dan calon pembeli

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		▪ Mengembangkan branding kota sebagai pusat ekonomi kreatif untuk menarik perhatian investor, wisatawan, dan pelaku industri kreatif ▪ Mengadakan kampanye promosi untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi sektor kreatif di kota ▪ Membangun kemitraan dengan sektor swasta, perusahaan besar, dan lembaga keuangan untuk mendukung dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif ▪ Menyusun program bersama dengan perusahaan dan lembaga swasta yang dapat memberikan dukungan dan peluang bagi pelaku kreatif ▪ Menjalin kerja sama dengan kota-kota atau negara lain untuk pertukaran ide, teknologi, dan praktik terbaik di bidang ekonomi kreatif ▪ Mengikutsertakan pelaku kreatif dalam proyek internasional dan jaringan global untuk memperluas jangkauan dan peluang bisnis ▪ Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mempermudah pendirian dan operasional usaha di sektor kreatif, serta mengurangi hambatan birokrasi ▪ Menyediakan dukungan dan perlindungan untuk hak kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif dapat melindungi inovasi dan karyanya ▪ Menyediakan penyuluhan mengenai hak kekayaan intelektual dan hukum terkait untuk memastikan bahwa pelaku kreatif memahami dan dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang ada

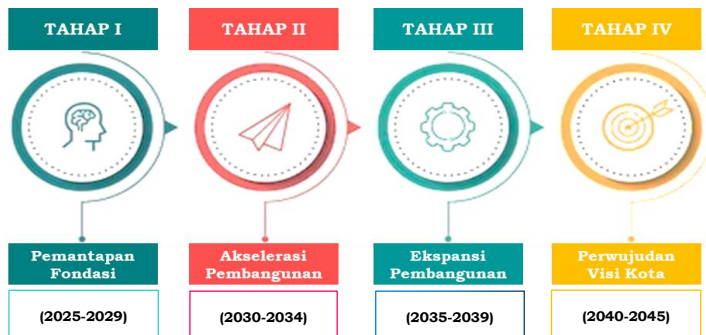
NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		▪ Memberikan bantuan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal ▪ Menginisiasi proyek infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi ▪ Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja dan menciptakan program magang atau pelatihan kerja ▪ Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup ▪ Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah ▪ Menyelenggarakan program untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam ▪ Menyediakan ruang publik dan fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk beraktivitas dan berkumpul secara aman dan nyaman ▪ Mengimplementasikan program pelatihan terstruktur untuk pegawai pemerintah kota dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi, dan pelayanan publik ▪ Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional lainnya ▪ Menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan publik

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		▪ Menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat ▪ Menyediakan kursus dan pelatihan khusus dalam kepemimpinan dan manajemen bagi pejabat tinggi dan manajer di pemerintahan kota ▪ Memfasilitasi program mentoring untuk mempersiapkan calon pemimpin dan meningkatkan keterampilan manajerial ▪ Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan adil untuk menilai kontribusi pegawai serta memberikan umpan balik yang konstruktif ▪ Menyediakan sistem insentif dan penghargaan untuk memotivasi pegawai dan mendorong kinerja yang baik

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2025-2029 merupakan pembangunan tahap pertama dari RPJPD Kota Sukabumi tahun 2025-2045 yaitu pemantapan fondasi.

Gambar 4.15
Pentahapan Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

Tahap pertama adalah pemantapan fondasi. Pemantapan fondasi ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sebagai modalitas pembangunan ke depan. Fokus yang dilakukan pada tahap pertama seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.16
Fokus Pemantapan Fondasi (2025-2029)



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 adalah:

**“Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik untuk
Ketahanan Sosial Masyarakat”**

Tema di atas memiliki makna bahwa tahun 2026 fokus pembangunan Kota Sukabumi adalah untuk bidang ekonomi dan pelayanan publik. Ekonomi yang diharapkan adalah ekonomi yang bersifat inklusif/terbuka terutama dalam mendukung peningkatan ekonomin kreatif. Pertumbuhan ekonomi haruslah difokuskan pada pemerataan manfaat ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Selain itu pelayanan publik yang merupakan kebutuhan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama agar hal tersebut dapat membantu memudahkan dan mensejahterakan masyarakat.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan ekonomi inklusif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPJMD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2026 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13
Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	PENAHAPAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Perluasan akses pendidikan dan kesehatan	* Penciptaan Lapangan Kerja * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas		
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota		
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota		

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	PENAHAPAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Peningkatan nilai-nilai agama, sosial dan budaya	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan
		Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib		
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya		
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif		
Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan normalisasi PAD	* Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
		Berkembangnya industri pariwisata MICE (<i>Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions</i>)		
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota		
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru		
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		
Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan	Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Penataan Kota
		Meningkatnya Resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim		
Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Pengembangan kapasitas ASN	*Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota		* Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	PENAHAPAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
	yang adaptif dan inovatif	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan		
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel		
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi		

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Berdasarkan data diatas, terdapat enam Prioritas Pembangunan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan programdn kegian di Tahun 2026. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Salah satu kunci utama dalam melakukan pembangunan adalah ketersediaan sumber daya terutama anggaran. Maka opsi terbaiknya adalah melakukan otimalisasi peningkatan PAD melalui: Normalisasi dan optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD dan BUMD.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Fokus pembangunan adalah kepentingan masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Adapun secara teknis prioritas ini akan dilaksanakan melalui: implementasi wakaf uang, dana bergulir/dana abadi, penguatan ekonomi kreatif termasuk UMKM, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

Salah satu masalah besar di Kota Sukabumi selain ketimpangan adalah masih tingginya angka pengangguran, maka prioritas penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang harus dilakukan. Program yang dapat dilakukan diantaranya melalui: pengembangan pendidikan vokasi serta pengiriman tenaga kerja luar negeri, kemitraan dengan industri dan pelaku ekonomi serta dukungan untuk pengusaha dan *start up*.

4. Penataan Kota

Sebuah kota yang indah adalah kota yang tertata dengan baik sehingga akan banyak kunjungan wisatawan untuk menikmati alam dan lingkungannya. Penataan kota merupakan hal yang harus terus menerus dilakukan dengan terlebih dahulu mempunyai perencanaan yang matang. Langkah yang akan dilakukan untuk penataan kota diantaranya melalui: perbaikan dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, penanganan sampah, serta penerangan seluruh wilayah kota.

5. Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

Salah satu pembangunan yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan nilai, mental dan budaya masyarakat. Penguatan nilai-nilai positif serta keterbukaan dalam semua proses pembangunan menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan. Prioritas ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai agama, sosial, dan budaya, toleransi dan keberagaman, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai tugas dan perannya serta kolaborasi pembangunan dengan semua stakeholder yang ada.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Program prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2026 terdiri dari 45 program. Program prioritas yang

dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 090-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis” Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata		Indeks Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya akses dan mutu pendidikan masyarakat	▪ Harapan Lama Sekolah ▪ Rata-rata Lama Sekolah • Tingkat Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini • Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar • Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan	Program Pengelolaan Pendidikan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum 3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik 5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas		Usia Harapan Hidup	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	• Prevalensi Stunting • Persentase Peningkatan Succes Rate TB • Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terstandar • Persentase Pemenuhan Perbekalan Kesehatan pada Faskes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kelurahan dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan		Angka Kemiskinan	
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		sosial masyarakat kota			
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota		Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif			Indeks Rasa Aman	
		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran		Indeks Kerukunan Umat Beragama	
			Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis	Persentase Masyarakat yang Mendapat Manfaat Program Wakaf	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Persentase Konflik antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Terwujudnya Masyarakat Kota		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Sukabumi yang Tentram dan Tertib			
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya		Indeks Warisan Budaya	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				PDRB Per Kapita	
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Meningkatnya ekonomi kreatif kota		Indeks Kota Kreatif	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM Menjalin Kemitraan	Program Pengembangan UMKM
		Berkembangnya industri pariwisata MICE		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota		Indeks Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota		Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	
			Meningkatnya investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
			Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang			Indeks Kota Layak Huni	
		Meningkatnya kualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	berkualitas dan berkelanjutan	infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya pelayanan sarana transportasi darat	Persentase Layanan BRT	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangan	Program Pengembangan Permukiman
			Meningkatnya kualitas ruang publik	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Meningkatnya kualitas layanan sumber daya air	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya kualitas layanan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana	
			Meningkatnya ketahanan bencana Daerah	Persentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan	Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Meningkatnya pengurangan emisi GRK	Emisi Co2 Equivalen	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Indeks Reformasi Birokrasi	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
			Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Program Aplikasi Informatika
			Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Program Pengelolaan Arsip
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota		● Indeks Pelayanan Publik ● Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	IPP Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
			Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Peraturan Daerah	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan		Indeks Inovasi Daerah	
			Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	● Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd ● Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengukuran IRB PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Nilai Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi		Indeks Sistem Merit	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Program Kepegawaian Daerah

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD PENGAMPU
1	Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi	* Penciptaan Lapangan Kerja * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dispusipda
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinkes
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Disnaker
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
2	Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpoPP dan Damkar
			Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD PENGAMPU
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DalduKBPPPA
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DalduKBPPPA
			Program Pemenuhan Hak Anak	DalduKBPPPA
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
3	Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja	* Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar
			Program Pengembangan UMKM	Diskumindag
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKP3
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTSP
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
4	Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan	Penataan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dishub
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
			Program Pengembangan Permukiman	DPUTR

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD PENGAMPU
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUTR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpolppdamkar
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
	Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	*Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
			Program Pengelolaan Arsip	Dispusipda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Setda
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Setda
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

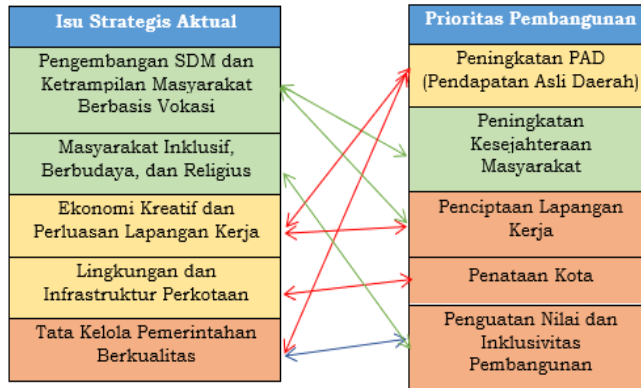
ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD PENGAMPU
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2026.

Apabila kita gambarkan lebih detail, maka keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.17
Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi (diolah)

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan, maka ketiganya harus bisa disandingkan dan bisa terlihat jelas arah kebijakan mana yang menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan tersebut. Berikutnya dalam proses implementasi prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan bisa sesuai dengan harapan awal ketika proses penyusunan perencanaan disusun dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan hubungan antara prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan dengan 36 (tiga puluh enam) arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.16

Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Priotas dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	* Penciptaan Lapangan Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat pelatihan dengan memastikan kondisi yang memadai dan akses yang mudah
	* Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	* Melengkapi sarana prasarana perpustakaan, termasuk perpustakaan digital

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
			* Bekerjasama dengan institusi pendidikan, kemasyarakatan dan pemerintahan untuk meningkatkan angka kunjungan perpustakaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	* Membangun, memperbaiki, atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan yang baik dan mampu menangani kebutuhan kesehatan masyarakat * Memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dengan standar pelayanan prima * Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, vaksinasi, dan pencegahan penyakit * Mengadakan program kesehatan gratis dan memberikan bantuan untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan asuransi kesehatan daerah yang inklusif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	* Menyelenggarakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, dan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat * Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru * Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan melalui forum kesehatan dan konsultasi publik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	* Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan untuk memungkinkan lebih banyak warga kota mengikuti program vokasi * Menyediakan berbagai program sosial untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan layanan kesehatan sosial * Menyediakan bantuan sosial langsung untuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran *Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja *Meningkatkan fasilitas pelatihan vokasi, seperti pusat pelatihan dan laboratorium, serta menyediakan peralatan yang diperlukan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	* Menjalin kemitraan dengan perusahaan dan industri lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan merancang program pelatihan yang relevan * Menyediakan kesempatan magang dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mempermudah transisi ke dunia kerja * Menyediakan layanan konseling karir dan bimbingan untuk membantu individu memilih jalur vokasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat
2	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	* Membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan * Mendukung penyelenggaraan acara dan perayaan keagamaan serta memperkuat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
			kerja sama antar umat beragama * Menyediakan dan mendukung program pendidikan agama di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk pelatihan bagi pendidik agama
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	* Menciptakan forum untuk dialog antar umat beragama guna meningkatkan saling pengertian dan toleransi antar kelompok agama yang berbeda * Mendorong kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk membangun rasa kebersamaan dan toleransi
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	* Menggunakan media sosial, poster, dan materi kampanye untuk menyebarluaskan pesan-pesan tentang persatuan dan toleransi * Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program yang mempengaruhi kehidupan mereka, memastikan bahwa suara semua kelompok terdengar * Membentuk jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk memastikan koordinasi yang baik dalam upaya mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
		Program Pengembangan Kebudayaan	* Melindungi dan melestarikan warisan budaya lokal, seperti situs bersejarah, tradisi, dan seni, melalui program pemeliharaan dan restorasi * Menyelenggarakan festival, pameran, dan acara budaya yang merayakan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal * Mengintegrasikan pendidikan tentang budaya lokal dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran dan apresiasi sejak dini * Membangun kerja sama dengan organisasi budaya, komunitas seni, dan lembaga pendidikan untuk

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
			menyelenggarakan acara dan program budaya
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	* Menyediakan layanan penyuluhan dan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi masalah sosial, seperti kekerasan domestik, penyalahgunaan narkoba, dan masalah kesehatan mental * Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial, seperti kekerasan domestik atau ketergantungan narkoba
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	* Mengembangkan kebijakan yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas
		Program Pemenuhan Hak Anak	* Menyediakan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	* Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan * Meningkatkan kualitas SDM Kepemudaan melalui pelatihan dan pendampingan
3	* Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	* Mendirikan atau mendukung pusat kreatif dan inkubator yang menyediakan ruang, peralatan, dan sumber daya untuk para pelaku ekonomi kreatif, seperti seniman, desainer, dan pengusaha kreatif * Menyediakan ruang usaha yang terjangkau dan strategis untuk bisnis kreatif, termasuk studio seni, galeri, dan ruang kerja bersama * Menyediakan akses ke pembiayaan, hibah, dan pinjaman dengan syarat yang fleksibel untuk mendukung start-up dan usaha kecil dalam sektor kreatif * Menerapkan program insentif untuk mendorong investasi dan pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
			* Menyediakan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam bidang seperti desain grafis, multimedia, seni, dan pemasaran digital
		Program Pengembangan UMKM	* Memberikan bantuan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	* Menyediakan dan mengembangkan destinasi pariwisata * Melakukan promosi kepariwisataan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	* Memastikan stok ketersediaan pangan aman untuk menjamin kebutuhan masyarakat
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	* Memastikan pangan yang di konsumsi masyarakat aman dan sehat
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	* Menciptakan iklim yang kondusif agar bisa mendatangkan investor * Memudahkan alur investasi * Pelayanan publik satu pintu
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	* Melakukan normalisasi Pajak, Retribusi, BUMD dan BLUD * Melakukan digitalisasi pendapatan
4	Penataan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	* Mengatur rute kendaraan umum * Meminimalisir kemacetan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	* Memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat
		Program Pengembangan Permukiman	* Menyediakan pemukiman yang nyaman dan bersih
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	* Menyediakan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai standar * Menyediakan ruang publik dan fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk beraktivitas dan berkumpul secara aman dan nyaman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah
		Program Pengelolaan Persampahan	* Melakukan kampanye pengelolaan sampah * Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah * Menyelenggarakan program untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah
		Program Penanggulangan Bencana	* Menyediakan sarana prasarana penanggulangan bencana * Meningkatkan kualitas SDM kebencanaan
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	* Menyediakan sarana prasarana penanggulangan kebakaran * Meningkatkan kualitas SDM kebakaran
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	* Melakukan pengawasan lingkungan sesuai standar * Menyelenggarakan program untuk

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Kerusakan Lingkungan Hidup	menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam
	*Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) * Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Aplikasi Informatika	* Melakukan penguatan digitalisasi pemerintahan
		Program Pengelolaan Arsip	* Menyediakan arsip yang aman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	* Melakukan pengukuran, dan evaluasi pelayanan publik
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	* Melakukan penyusunan regulasi yang pro kepada masyarakat
		Program Perekonomian dan Pembangunan	* Memastikan digitalisasi pengadaan barang dan jasa
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	* Melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi dalam pemanfaatan data kependudukan yang aman
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan publik
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	* Meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal dalam memberikan masukan atas proses perencanaan * Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan * Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi melalui pemanfaatan platform digital
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	* Pemanfaatan secara maksimal SIPD * Melakukan pelatihan kepada para pengelola keuangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	* Melakukan sosialisasi atas kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan * Peningkatan dan penguatan peran APIP
		Program Kepegawaian Daerah	* Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional lainnya * Menyediakan sistem insentif dan penghargaan untuk memotivasi pegawai dan mendorong kinerja yang baik

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dan terarah, maka telah ditetapkan tema pembangunan untuk setiap tahunnya. Tema tersebut tentunya harus bisa sinergi dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan agar dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan saran masukan dari berbagai pihak terutama dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saran masukan dari DPRD berupa pokir senantiasa disampaikan kepada Pemerintah daerah melalui Bappeda setiap satu minggu sebelum dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kota. Saran masukan tersebut tentunya harus seiring dengan isu strategis dan program prioritas daerah yang sudah ditetapkan dalam RPD. Keterkaitan tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.
		Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.
		Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara <i>online</i> .
		Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
		Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.
		Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku.
		Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku.
		Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.
		Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).
		Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.
		Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.
		Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.
		Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
3	Penciptaan Lapangan Kerja	Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan.
		Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU);
		Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan kepada Masyarakat.
		Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.
		Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi.
		Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.
		Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.
		Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.
		Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi.
		Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan.
		Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.
		Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi <i>Great sale</i> .
		Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri
		Pengembangan SDM dan profesionalismer pariwisata.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
		Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.
		Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
		Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha- usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.
4	Penataan Kota	Untuk segera membuat <i>Master plan Drainase</i> sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.
		Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.
		Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.
		Tersedianya sarana dan prasarana yang representative.
		Meningkatan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi.
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegah banjir;
		Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;
		Pendataan RTLH serta penaggulangan nya.
		Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.
		Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.
5	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.
		Meningkatkan kerukunan hidup beragama.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
		Meningkatkan peran lembaga/ <i>stake holders</i> dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.
		Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

Pembangunan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program unggulan atau janji tahunan kepala daerah yang keseluruhannya dalam rangka mengimplementasikan 5 (lima) prioritas pembangunan Tahun 2026 yang pada akhirnya dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029.

Selanjutnya akan digambarkan program pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 pada setiap misi, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program unggulan atau janji tahunan kepala daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2029.

Tabel 4.18

Keterkaitan Misi, Program Unggulan, Program Prioritas dan Prioritas
Pembangunan Tahun 2026

MISI	PROGRAM UNGGULAN KDH		PROGRAM PEMBANGUNAN	PD PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS PEMBANGU NAN
Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	Beasiswa Sarjana (Berbasis Kewilayahan dan Disabilitas)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	2	Pendidikan Vokasi melalui Optimalisasi BLK	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Penciptaan Lapangan Kerja
	3	Peningkatan Puskesmas (Layanan Puskesmas Gratis, Homecare, Ambulance)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	4	Posyandu Ayeuna (Operasional Posyandu)	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Misi 2: Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, Budaya dan Memperkuat Toleransi, Ketenteraman serta Kertertiban Umum	5	Sukabumi Kota Wakaf	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	6	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Insentif Marbot, Guru Ngaji, RW, RT, Linmas, Karang Taruna)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	7	Pusat Konseling Keluarga Ayeuna (Ponsel Ayeuna) (Konseling Ibu, Ayah, Anak, Remaja)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas DaldukKBPPPA	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan
	8	Pemuda Berdaya (optimalisasi peran dan anggaran kepemudaan)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

MISI	PROGRAM UNGGULAN KDH		PROGRAM PEMBANGUNAN	PD PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	9	Menata Kebaikan Tech	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar	Penciptaan Lapangan Kerja
	10	Dana Bergulir (Dana Abadi)	Program Pengembangan UMKM	Diskumindag	Penciptaan Lapangan Kerja
Misi 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Publik	11	Infrastruktur Ayeuna (Stadion Bertaraf Nasional dan Infrastruktur Publik lainnya)	Program penataan bangunan dan lingkungannya	DPUTR	Penataan Kota
	12	Layanan Ambulans Jenazah	Program kawasan permukiman	DPUTR	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Misi 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas	13	Sukabumi Menyala (Layanan Publik Terintegrasi)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	14	NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

Secara rinci program unggulan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

1. Beasiswa Sarjana (Berbasis Kewilayahan dan Disabilitas)

Program unggulan pemberian beasiswa sarjana merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat Kota Sukabumi yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana, namun memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi. Penentuan penerima beasiswa akan diatur dengan mekanisme yang sederhana, tepat sasaran dan selektif dengan melibatkan berbagai pihak untuk prosesnya. Pemberian beasiswa dilakukan untuk dua kategori yaitu:

a. Berbasis Kewilayahan

Penerima beasiswa akan diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan unsur keadilan dari sisi asal wilayah penerima. Dalam implementasinya akan melibatkan pihak yang berwenang serta aparaturnya yang sangat memahami kondisi lapangan.

b. Kategori Disabilitas

Pemberian beasiswa untuk disabilitas adalah sangat penting untuk membantu individu disabilitas mencapai cita-cita mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Beasiswa ini bukan hanya sekedar bantuan keuangan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap hak-hak individu disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang lain. Dalam implementasinya, pemberian beasiswa ini akan melibatkan pihak terkait yang berwenang seperti: *Disabilitas Group Planner*, Institusi pendidikan luar biasa serta komunitas atau organisasi yang perhatian terhadap sahabat disabilitas. Hal tersebut untuk lebih memastikan bahwa pemberian beasiswa dapat tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat disabilitas.

2. Pendidikan Vokasi melalui Optimalisasi BLK

Program unggulan optimalisasi BLK ini akan dilakukan melalui beberapa cara, seperti meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung, meningkatkan kualitas program pelatihan, memperbarui kurikulum, dan meningkatkan kualitas instruktur.

Selain itu, BLK juga dapat bekerja sama dengan industri untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dengan optimalisasi BLK, pendidikan vokasi dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja yang semakin ketat.

Selain itu, optimalisasi BLK juga dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka

panjang, optimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonominya dan menjadi lebih mandiri.

3. Peningkatan Puskesmas (Layanan Puskesmas Gratis, *Homecare*, *Ambulance*)

Program unggulan peningkatan Puskesmas hadir untuk terus memastikan pentingnya keberadaan Puskesmas serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Kondisi saat ini, masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, maka ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memerlukan pembiayaan.

Ke depan, pemerintah harus hadir dalam memastikan warga Kota Sukabumi dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa biaya walaupun belum memiliki jaminan kesehatan, dengan catatan masyarakat tersebut dijadikan prioritas untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sukabumi.

Selain itu melalui program unggulan ini pemerintah daerah juga harus bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat di akses oleh masyarakat yang punya keterbatasan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan *home care* serta *ambulance*.

Melalui program ini petugas kesehatan akan hadir langsung ke setiap rumah masyarakat yang membutuhkan serta apabila memerlukan rujukan dapat langsung difasilitasi oleh pelayanan *Ambulance*.

4. Posyandu Ayeuna (Operasional Posyandu)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama ibu dan anak. Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penanganan penyakit ringan. Namun, untuk menjalankan operasional posyandu, diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran operasional posyandu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti

pembelian obat-obatan, peralatan kesehatan, dan biaya operasional lainnya.

Pemberian anggaran operasional posyandu sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, anggaran operasional posyandu memungkinkan posyandu untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kedua, pemberian anggaran operasional posyandu juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Ketiga, pemberian anggaran operasional posyandu juga dapat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit. Dengan adanya posyandu yang berfungsi dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan memperoleh penanganan yang tepat untuk berbagai penyakit.

B. Misi 2: Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, Budaya dan Memperkuat Toleransi, Ketenteraman serta Ketertiban Umum

1. Sukabumi Kota Wakaf

Wakaf adalah salah satu konsep dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Wakaf dapat berupa harta benda, uang, atau aset lainnya yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

Program unggulan yaitu “Sukabumi Kota Wakaf”. Kota wakaf adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam rangka menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, maka pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai langkah dalam menuju cita-cita tersebut. Salah satu yang akan dilakukan adalah melalui program Gerakan Wakaf Uang, dimana seluruh lapisan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara dan dunia usaha dihimbau untuk melakukan wakaf uang secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Gerakan wakaf uang inilah yang nanti akan menjadi salah satu prasyarat utama dalam menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf.

Pengelolaan wakaf uang nantinya akan dilakukan oleh sebuah lembaga Nazhir Wakaf yang kredibel yang direkomendasikan oleh lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya pemerintah daerah akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat terutama para aparatur untuk mengikuti gerakan wakaf uang ini yang selanjutnya Nazhir Wakaf akan melakukan pengelolaan yang pada akhirnya hasil dari pengelolaan tersebut akan kembali kepada masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Insentif Marbot, Guru Ngaji, RW, RT, Linmas, Karang Taruna)

Pembangunan di Kota Sukabumi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peranan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena mereka adalah subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Dengan peranan masyarakat, pembangunan di Kota Sukabumi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam bentuk ide, sumber daya, dan tenaga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat tersebut, maka diluncurkan sebuah program unggulan untuk memberikan apresiasi dan penguatan akan peran masyarakat dalam pembangunan.

Implementasinya adalah pemberian insentif kepada para RT, RW, Marbot/Pengurus Masjid, Guru Ngaji, Linmas serta Karang Taruna yang selama ini senantiasa aktif memberikan sumbangsih kepada keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi.

Pemberian insentif ini dilakukan setiap bulan, dengan catatan unsur masyarakat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah sesuai bidangnya dan berdasarkan arahan atau ketentuan yang akan disampaikan dalam sebuah regulasi khusus. Sebagai salah satu contoh adalah keterlibatan para RT dan RW dalam mendukung program strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi.

3. Pusat Konseling Keluarga Ayeuna (Ponsel Ayeuna) (Konseling Ibu, Ayah, Anak, Remaja)

Pusat Konseling Keluarga Ayeuna merupakan sebuah program unggulan yang memfokuskan pada ketahanan keluarga dengan memberikan konsultasi gratis serta solusi-solusi bagi permasalahan keluarga untuk penduduk Kota Sukabumi. Melalui Pusat Konseling Keluarga Ayeuna, diharapkan dapat berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Melalui program ini akan didapatkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, menyediakan layanan konseling yang profesional dan terintegrasi untuk membantu keluarga mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kedua, menyediakan informasi dan edukasi tentang cara mengelola konflik dan masalah keluarga. Ketiga, membantu keluarga mengembangkan kemampuan dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

Keberadaan pusat konseling keluarga ayeuna ini diharapkan memiliki dampak positif pada masyarakat. Dengan adanya pusat konseling keluarga ayeuna, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan konseling dan penanganan masalah keluarga. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan gangguan mental. Selain itu, keberadaan pusat konseling keluarga juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.

4. Pemuda Berdaya (optimalisasi peran dan anggaran kepemudaan)

Di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks, peran pemuda menjadi sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan mewarisi tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan negara di masa depan. Pemuda memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam proses pembangunan. Program unggulan pemuda berdaya sangat relevan untuk mendukung peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. Melalui program ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada para pemuda di semua sektor untuk dapat berperan lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Melalui program unggulan ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada pemuda seperti dalam hal menyusun sendiri perencanaan pembangunan versi pemuda yang fokus kepada peningkatan peran dan kualitas pemuda itu sendiri, selain itu peningkatan kualitas dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor-sektor strategis bidang kepemudaan juga akan semakin diperhatikan. Dalam implementasinya akan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang menampung para pemuda di dalamnya.

Selanjutnya ke depannya diharapkan peran pemuda dalam pembangunan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan Kota Sukabumi, serta dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memajukan ekonomi, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

C. Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

1. Menata Kebaikan *Tech*

Dalam era digital saat ini, mempromosikan produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada platform digital merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan pasar. Untuk itulah maka program menata kebaikan *tech* hadir yang merupakan sebuah platform promosi gratis berbasis digital yang dilakukan melalui pembuatan *vlog reality*, *podcast* dan lainnya.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dan di seleksi secara profesional yang berisikan kreator digital dan profesional lainnya sesuai bidang keahliannya, dengan tujuan untuk mempromosikan UKM, UMKM, pariwisata serta program unggulan dan kreatif yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Melalui program ini masyarakat atau komunitas yang mempunyai produk unggulan dan memerlukan pemasaran lebih jauh dapat dibantu untuk lebih diperkenalkan kepada masyarakat luas baik Kota Sukabumi maupun di luar Kota Sukabumi.

Selain itu program-program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta program-program prioritas lainnya di setiap Perangkat daerah ataupun dari lembaga lain dapat juga diperkenalkan melalui program

ini, sehingga dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan pada akhirnya akan lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat dari berbagai program tersebut.

2. Dana Bergulir (Dana Abadi)

Merupakan sebuah program yang menyiapkan dana untuk modal usaha masyarakat yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau lembaga lain yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan, yang disediakan di setiap Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kota Sukabumi.

Dana yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 10 juta per RT yang nantinya akan di fokuskan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dengan adanya pembatasan jumlah pinjaman. Selanjutnya dana ini akan dikembalikan secara bertahap dan tidak memberatkan dari masyarakat yang melakukan pinjaman kepada kelompok swadaya masyarakat atau lembaga lain yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan yang ditunjuk sebagai pengelola.

Dengan demikian dana ini akan tetap ada atau kembali utuh seperti semula yang selanjutnya dapat dijadikan modal bergulir kembali oleh masyarakat yang lainnya. Dalam lima tahun program ini berjalan, sangat memungkinkan jumlah pinjaman ke depannya akan bisa menjadi lebih banyak dari pinjaman awal yang diberikan.

Melalui program unggulan ini diharapkan akan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki potensi untuk menjadi wirausaha. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memperoleh akses ke modal usaha yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

D. Misi 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Publik

1. Infrastruktur Ayeuna (Stadion Bertaraf Nasional dan Infrastruktur Publik lainnya)

Pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Infrastruktur utama yang harus jadi

prioritas adalah yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan publik. Salah satunya adalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan olahraga masyarakat.

Namun demikian kondisi hari fasilitas olahraga yang memadai dan memenuhi standar nasional masih sangat terbatas. Salah satunya adalah Stadion yang merupakan sebuah ikon dari pusat kegiatan olahraga di suatu wilayah. Oleh karena itu, maka pembangunan sebuah stadion olahraga berstandar nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perkembangan dunia olahraga, serta mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di Kota Sukabumi.

Program unggulan Infrastruktur Ayeuna melalui implementasi pembangunan stadion olahraga berstandar nasional bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya pembiayaan program infrastruktur ini akan menggunakan berbagai pendekatan pembiayaan mulai dari PAD, dana transfer, investor, CSR serta dari berbagai sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari pemerintah, swasta, serta masyarakat, Sukabumi dapat memiliki stadion yang menjadi kebanggaan bersama dan memberikan manfaat besar bagi semua pihak.

2. Layanan Ambulans Jenazah

Program unggulan Layanan Ambulans Jenazah hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini masyarakat bisa mengakses layanan ambulans tanpa biaya dengan hanya menyampaikan permohonan kepada lembaga yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaannya.

Program unggulan layanan ambulans jenazah bukan sekadar kendaraan pengangkut, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir bagi seseorang yang telah berpulang. Dengan adanya layanan ini, jenazah dapat dipindahkan dengan cepat dan dalam kondisi yang terjaga. Selain itu, layanan ini sangat membantu keluarga yang mungkin tidak

memiliki akses kendaraan yang memadai untuk membawa jenazah. Terlebih lagi, dalam kasus tertentu seperti kecelakaan, pemulangan jenazah dari luar kota, atau kondisi medis tertentu, ambulans jenazah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.

E. Misi 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas

1. Sukabumi Menyala (Layanan Publik Terintegrasi)

Di era digital saat ini, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Namun, sering kali layanan publik tersebar di berbagai platform, masing-masing dengan sistem dan prosedur yang berbeda. Menyatukan semua layanan publik dalam satu portal yang terintegrasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses semua layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat, tanpa harus mengunjungi beberapa tempat yang berbeda.

Program unggulan Sukabumi Menyala difokuskan pada integrasi pelayanan publik yang ada di Kota Sukabumi sehingga terciptanya beberapa manfaat yaitu kemudahan akses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung transformasi digital nasional.

2. NGOPI (*Ngobrol Happy* bareng Wali Kota)

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk selanjutnya bekerja melaksanakan janji politik yang sudah disampaikan. Setelah dilantik maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi milik masyarakat dan bertugas untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus mendengar secara langsung masukan, pendapat, keluhan dan permasalahan langsung dari masyarakat sehingga program kerja yang dilaksanakannya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam mengakomodir kebutuhan tersebut, maka program unggulan NGOPI (*Ngobrol Happy* bareng Wali Kota dan Wakil Wali Kota) hadir sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dengan pemimpinnya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbasis kewilayahan serta juga dapat dilakukan dengan berbasiskan tematik tertentu.

Dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang telah ditentukan, maka harus dilakukan mapping dengan program pembangunan yang dilaksanakannya serta dikaitkan dengan sasaran, indikator serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Kesesuaian sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pagu anggaran pada perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada
Prioritas Pembangunan 1 “Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)”

[illegible]

Tabel 4.20

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada
Prioritas Pembangunan 2 “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	RLS dan HLS			Perluasan akses pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat pelatihan dengan memastikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Persen	100	14,721,807,000	Disdikbud

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get 202 6	Penah apan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							kondisi yang memadai dan akses yang mudah		dasar (APS) 2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berparti sipasi dalam pendidi kan (APS)				

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get 202 6	Penah apan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									3. Jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang berparti sipasi dalam pendidi kan kesetara an (APS)				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup			Perluasan akses pendidikan dan kesehatan	* Membangun, memperbaiki, atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase kualitas kesehatan lingkungan 3. Persentase	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1) 5,5 2) 5 3) 19 4) 45 5) 97 6) 22 7) 90 8) 45	49,685,477,598	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Pagu Anggaran	Peran gkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan yang baik dan		se Penduduk meneruskan Perilaku Hidup Sehat 4. Persentase peningkatan Succes rate TB 5.	6. persen 7. persen 8. persen 9. persen 10. persen 11.	9) 67 10) 15 11) 99 12) 80 13) 68 14) 87		

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get 202 6	Penaha pan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							mampu menanga ni kebutuha n kesehata n masyarak at * Memastik an bahwa fasilitas kesehata n tersedia dan		Cakupa n Imunisa si Rutin Lengkap 6. Persenta se pengend alian penyakit tidak menular 7. Persenta se	pers en 12. pers en 13. pers en 14. ang ka			

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Pagu Anggaran	Peran gkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dengan standar pelayanan prima *		pengendalian penyakit menular 8. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 9. Persentase				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							uh, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi , vaksinasi , dan pencegahan penyakit * Mengadakan program kesehata		se Kepatuhan pelaporan pengukuran INM IKP 10. Persentase se peningkatan kualitas sarana fasilitas				

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Pagu Anggaran	Peran gkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							n gratis dan memberikan bantuan untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan asuransi		kesehatan milik pemerintah daerah 11. Persentase kepesertaan terdaftar penduduk yang mendapatkan				

N o	Prioritas Pemban gunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Penah apan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							kesehata n daerah yang inklusif		Jamina n Kesehat an Nasional 12. Persenta se kepesert aan aktif pendud uk yang mendap atkan Jamina				

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get 202 6	Penah apan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									n Kesehat an Nasional 13. Persenta se pemenu han perbekal an kesehat an pada fasilitas pelayan an				

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									kesehatan 14. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Teknis Kesehatan				

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get 202 6	Penaha pan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	persen	75	5,146,675,000	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Penahapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase angka kemiskinan			Perluasan akses pendidikan dan kesehatan	* Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Angka Gradiasi Kemiskinan	Angka	1.84	458,536,450	Dinso

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Peran gkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan untuk memungkinkan lebih banyak warga kota mengikuti program vokasi * Menyediakan berbagai program						

N o	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Peran gkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							sosial untuk mendukung kelompok masyarakat at yang kurang mampu, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat						

N o	Prioritas Pemban gunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Penah apan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							at, dan layanan kesehata n sosial * Menyedia kan bantuan sosial langsung untuk keluarga miskin, lansia, dan penyanda						

N o	Prioritas Pemban gunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Penah apan	Arah Kebijaka n	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Tar get 202 6	Pagu Anggaran	Peran gkat Daera h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							ng disabilita s guna memenu hi kebutuha n dasar mereka						
Jumlah												70,012,4 96,048	

Tabel 4.21

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 4 “Penataan Kota”

N o	Priorita s Pemb angunan	Sasara n	Indikator Kinerja	Sat uan	Tar get 20 26	Penah apan	Arah Kebijakan	Program Pembang unan Daerah	Indikato r Kinerja	Sat uan	Target 2026	Pagu Anggara n	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Penata an Kota	Mening katnya kualita s infrastr uktur dan Lingku ngan Hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Pening katan akses masya rakat terhad ap infrast ruktur dasar	Mengemb angkan dan memperb aiki infrastruk tur publik seperti jalan, jembatan, taman,	Program Penyelen ggaraan Jalan	Tingkat Kemant apan Jalan Kota	Per sen	89.18	20,769, 662,773	DPU TR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan fasilitas umum untuk meningka tkan kualitas hidup						
							* Mengatur rute kendaraa n umum *	Program Penyelen ggaraan Lalu Lintas dan	persent ase layanan BRT	Per sen	100	2,447,3 47,600 65	Dish ub

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meminimalisir kemacetan	Angkutan Jalan					
							* Memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap	Per sen	16.900 39249	563,000 ,000	DPU TR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									p air minum melalui SPAM jaringan perpipa an dan bukan jaringan perpipa an terlindu ngi				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							* Menyediakan pemukiman yang nyaman dan bersih	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Per sen	16.336 66601	2,911,0 94,000	DPU TR

N o	Priorita s Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 20 26	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							* Menyediakan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai standar *	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Per sen	74.725 27473	3,296,7 60,468	DPU TR

N o	Priorita s Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk beraktivitas dan berkumpul secara						

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							aman dan nyaman						
							Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman	Per sen	1) 59.3 2) 66.4	2,640,000,000	DPU TR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							pengelolaan sampah		man Rawan Banjir 2. Persentase Luas Layanan Daerah Irigasi				
							* Melakukan	Program Pengelolaan	Indeks Kinerja Pengelolaan	persen	80,46	3,151,741,510	DLH

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngka t Daer ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							kampanye pengelolaan sampah * Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi,	Persampahan	aan Sampah				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan pengelolaan sampah *						
							Menyelenggarakan program untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan						

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							n, termasuk penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam						

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Penetapan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah												37,065, 676,248	

Sumber: Analiss Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2025

Tabel 4.22

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 5 “Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan”

4.2.6 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2026

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kota Sukabumi harus saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, dan isu strategis Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.23

Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Sukabumi
Tahun 2026

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional/Provinsi	Isu Strategis Aktual Kota Sukabumi
Aging population	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi
		Masyarakat inklusif, berbudaya dan religius
Dampak hilirisasi	Green and blue economy serta pembangunan inklusif	Ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja
* Penerapan standar sustainability * Transisi energi	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Lingkungan dan infrastruktur perkotaan
	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	
	Keberlanjutan penataan ruang	
Sinkronisasi kebijakan makro-sektoral	Kualitas tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan berkualitas

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

Selain isu strategis, maka prioritas pembangunan juga harus senantiasa sinergis dan selaras untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang dilakukan Kota Sukabumi selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sehingga terjadi kolaborasi pembangunan di setiap wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 4.24

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Langkah Katilu yaitu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Langkah Kedua yaitu Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	Penataan Kota	* Langkah Kahiji yaitu Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan * Langkah Katujuh yaitu

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
	Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat * Langkah Kadalapan yaitu Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	* Langkah Katilu yaitu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru * Langkah Kalima yaitu Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus * Langkah Kagenep yaitu Penanganan Stunting dan Gizi Buruk
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penciptaan Lapangan Kerja	Langkah Kaopat yaitu Pengembangan Lapangan Kerja Baru

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Langkah Kasalapan yaitu Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Langkah Katilu yaitu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	Langkah Katilu yaitu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Sukabumi dengan sasaran RKPd Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.25

Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas RKPd Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2026

Sasaran RKPd Provinsi Tahun 2026		Sasaran RKPd Kota Sukabumi Tahun 2026	
S1.1	Meningkatnya derajat kesehatan individu	S1.2	Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas
S1.2	Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya	S2.3	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya
		S2.1	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran
S1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	S2.2	Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tenram dan Tertib
S1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	S1.1	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata
S1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	S5.3	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan
S2.1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	S3.1	Meningkatnya ekonomi kreatif kota
		S3.5	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan
S2.2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan	S3.3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota

Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2026		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026	
	Perikanan untuk Swasembada Pangan		
S2.3	Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	S3.1	Meningkatnya ekonomi kreatif kota
		S3.4	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru
S2.4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	S3.2	Berkembangnya industri pariwisata MICE (<i>Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions</i>)
S3.1	Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	S1.4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota
S3.2	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja		
S3.3	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	S3.3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota
S4.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	S4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup kota
		S4.2	Meningkatnya Resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim
S4.2	Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan	S3.1	Meningkatnya ekonomi kreatif kota

Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2026		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026	
	Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil		
S4.3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	S1.3	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota
		S2.4	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif
S5.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	S5.3	Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan
S5.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	S5.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital
		S5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota
S6.1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	S5.4	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel
		S5.5	Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2026 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4.26

Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 20256 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	
- Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. - Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. - Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. - Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. - Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
- Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. - Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. - Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. - Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. - Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. - Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 7. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global • Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	
• Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. - Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. - Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	
Tujuan 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak	
- Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua - Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. - Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. - Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. - Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
- Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. - Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. - Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. - Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. - Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. - Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	
• Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. • Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
- Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. - Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. - Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. - Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	
- Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. - Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	
• Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. • Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. • Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	
Tujuan 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
• Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
• Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. • Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27

Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2026

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA			
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	BPBD
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	BPBD
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	-	Diskominfo
	Pelayanan Informasi Publik	19,620,000	Diskominfo
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	21,688,000	Diskominfo
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	227,620,000	Diskominfo

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32,242,000	Kesbangpol
PN 2:Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	DKP3
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	135,474,000	DKP3
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	DKP3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	75,000,000	DKP3
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		DKP3

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	42,455,000	DKP3
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	130,000,000	DPUTR
	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	75,000,000	DPUTR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	104,544,050	Diskominfo
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	DLH
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	-	DLH
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Disporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanusiaan Kebudayaan	97,889,000	Disdikbud

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	-	Diskumindag
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	6,663,900,000	Diskumindag
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	310,000,000	Diskumindag
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	54,100,000	Diskumindag
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20,000,000	Disdikbud
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4,760,839,000	Disdikbud

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	45,000,000	Disdikbud
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Disdikbud
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	801,720,000	Disdikbud
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	8,324,700	Dinsos
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6,011,000	Dinsos
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	200,000,000	Disporapar
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	60,749,950	Disporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Seleksi Atlet Daerah		Disporapar
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	57,208,500	Disporapar

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	689,352,500	Disporapar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Dinkes
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	Dinkes
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21,455,351,308	Dinkes
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50,000,000	Dinkes
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	DKP3
	Pengembangan Rumah Sakit	400,000,000	DKP3
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50,000,000	Dinkes
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4,150,538,290	Dinkes
	Pengembangan Rumah Sakit	400,000,000	Dinkes
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Dinkes

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	26,500,000	Disnaker
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	Disnaker
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DP2KBP3A
	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DP2KBP3A
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DP2KBP3A
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	DP2KBP3A
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT		Disdukcapil

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		Disdukcapil
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		DP2KBP3A
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	-	DP2KBP3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	DP2KBP3A
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	-	DP2KBP3A
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dispusipda
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DPUTR

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
			DPUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	390,000,000	DPUTR
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	189,000,000	DPUTR
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200,000,000	DPUTR
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	366,705,000	Dishub
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	62,914,950	Dishub
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15,000,000	DPMPTSP
	Pengawasan Penanaman Modal	15,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	Diskumindag
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100,000,000	Diskumindag

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	711,000,000	Dinsos
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	386,150,000	Dinsos
Program Pengembangan UMKM		350,000,000	Diskumindag
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4,333,956,000	Diskumindag
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50,000,000	DPUTR
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		DPUTR
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	2,196,136,000	DPUTR

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	470,040,000	DPUTR
Program Penyelenggaraan Pengawasan		600,469,000	Inspektorat
Program Kepegawaian Daerah		652,000,000	BKPSDM
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	35,150,000	Diskominfo
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	15,930,000	Diskominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	Diskominfo
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	-	Diskominfo
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	-	Diskominfo
	Penyediaan Akses Internet	-	Diskominfo
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	39,910,000	Diskominfo

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	467,465,000	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	473,965,000	Kesbangpol
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	441,949,000	Satpol PP / Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	Satpol PP / Damkar
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32,242,000	Kesbangpol
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan sampah melalui pengangkutan	475,000,000	DLH

PROGRAM	SUB KEGIATAN	2026	PD
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		DLH
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	DLH
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-	DLH
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	Dispusipda
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	14,000,000	Dispusipda
PROYEK STRATEGIS NASIONAL			
Program Pengawasan Keamanan Pangan		6,749,400	DKP3
Program Pengelolaan Pendidikan		4,721,807,000	Disdikbud
Program Pengelolaan Pendidikan		14,721,807,000	Disdikbud
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		35,119,889,598	Dinkes

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

4.2.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Pada dasarnya tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan penataan ruang Daerah yang produktif, aman, nyaman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada bidang Pendidikan, Kesehatan, pariwisata, perdagangan dan jasa.

4.2.7.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal;
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi; dan
3. peningkatan kualitas

Pusat-pusat Pelayanan yang direncanakan di Daerah meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Pusat pelayanan Daerah ditetapkan di 2 lokasi yaitu pusat kota di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibeureum. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan. Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2042 adalah Pusat Pelayanan Pusat Kota Cikole dan Cibeureum. Pusat Pelayanan Pusat Kota melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Utara, sedangkan Pusat pelayanan Babakan melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Selatan;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Sub pusat pelayanan kota terdiri 5 (lima) sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan yaitu:
 - a. SPPK di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. SPPK di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang;
 - c. SPPK di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong;
 - d. SPPK di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros; dan
 - e. SPPK di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu.

3. Pusat Lingkungan (PL), merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

4.2.7.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan Wilayah utara kota;
2. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
4. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2.7.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan strategis sosial budaya; dan
3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan ini terdiri atas 3 (tiga) kawasan yaitu:

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan Kawasan agrowisata dan Kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
 - b) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah; dan
 - c) memberikan Insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan Kawasan strategis ekonomi.

- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan Kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
 - b) mengembangkan Kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk:
 - a) mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cilandir dan hulu Sungai Cipeleng yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan
 - b) mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cilandir dan hulu Sungai Cipeleng.

Secara rinci kebijakan pembangunan kewilayahan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.28

Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Kota Sukabumi Tahun 2026

N o	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/P rogram Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
1	KSK I Pertumbuhan Ekonomi KSK II Sosial Budaya KSK III Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSK I Pertumbuhan Ekonomi : a. Kecamatan Cibeureum b. Baros c. Lembursitu	1. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan pada bidang	1. pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi a. menetapkan kawasan pusat kota dan kawasan selatan	Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek pertumbuhan ekonomi a. Penyusunan Rencana Tata Bangun

No	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
		d. Warudoyong KSK II Sosial Budaya a. Kecamatan Gunungpuyuh b. Kecamatan Warudoyong c. Kecamatan Citamising d. Kecamatan Cikole e. Kecamatan Cibeureum KSK III Fungsi dan Dukung	pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berskala regional; 2. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; 3. peningkatan kualitas dan jangka panjang pelayanan sistem	kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan b. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal serta mendorong masuknya investasi. 2. pengembangan Kawasan	nan dan Lingkungan (RTBL) Kecamatan Cibeureum (Kelurahan Babakan) dan Jl. Lingkar Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek social budaya a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

No	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
		Lingkungan Hidup : a. Kecamatan Gunungpuyuh b. Kecamatan Cikole c. Kecamatan Baros d. Kecamatan Lembursitu	prasarana kota.	Strategis sosial budaya a. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan b. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. pengembangan Kawasan	ngan (RTBL) Kawasam Pusat Kota Sukabumi (Kecamatan Cikole) dan Pusat Pemerintahan baru di Kecamatan ciboureum b. Penataan pedestrian dan jalur hijau, pembangunan fasilitas parkir

No	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
				Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cilandir dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan b. Mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai	bersama, dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Pusat Kota Sukabungur (Kecamatan Cikole) dan Pusat Pemerintahan baru di Kecamatan Cibeureum Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek fungsi

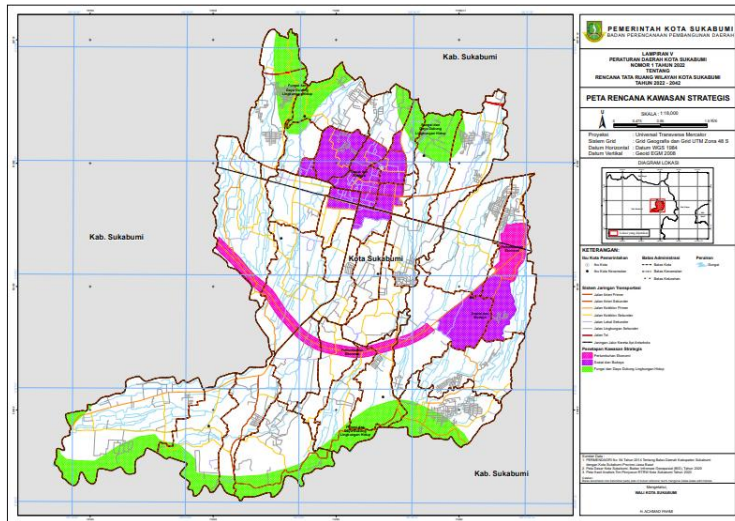
No	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
				Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang	dan daya dukung lingkungan hidup a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sungai Cipelang (Kecamatan Gunungpuyuh) dan Kawasan Cimanteri (Kelurahan Cikund

No	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
					ul dan Situme kar)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda

Berdasarkan rencana pengembangan diatas, maka penetapan kawasan strategis kota tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.18
Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber : PERDA RTRW Kota Sukabumi

4.2.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain program prioritas dan program unggulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Secara definisi pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sedangkan Standar Pelayanan Minimal adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan pada BAB II, masih ditemukan SPM yang memang masih belum tercapai atau belum optimal dalam implementasinya dilapangan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal seperti adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana pendukung serta tentunya sumber daya manusia yang juga mengalami keterbatasan atau difokuskan pada hal lain yang sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pencapaian target SPM tahun 2026 perlu dilakukan berbagai strategi agar SPM ini bisa terlaksana dengan baik bahkan bisa mencapai target secara keseluruhan. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.29

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 s.d 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	100 %	100 %	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKB UD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI usia 7-15 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan Dasar	100 %	100 %	100 %	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKB UD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	100 %	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
SPM KESEHATAN							
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Presentase pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
		balita sesuai standar				perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
		kesehatan sesuai standar				Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100 %	100 %	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
17	Penyediaan pelayanan	Persentase rumah tangga yang memperoleh	100 %	100 %	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan	DPUTR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
	pengolahan air limbah domestik	layanan pengolahan air limbah domestik				an Sistem Penyediaan Air Limbah	
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/kabupaten	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100 %	100 %	100 %	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100 %	100 %	100 %	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Kamtramtib mas yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
21	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
22	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	Peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana;	BPBD
25	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	Program Penanggulangan Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
SPM SOSIAL							
26	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100 %	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100 %	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025	2026	2027		
28	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	Persentase lanjut usia terlanter diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100 %	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
29	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase tuna sosial terlanter diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100 %	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
30	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

4.3 Inovasi Daerah

Keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi. Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh berbagai inovasi dari segala bidang, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan tahunan daerah, dalam program pembangunan daerah serta proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kota Sukabumi. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Dengan di implementasikannya berbagai inovasi di Kota Sukabumi, maka hal tersebut sangat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sehingga mendukung pula capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dilakukan ternyata juga telah mendapat penilaian dari berbagai pihak baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi sehingga terdapat beberapa inovasi yang mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pula pendapatan yang akan diterima Kota Sukabumi dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk apresiasi kinerja daerah salah satunya melalui anggaran Dana Insentif Fiskal yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Pada Tahun 2024 dan awal 2025 terdapat beberapa penghargaan bagi Kota Sukabumi baik yang berupa inovasi ataupun bukan termasuk inovasi baik dari tingkat Provinsi, Nasional maupun tingkat Internasional. Penghargaan tersebut diantaranya adalah:

1. Penghargaan Kota Sangat Inovatif - IGA 2023
2. Penghargaan Kota Toleran 2023 - Setara Institut
3. Penghargaan Kota Sangat Inovatif - IGA 2024
4. Juara 2 penghargaan pembangunan daerah (PPD) tingkat Provinsi Jawa Barat
5. Kota terinovatif di Jawa Barat pada Musrebang Tingkat Provinsi Jawa Barat 2024
6. Peringkat II - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023 untuk Cluster Kota dg Kemampuan Keuangan "Rendah". (Kemendagri)
7. Terbaik 1 Tema 3 (Percepatan Penurunan Stunting, Inovasi PASTI PENTING) pada Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif TA 2024

8. Terbaik 3 Tema 6 (Kesiapsiagaan Bencana untuk Mewujudkan Jabar Resilience Culture Province, Inovasi KATA BABE) pada Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif TA 2024
9. Satu-satunya kab/kota di Jawa Barat yg lolos seleksi program DAK Terintegrasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)
10. Penghargaan Kota Toleran 2024 - Setara Institut

Selain inovasi di atas masih terdapat banyak jenis inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun unit kerja di bawahnya sebagaimana yang akan disampaikan pada tabel di bawah ini. Inovasi yang akan ditampilkan tersebut seluruhnya masih dilaksanakan atau berjalan sampai akhir Tahun 2025 ini, hal tersebut didapatkan dari hasil pemetaan dan kunjungan lapangan ke perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan inovasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah daerah sekaligus juga dalam mengumpulkan dokumen pendukung inovasi sebagai langkah dalam memenuhi persyaratan Inovasi Government Award (IGA).

Dalam tabel di bawah ini juga akan dilengkapi penjelasan atau deskripsi dari masing-masing inovasi yang dilakukan serta penambahan keterangan tertentu seperti apabila inovasi tersebut berbasis teknologi informasi. Hasil pendataan tersebut dilakukan pada Inovasi yang masih berjalan yang terbaru yaitu yang diinisiasi pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Secara rinci penjelasan tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.30

Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 – 2025

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
1	Puskesmas Sukakarya			
	1	UYAH BATUR (UPAYA MENGATASI HIPERTENSI DENGAN MINUM OBAT SECARA TERATUR)	Digital	pendidikan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
2		INDUKSI (INFORMASI EDUKASI MOM MASA KINI)	Digital	pendidikan
3		SITAMU (Sistem Pencatatan Imunisasi)	Digital	pendidikan
4		GOALS (GOOGLE SHEETS DAN ALUR BERKAS)	Digital	pendidikan
5		SEJIWA (SHARING EDUKASI DAN INFORMASI GIZI MELALUI WHATSAPP)	Digital	pendidikan
6		GERMAN (GIGI SEHAT LAHIRAN NYAMAN)	Digital	pendidikan
7		PENITI EMAS (PELAYANAN TERPADU SEPENUH HATI MENUJU MASYARAKAT SUKAKARYA SEHAT)	Non Digital	kesehatan
8		CAP LANG (CHAT WHATSAPP PENGINGAT JAM MASUK DAN PULANG)	Digital	pendidikan
9		Kapansih (Kartu Pantau Hipertesi)	Non Digital	pendidikan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
10		Sekejap (Skrining kesehatan jiwa dan nafza)	Non Digital	pendidikan
11		SIPINTAR (skrining penyakit tidak menular)	Digital	pendidikan
12		ELING (EDUKASI KELILING)	Non Digital	pendidikan
13		PELAN SAJA (PEDULI LANSIA SEHAT DAN SEJAHTERA)	Non Digital	pendidikan
14		CEK PEDE (CHECKLIST PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI)	Digital	pendidikan
15		SENSASI (Sweeping Sasaran Imunisasi)	Non Digital	pendidikan
16		CATANG TB (Cepat Tangani Tuberkulosis)	Non Digital	pendidikan
17		GEUBER (Gerakan Upaya Kesehatan Berhenti Merokok Pada Remaja)	Digital	pendidikan
18		BERSALIM (PELABELAN SARANA PEWADAHAN LIMBAH MEDIS)	Non Digital	pendidikan
19		PELAKU (Pelayanan prolanis berkualitas)	Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	20		Separang (Sweeping Hepatitis ke Jejaring)	Non Digital	pendidikan
	21		BANTAL KARYA (Bina Penyehat Tradisional Di Sukakarya)	Non Digital	pendidikan
	22		LATO-LATO (Pengendalian, Pengelolaan Obat Kadaluwarsa melalui Pelabelan, Pembukuan, dan Penataan Obat dengan Metode FIFO dan FEFO)	Non Digital	pendidikan
	23		PERISOP (Optimalisasi Penyimpanan Reagen Melalui Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur)	Non Digital	pendidikan
	24		KOLING (KONSELING PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN)	Non Digital	pendidikan
2		Puskesmas Cibeureumhilir			
	25		OKE DIGI (Optimalisasi Kesehatan Gigi melalui video digital)	Digital	kesehatan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
26		KOMUNITAS AYAM BERKOKOK (Komunikasi Interpersonal atau Konseling dalam Upaya Menuju Berhenti Kecanduan Rokok)	Non Digital	kesehatan
27		TUA BANGKA (SANTUN LANSIA BAHAGIA DENGAN KELOLA PENYAKIT)	Non Digital	kesehatan
28		MUSIKALISASI MELODI (Optimalisasi Layanan Konseling Sanitasi melalui Video Edukasi)	Digital	kesehatan
29		MUKBANG PENTING (MenU maKan gizi seimBANG PENcegah stunTING)	Non Digital	kesehatan
30		RESEP GAUL (Remaja sehat dan pintar generasi unggul)	Non Digital	kesehatan
31		GEGERBER AKTIF (Gelora Gerakan Bersih bersih dan Aktifitas Fisik)	Non Digital	kesehatan
32		SEMUT HITAM (Sehat dengan Jamu	Non Digital	kesehatan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
		Tradisional Hindari Penyakit Menular dan Tidak Menular)		
33		KUPING IBU (Kudampingi Ibu)	Non Digital	kesehatan
34		ASIK KETAWA (Ayo Deteksi Kesehatan Jiwa)	Non Digital	kesehatan
35		SENYUM BERSERI (konseling dan penyuluhan untuk mulut bersih dan sehat dari karies)	Non Digital	kesehatan
36		PRODUKSI TOKO (PROMOSI EDUKASI DAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO)	Non Digital	kesehatan
37		GEMPA ANGIN (Gerakan Masyarakat Peduli Anak Dengan Imunisasi)	Non Digital	kesehatan
38		ALADIN (Ayo Kenali dan Berantas Dengue Secara Dini)	Non Digital	kesehatan
39		PISTOL TB (Peduli Sadari Obati Konsultasi Tuberkulosis)	Non Digital	kesehatan
40		PERAWAN CAKEP (PEduki RAhim	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			WANita dengan Cek ivA KE Puskesmas)		
	41		TAMAN BERSERI (Pendaftaran Nyaman Berbasis Komputerisasi)	Digital	kesehatan
	42		API ASMARA (Ayo Lengkapi Arsip Sendiri dengan Cermat dan Rapi)	Non Digital	kearsipan
3		Puskesmas Lembursitu			
	43		GARDU ASIK (GERAKAN TERPADU LANZIA AKTIF, SEHAT BERENERGIK)	Non Digital	kesehatan
	44		FOSIL (FORUM ASI EKSKLUSIF)	Teknologi	kesehatan
	45		AKSI CEGAH STUNTING (CETING)	Non Digital	pendidikan
	46		SIMANIS (AKSI MASYARAKAT CINTA HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Non Digital	kesehatan
	47		JELITA (Jejaring Lintas Kota	Teknologi	pendidikan
	48		Gerakan Lansia pada Herbal atasi PTM (GELIAT)	Non Digital	kesehatan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
49		GEMERLAP SITU (Gerakan Masyarakat Edukasi Terhadap Penyakit Lembursitu	Non Digital	kesehatan
50		PETIK BUAH MANIS (PERHATIKAN IBU HAMIL MELAHIRKAN,NIFAS & NEONATUS)	Non Digital	kesehatan
51		GEMARI (GERAKAN MELAYANI AKSEPTOR IMPLANT &IUD)	Non Digital	kesehatan
52		CEGAH ANEMIA TINGKATKAN REMAJA SEHAT (CANTIK SEHAT)	Non Digital	kesehatan
53		gerakan rumah dan lingkungan sehat bebas dari penyakit (ramah di liat asik)	Digital	kesehatan
54		GERAKAN ANTISIPASI PEDULI TB DAN KUSTA (GAPTEK)	Non Digital	kesehatan
55		GERAKAN LENGKAPI IMUNISASI DASAR BALITA (GEISA DATA	Teknologi	kesehatan
56		TOP-TU (TANAMAN OBAT PUSKESMAS LEMBURSITU	Non Digital	kesehatan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
57		SENSASI (SENIN SELASA INFORMASI)	Non Digital	kesehatan
58		Gema Zebra (Gerakan Masyarakat Zero Frambusia)	Non Digital	kesehatan
4	Kelurahan Jayamekar			
59		KELUARGA SI PAMAN	Non Digital	kesehatan
60		KUPAT TAHU (KUPAS ATURAN TAMBAH PENGETAHUAN)	Non Digital	pendidikan
61		WAR ROOM K-23	Non Digital	Perencanaan
62		LAYANAN SI MEKAR	Digital	komunikasi dan informatika
63		GARASI KEUANGAN	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa
64		BEAS PERELEK	Digital	sosial
65		NGAJAGA	Digital	sosial
66		KORAN JAYAMEKAR	Digital	komunikasi dan informatika
67		JAYAMEKAR MENGAJAR	Non Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	68		CERAH DI HARI SENIN	Non Digital	sosial
	69		WORK FROM ANYWHERE (WFA)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	70		JAYAMEKAR SIGAP BENCANA	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	71		TRADE IN JALANTAH	Non Digital	kesehatan
	72		SALAMATAN	Non Digital	sosial
5		RSUD Al - Mulk			
	73		OKUPASI (OPTIMALISASI KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT MELALUI FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI)	Non Digital	kesehatan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
74		SI SULTAN (Sistem Konsultasi Gigi Online)	Digital	kesehatan
75		Cetek Mencetak	Non Digital	kesehatan
76		OPTIMUS (Optimalisasi Sistem Pelaporan Mutu Rumah Sakit)	Teknologi	kesehatan
77		SEHARI (SENSUS HARIAN RAWAT INAP)	Teknologi	kesehatan
78		Promosi Online Kesehatan (PrOlinK)	Digital	kesehatan
79		SI KASEP (Sistem Konsultasi Elektronik Pasien)	Digital	kesehatan
80		Si Praja (Sistem Informasi Pelayanan Rawat Jalan)	Digital	kesehatan
81		Vlester (Audio Visual, Leaflet dan Poster di Unit Radiologi)	Non Digital	kesehatan
82		Optimalisasi Pelaksanaan handover Sesuai SOP Melalui Metode Video Edukasi di Ruang Rawat Inap Gabungan UOBK RSUD AL - MULK Kota Sukabumi	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	83		Sapa Pasien	Non Digital	kesehatan
	84		INOVASI 5R RS AL-MULK	Non Digital	kesehatan
	85		Peningkatan Tata Kelola Pendokumentasian dan Tempat Penyimpanan Hasil Radiologi Melalui Pembuatan Video dan Penempelan Label di UOBK RSUD AL MULK Kota Sukabumi	Non Digital	kesehatan
	86		Peningkatan Pengawasan Cairan Infus Pasien Melalui Pembuatan & Pemasangan Stiker di Ruang Rawat Gabungan UOBK RSUD AL - MULK Kota Sukabumi	Non Digital	kesehatan
	87		CHITO (CHAT INFORMASI TENTANG OBAT)	Digital	kesehatan
6		Puskesmas Pabuaran			
	88		RADIO AKTIF (RAGAM ACARA EDUKASI DAN	Non Digital	kesehatan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
		OBROLAN INTERAKTIF MASALAH KESEHATAN)		
89		PANDUAN INOVASI POLA JITU (PENGELOLAAN LAYANAN KONSELING JIWA TERPADU)	Non Digital	kesehatan
90		SE-GIZI CEPAT (Konselig Gizi Cegah Penyakit Tidak Menular)	Non Digital	kesehatan
91		TAWA MAS DAVID (TANGGAP DAN WASPADA MASALAH PENANGGULANGAN COVID-19)	Non Digital	kesehatan
92		PASTI RENYAH (Partisipasi Masyarakat Terhadap Rendahnya Cakupan D/S di Posyandu)	Non Digital	kesehatan
93		REKAN ASIK (RENCANAKAN PERSALINAN AMAN DAN ASI EKSLUSIF)	Digital	kesehatan
94		SABAKOTA (SELASA DAN SABTU MEMBAHAS	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			KESEHATAN SECARA MERATA)		
	95		JAMALITB (JADIKAN MASYARAKAT PEDULI TB)	Digital	kesehatan
	96		GEULIS (GERAKAN LEUNGITKEUN STUNTING)	Non Digital	kesehatan
	97		LASEGAR (LAPAS SEHAT DAN BUGAR)	Non Digital	kesehatan
	98		KALAPA (KADER PEDULI AKTIF PROGRAM KIA)	Non Digital	kesehatan
	99		KAPUT PESAK (GERAKAN JEMPUT SPESIMEN DAHAK)	Non Digital	kesehatan
7		RSUD Syamsudin, SH			
	100		Hallo Bunut	Digital	kesehatan
	101		Optimalisasi Informasi Hasil Penelitian Melalui Digitalisasi Publikasi Ilmiah GENESIS (Gerbang Penelitian dan Science)	Digital	kesehatan
	102		Papan Informasi Pasien Emergensi	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	10 3		Chatbot “SyamsudinCare”	Teknologi	kesehatan
	10 4		Pelayanan Ramah Teman Tuli (Mantul)	Non Digital	kesehatan
	10 5		LASMINI	Digital	kesehatan
	10 6		Perawat Asuh Hemodialisis (Perahu HaDe)	Digital	kesehatan
	10 7		KALZITING (Kalkulator Gizi Stunting)	Digital	kesehatan
	10 8		Modifikasi bentuk makanan pokok untuk meningkatkan asupan makan pada anak usia toddler (SIBENTO MAMA)	Non Digital	kesehatan
	10 9		Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Teknologi	kesehatan
	11 0		KOPI ONLINE (Konseling dan Pemberian Informasi Obat Secara Online)	Digital	kesehatan
	11 1		Larutan Dialisis untuk Mendesinfeksi Air dengan Cara Elektrolisis (Laris Manis)	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	11 2		Papan Linen (Panen)	Digital	kesehatan
8		Puskesmas Sukabumi			
	11 3		CIAUL (CAPAI IMUNISASI ANAK UPAYAKAN LENGKAP)	Non Digital	kesehatan
	11 4		PENGELOLAAN OBAT DENGAN TEKNIK TRAFFIC LIGHT DAN INDIGO	Non Digital	kesehatan
	11 5		ANTAR DIRI SEHAT SUKABUMIKU (Anjungan Pendaftaran Mandiri, Sistem Informasi, Kepuasan Pasien dan Edukasi Kesehatan Puskesmas Sukabumi)	Teknologi	kesehatan
	11 6		SI PENTING (AKSI PEDULI STUNTING DAN WASTING)	Non Digital	kesehatan
	11 7		PEDATI (Pemadam Darah Tinggi)	Non Digital	kesehatan
	11 8		SIAP MERDEKA (SADARI IKUTI PERILAKU ANTI MEROKOK DENGAN KONSELING AKSI	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			BERHENTI MEROKOK)		
	11 9		MOCIDAKU (MODAL CINTA TIDAK CUKUP)	Non Digital	kesehatan
	12 0		POT TRIGO (PENGELOLAAN OBAT DENGAN TEKNIK TRAFFIC LIGHT DAN INDIGO)	Non Digital	kesehatan
	12 1		RASA SEJIWA (Gerakan Sukabumi Siaga Sehat Jiwa)	Non Digital	kesehatan
	12 2		CEKAL PAPA (CEGAH DAN TANGKAL PENYAKIT TBC PARU)	Non Digital	kesehatan
	12 3		GEMAR BATIK MERAH (Gerakan Masyarakat Basmi Jentik Demam Berdarah)	Non Digital	kesehatan
9		Puskesmas Limusnunggal			
	12 4		KASEP PIS-AN (KEGIATAN AKSELERASI, SINERGITAS DAN ELABORASI PIS-PK ANTAR PROGRAM)	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	12 5		DARI HATI (KENDALIKAN BERSAMA IBU HAMIL RISIKO TINGGI)	Non Digital	kesehatan
	12 6		GEMAR MENGAJI (GERAKAN MASYARAKAT MEMPERDULIKAN KESEHATAN DAN GANGGUAN JIWA)	Digital	kesehatan
	12 7		HAI CINTA (HIMBAUAN AKTIF IKUT IMUNISASI CERMIN PEDULI BAYI DAN BALITA)	Non Digital	kesehatan
	12 8		GUCI EMAS (GERAKAN CUKUPI GIZI MELALUI EDUKASI MASYARAKAT)	Non Digital	kesehatan
	12 9		GELORA CINTA MANIS (GERAKAN OLAHRAGA BERSAMA ATASI CEPAT PENYAKIT MENAHUN DAN KRONIS)	Digital	kesehatan
	13 0		WEDANG JAHE (WISATA EDUKASI TINGKATKAN PENTINGNYA BELAJAR HIDUP	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			SEHAT ELIMINASI PENYAKIT)		
	13 1		RASA AMAN (Gerakan Atasi Sampah Aktifkan Jamban)	Non Digital	kesehatan
	13 2		KLIK UP (KELOLA LAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI PADA KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)	Non Digital	kesehatan
	13 3		PDKT (PROGAM DAMPINGI KASUS TB)	Non Digital	kesehatan
	13 4		MASAGI (MASYARAKAT SADAR KESEHATAN GIGI)	Non Digital	kesehatan
1 0		Kecamatan Baros			
	13 5		SISKAMLINK (SISTEM INFORMASI DAN SURAT KETERANGAN MELALUI LINK)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
	13 6		ELEKTRONIK PENGADUAN	Digital	Fungsi Penunjang

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
	13 7		SURKAT (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
	13 8		SIKAP (SISTEM KEPUASAN PELAYANAN)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
	13 9		SENDU (SENIN DUA RIBU)	Non Digital	kesehatan
	14 0		SELASIH (SELASA BERBAGI KASIH)	Non Digital	kesehatan
	14 1		JUMANJI (JUMAT BERBAGI DAN MENGAJI)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	14 2		SIMAJA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA) RTRW	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa
1 1		Puskesmas Baros			
	14 3		Jalan Pagi Gerakan Pungut Sampah Cegah Penyakit Menular dan Tidak Menular (JPGPS CEPAT)	Non Digital	kesehatan
	14 4		Terminal Sehat Jawara Supirna (TERAJANA)	Non Digital	kesehatan
	14 5		Rencang RAOS (Rembuk dan Bincang, Ragam Informasi Puskesmas Baros)	Non Digital	kesehatan
	14 6		Gebet Si Mas (Gerakan Berantas Tb Melalui Sinergitas dengan Masyarakat)	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	14 7		Polisi Rokok (Penerapan KTR dan Konseling Upaya Berhenti Merokok)	Non Digital	kesehatan
	14 8		GALERI PTM (Gerakan pelaksanaan edukasi dan skrining PTM)	Non Digital	kesehatan
	14 9		Turbotik Asep (Tukar Botol Plastik untuk Arisan Septik Tank)	Non Digital	kesehatan
	15 0		LAMANDA (Lansia Mandiri dan Bahagia)	Non Digital	kesehatan
	15 1		Kucegah Stunting dengan Sekolah Gizi Keluarga (KUOTA SAGIGA)	Non Digital	pendidikan
1 2		Puskesmas Benteng			
	15 2		siMOCHI (Strategi Imunisasi Mobile Cegah PD3I)	Non Digital	kesehatan
	15 3		SIKAP SEHAT(Sistem Informasi dan Kepuasan Pasien dan Sistem Edukasi Kesehatan)	Digital	kesehatan
	15 4		PASTIKAN (Pantau Status Gizi dan Kesehatan)	Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	15 5		PANDAWA (PENANGANAN KHUSUS PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA)	Non Digital	kesehatan
	15 6		siKaSEP (Aksi Keluarga Sehat Enyahkan Penyakit)	Non Digital	kesehatan
	15 7		SITALAS (Sistem pendafTaran onLine lAnSia)	Non Digital	kesehatan
	15 8		SULTAN PERGI (Konsultasi Kesehatan Gigi)	Digital	kesehatan
	15 9		KESAMBET (Penkes untuk Pasien Sambil Antri berobat)	Non Digital	pendidikan
	16 0		TIM GERUSUK (GERAK CEPAT PUSKESMAS UNTUK MASYARAKAT)	Non Digital	kesehatan
1 3		Puskesmas Tipar			
	16 1		GERCEP CIN (GERAKAN PERCEPATAN IMUNISASI RUTIN)	Non Digital	kesehatan
	16 2		GEMAR CETING	Non Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	16 3		SICEPOT (SISTEM CEPAT PENANGANAN ODGJ TERPADU)	Non Digital	kesehatan
	16 4		MESJID (MELAKUKAN EDUKASI KESEHATAN DI MESJID)	Non Digital	kesehatan
	16 5		GADIS BELIA (GERAKAN ANAK GADIS BERSAMA LIBAS ANEMIA)	Non Digital	pendidikan
	16 6		MELINGAN (MEMO KONSELING KLINIK SANITASI)	Non Digital	kesehatan
	16 7		SIPEUTING (SISTEM PENANGANAN STUNTING)	Non Digital	kesehatan
	16 8		TUNAS (TIPAR UNTUK ANAK SEKOLAH)	Non Digital	pendidikan
1 4		Puskesmas Selabatu			
	16 9		Dilan Milea (Peduli Kesehatan Mileneal Kita)	Non Digital	kesehatan
	17 0		MANJA MANIS (Pemantauan Makanan Jajanan Aman Hygienis dan Sehat)	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	17 1		SICANDU KERJA (SISTEM PENCATATAN TERPADU KESEHATAN PEKERJA)	Non Digital	kesehatan
	17 2		SI ENDOLITA (Aksi Cegah Deteksi dan Kendalikan Hipertensi)	Non Digital	kesehatan
	17 3		STEAMBOOT (Strategi Peningkatan Imunisasi Booster)	Non Digital	kesehatan
	17 4		Laktasie (Layanan Komprehensif Tingkatkan Asi Eksklusif)	Non Digital	kesehatan
1 5		Puskesmas Cipelang			
	17 5		LEGIT	Non Digital	kesehatan
	17 6		SPION	Digital	kesehatan
	17 7		RUTAN BESI	Non Digital	kesehatan
	17 8		JERUK AMIS	Non Digital	pendidikan
	17 9		KRIWIL	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	18 0		KECAPI	Non Digital	kesehatan
1 6		Puskesmas Nanggeleng			
	18 1		SI ITEUNG MODIS (Sarana Informasi tentang Kandungan melalui media sosial)	Digital	kesehatan
	18 2		GENTING KITA (Gerakan bebas stunting kuatkan Indonesia berkualitas)	Non Digital	kesehatan
	18 3		GEMUK MELAR (Gerakan Rumah Anti Nyamuk Mencegah Penyakit Menular)	Non Digital	kesehatan
	18 4		PESUGIHAN NANGGELENG (Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di Kel. Nanggeleng)	Non Digital	kesehatan
	18 5		PESONA HATI (Pelayanan empati sayang orang dengan HIV AIDS dan Hepatitis)	Non Digital	kesehatan
1 7		Kelurahan Baros			

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	18 6		GESER (Gerakan Seribu)	Non Digital	sosial
	18 7		Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT)	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	18 8		Gerakan Masyarakat Peduli Penanganan Stunting (GEMA PENTING)	Non Digital	kesehatan
	18 9		Siki Saga (Silaturahmi Kelurahan Indit Sapa Warga)	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	19 0		Baros Terpadu Satu Pintu (BTS)	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	19 1		Jumat Bersih, Sehat dan Ceria (JUMAT BERSERIA)	Digital	sosial
1 8		Kecamatan Cikole			
	19 2		SIPALING KECE (SISTEM PELAYANAN KELILING KECAMATAN CIKOLE)	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	19 3		Sistem Pengelolaan Laporan Data Kependudukan (SIPELUK)	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa
	19 4		SISTEM INFORMASI APLIKASI DISPOSISI SURAT MASUK DAN KELUAR KECAMATAN CIKOLE (SIADIKKECIL)	Digital	komunikasi dan informatika
	19 5		SIKECIL MACO (SISTEM INFORMASI KECAMATAN CIKOLE MELALUI BARCODE)	Digital	komunikasi dan informatika
1 9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	19 6		Panel Informasi Seni (PASINI)	Digital	pendidikan
	19 7		SICABAK	Digital	pendidikan
	19 8		Wanoh Budaya	Digital	kebudayaan
	19 9		SIIBU (Sistem Informasi Kebudayaan dan Promosi Pariwisata)	Digital	pendidikan
	20 0		Revitalisasi Gotong Sisig	Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
20	0	Puskesmas Cikundul			
	201		GEMA AFICK (GERAKAN MASYARAKAT BERAKTIFITAS FISIK DENGAN PUSKESMAS CIKUNDUL)	Non Digital	pendidikan
	202		KEKAR (KELAS EDUKASI KADER REMAJA)	Digital	pendidikan
	203		MEPELING (METODE PENYULUHAN KELILING)	Non Digital	pendidikan
	204		KEPING TOGE (KELOMPOK PENDAMPING TOLONG ODGJ)	Non Digital	kesehatan
20	1	Kelurahan Jayaraksa			
	205		MAS PEJABAT (Masyarakat Jayaraksa Peduli Jamban Sehat)	Non Digital	kesehatan
	206		SI RASA MANIS (Aksi Bersama Jayaraksa Mencegah Dan Menanggulangi Stunting)	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	20 7		SI CERDAS (Aksi Bersama Cegah Resiko Penularan Demam Berdarah Terintegrasi)	Non Digital	kesehatan
2 2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	20 8		LAYANAN MOCI LEGIT	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	20 9		LAYANAN MANTEL SEMAR	Non Digital	sosial
	21 0		LALAYANAN JENIUS CINTA	Non Digital	sosial
2 3		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
	21 1		Hallo Restorasi Arsip (HARTOP)	Digital	pendidikan
	21 2		Sistem Penyimpanan Arsip Dinamis Tertib dan Aman (SPIDERMAN)	Digital	pendidikan
	21 3		YANA SULASTRI (Pelayanan	Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			Penanganan Encapsulasi Penyelamatan Arsip)		
2 4		Kelurahan Sudajayahilir			
	21 4		IMAH BERSEPTICK TANK DAN KEBUL MANFAAT (Inovasi Menabung Sampah Untuk Membuat Septick Tank dan Kebutuhan Lain Yang Bermanfaat)	Non Digital	lingkungan hidup
	21 5		Asosiasi Remaja Mesjid Dan Pemuda Serta Edukasi Talikasih Ibu Dan Anak (ARMADA SETIA)	Non Digital	sosial
	21 6		AKI JAWARA (Aparat Kelurahan Indit Nganjang Ka Warga)	Non Digital	sosial
2 5		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			
	21 7		E-CPPD Kota Sukabumi ((Layanan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota	Digital	sosial

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			Sukabumi Secara Elektronik)		
	21 8		SAPAR (Sekolah Agro untuk Pelajar)	Non Digital	pendidikan
2 6		Kelurahan Kebonjati			
	21 9		JOS (JATI ONLINE SERVICES)	Digital	sosial
	22 0		PELUK RINDU (PELAYANAN UMUM KONSULTASI DAN INFORMASI KELURAHAN DI POSYANDU)	Digital	sosial
2 7		Puskesmas Gedongpanjang			
	22 1		SILATIN (SKRINING LABORATORIUM CALON PENGANTIN)	Non Digital	kesehatan
	22 2		GERA CETING (GERAKAN CEGAH STUNTING)	Non Digital	kesehatan
2 8		Sekolah Dasar Negeri Lamping 3			
	22 3		SI KIDAL (PROJEK SISWA INOVATIF MEMBUAT KOMIK DIGITAL)	Non Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	22 4		EMPO ORI (PEMBELAJARAN PROJEK MEMBUAT BIOPORI)	Non Digital	pendidikan
2 9		Puskesmas Karang Tengah			
	22 5		Si-E Maskate	Non Digital	kesehatan
	22 6		POJOK LAROA	Digital	kesehatan
	22 7		KaDuaDuaPe (Kelas Kebugaran dan Postur Pegawai)	Non Digital	kesehatan
	22 8		GEMAR SEWA (Gerakan Masyarakat Sehat Jiwa)	Non Digital	kesehatan
	22 9		Gema Sewa	Non Digital	kesehatan
	23 0		POJOK LARWA	Non Digital	kesehatan
	23 1		GEMAR SEWA	Non Digital	kesehatan
3 0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	23 2		SIKOPDA	Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					pelindungan masyarakat
	23 3		PAJAKA PLUS	Non Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang
3 1		Dinas Lingkungan Hidup			
	23 4		PLASTIK (Pelayanan SPPL Terpadu di Kelurahan/Kecamatan)	Non Digital	lingkungan hidup
	23 5		PEDULI (PENGADUAN LINGKUNGAN ONLINE KOTA SUKABUMI)	Teknologi	lingkungan hidup
3 2		Kecamatan Lembursitu			
	23 6		Sistem Pelayanan Siap Antar (SIPINTAR)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	23 7		GRECEP PISAN (Gerakan Remaja	Non Digital	kesehatan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			Cepat Peduli (Stunting)		
3 3		Kelurahan Cikundul			
	23 8		Warung Sabtu Berkah	Non Digital	pendidikan
	23 9		TABUNGAN BAROKAH (TABAROK)	Non Digital	pendidikan
3 4		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	24 0		MENTARI BERDASI (Mengatasi Stunting Terkolaborasi Bersama DALDUKKBP3A Serap Informasi)	Teknologi	kesehatan
3 5		Kelurahan Karamat			
	24 1		PUSLINGKAR (PERPUSTAKAAN KELILING KELURAHAN KARAMAT)	Non Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	24 2		WAJAKA (WAWAR JALAN KAKI)	Non Digital	sosial
	24 3		KEKASIH (KELURAHAN KARAMAT BEBERSIH)	Non Digital	lingkungan hidup
	24 4		PAMALI (Patroli Mapay Lingkungan)	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
	24 5		KOMBAR (KELOMPOK KARAMBA KELURAHAN KARAMAT)	Non Digital	pangan
3 6		Kecamatan Gunungpuyuh			
	24 6		GERAKAN MENGUBAH SAMPAH MENJADI BERKAH (GEMA SAJADAH)	Non Digital	lingkungan hidup
	24 7		SIMPATI (SISTEM PELAYANAN TERINTEGRASI)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
3 7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi			
24 8		SIMPONI	Teknologi	kearsipan
24 9		OPEN DATA KOTA SUKABUMI	Digital	komunikasi dan informatika
3 8	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
25 0		SIJIMAT BOSS	Digital	penanaman modal
3 9	Kecamatan Citamiang			
25 1		BANK DATA KECAMATAN CITAMIANG BERBASIS DIGITAL (BACANG ISI)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4 0	Kecamatan Warudoyong			

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	25 3		NAMPAK SAMAWA (seNAM Pagi Kompak berSAMA Warga	Non Digital	kesehatan
4 1		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
	25 3		Spada Santun (Screening Pajak Daerah Satu Pintu)	Digital	Keuangan
4 2		Sekolah Dasar Negeri Dewi Sartika CBM			
	25 4		Sekolah Ramah Anak Dengan Bersama	Digital	pendidikan
	25 5		Si Ibuk DeSa CiBiMa	Digital	pendidikan
4 3		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
	25 6		SURAK-OY	Non Digital	kesehatan
4 4		Perumda BPR			
	25 7		SIRAYA (SIMPANAN HARI RAYA)	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
			PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI		pelindungan masyarakat
	25 8		Simpanan Berjangka (SiBer) PERUMDA BPR Kota Sukabumi	Non Digital	pendidikan
4 5		Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia			
	25 9		Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur (SiPeKa)	Digital	Kepegawaian
4 6		Dinas Sosial			
	26 0		Rumah Singgah Bandung	Non Digital	kesehatan
	26 1		PUSKESOS MELAJU DI KELURAHAN	Digital	pendidikan
4 7		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	26 2		Sistem Informasi Elektronik Data Bencana (SiEdan)	Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
4 8		Kelurahan Gunungparang			

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	26 3		KADOMU (Kartu Dokumen untukMu)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4 9		Kelurahan Situmekar			
	26 4		PELANA KUAT (Pelayanan Perizinan Kegiatan dan/atau Usaha Terpadu)	Digital	lingkungan hidup
	26 5		SUKA OLAH (Situmekar Kelola Sampah)	Non Digital	lingkungan hidup
	26 6		ROOPINA NGELING (Roadshow Pembinaan Pengelolaan Lingkungan)	Non Digital	lingkungan hidup
5 0		UPTD Labkesda			
	26 7		SI JEMPOL PASLAB	Non Digital	kesehatan
5 1		Kelurahan Cibeureumhilir			
	26 8		Si Petrik (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Administrasi Surat dikirim Ke Rumah)	Teknologi	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					ketentuan peraturan perundang- undangan
	26 9		Bajak Laut (Bayar Pajak Langsung Dibuatkan Di Tempat)	Non Digital	Keuangan
5 2		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	27 0		ANJOYAH	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
5 3		Kelurahan Subang Jaya			
	27 1		KEKEBA PRASMANAN WA JAYA	Non Digital	kesehatan
	27 2		BERKELANA	Non Digital	kesehatan
5 4		Kecamatan Cibeureum			
	27 3		SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK (SIBEO)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					peraturan perundang-undangan
	27 4		HAPUS CEBAN (Hari Pungut Sampah Cegah Banjir)	Non Digital	sosial
5 5		Kelurahan Citamiang			
	27 5		Sistem Aplikasi Wilayah Kelurahan Citamiang (SI AWI TAMIANG)	Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	27 6		Bugar Citamiang (BooMing)	Non Digital	kesehatan
	27 7		Forum Mufakat Citamiang Kita (RUMPI CINTA)	Non Digital	kesehatan
5 6		Kelurahan Sriwedari			
	27 8		E-ASPRI (ELEKTRONIK AGENDA SURAT PELAYANAN SRIWIDARI)	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5 7		Sekolah Menengah Pertama Negeri 10			

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	27 9		Perpustakaan Digital dan Otomatisasi Perpustakaan SMPN 10 Kota Sukabumi	Digital	pendidikan
	28 0		Dunia Fantasi (Multimedia Pembelajaran Berdiferensiasi)	Digital	pendidikan
5 8		Kelurahan Cikondang			
	28 1		STATUS GIZI (Stunting Tuntas dengan Gizi)	Digital	kesehatan
5 9		Kelurahan Sindangpalay			
	28 2		SIPINTAR (Sistem Informasi Pelayanan Diantar)	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6 0		Inspektorat			
	28 3		Portal Pengaduan dan Konsultasi (PAKAR)	Digital	komunikasi dan informatika
6 1		Kelurahan Sukakarya			
	28 4		SANTUY	Digital	pendidikan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	28 5		INOVASI BUDIDAYA JAMUR DAN TANAMAN HIDROPONIK	Non Digital	pangan
6 2		Kelurahan Limusnunggal			
	28 6		Sistem Antar-jemput Surat Kematian (SASUKE)	Digital	sosial
6 3		Kelurahan Cikole			
	28 7		CIKOLE CERIA (Pelayanan Online Kelurahan Cikole yang Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Amanah)	Teknologi	sosial
6 4		Kelurahan Cisarua			
	28 8		CINTA PACAR (CISARUA NERIMA DATA PELAYANAN LANCAR)	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6 5		Sekolah Menengah Pertama Negeri 6			
	28 9		Aplikasi Pembelajaran Kebutuhan Hidup	Digital	pendidikan

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
6 6	Kelurahan Sindangsari			
29 0		JUMA'AH SEURI (Jumat Berkah, Sindangsari Sehat, Guyub, Tertib Nan Asri) Kelurahan Sindangsari	Non Digital	pemberdayaa n masyarakat dan Desa
6 7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
29 1		Sistem Informasi Geografis Kota Sukabumi (SIGENKO)	Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang
6 8	Kelurahan Cipanengah			
29 2		LADU MANIS (LAYANAN TERPADU MASYARAKAT TERSENYUM MANIS)	Non Digital	administrasi kependuduka n dan pencatatan sipil
6 9	Kelurahan Gunungpuyuh			
29 3		PELANHGI HATI (PELAYANAN SINERGI KELURAHAN YANG HUMANIS DAN INOVATIF)	Teknologi	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					peraturan perundang- undangan
7 0		Kelurahan Dayeuluhur			
	29 4		NGARIKSA AKI (Ngariung Ka Warga Saminggu Sakali)	Non Digital	lingkungan hidup
7 1		Sekretariat DPRD			
	29 5		Elektronik Surat (E- SURAT)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
	29 6		Jaringan Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7 2		Dinas Pekerjaan			

NO	INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
	Umum dan Tata Ruang			
29 7		Sipeka (Sistem Informasi Pelayanan SKRK)	Non Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang
7 3	Dinas Perhubungan			
29 8		SIPENJALU	Digital	perhubungan
29 9		PERDANA	Digital	perhubungan
7 4	Kelurahan Babakan			
30 0		BAU TRASA PEULEUM (Babakan Untuk Transaksi Pelayanan Online dan Umum)	Digital	administrasi kependuduk n dan pencatatan sipil
7 5	Kelurahan Benteng			
30 1		CILUKBA	Non Digital	pendidikan
7 6	Kelurahan Gedongpanjang			
30 2		Wanita Linmas Kreatif dan Cepat (wali kece)	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan

NO		INSTANSI	JUDUL INOVASI	JENIS	URUSAN
					pelindungan masyarakat
7 7		Kelurahan Karang Tengah			
	30 3		LARASWATI (Layanan Prioritas untuk Warga Penuh Simpatik)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7 8		Kelurahan Warudoyong			
	30 4		BEBERESIH JUMAT PAGI SAPA WARGA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT	Non Digital	ketenteraman , ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
7 9		Sekolah Dasar Negeri Sriwidari 1			
	30 5		GEMPA (GEMAR MENGHAPAL AL-QURAN)	Non Digital	pendidikan

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Musrenbang menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi. Selain dari Musrenbang, sebagai bentuk dari implementasi Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif, maka telah dilakukan beberapa kegiatan lain yaitu Sukabumi *Youth Planner Conference* serta *Focus Group Discussion* Disabilitas. Hasil kegiatan tersebut juga telah mewarnai proses perencanaan yang telah dilakukan, walaupun tentu hasil tersebut tetap di proses sebagaimana mekanisme yang berlaku.

Tahun 2026 penentuan program dan kegiatan daerah berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, khususnya pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan program prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rancangan RPJMD.

5.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta hasil pemutakhirannya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Program dan kegiatan hasil pemetaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Pusat Data dan Informasi, dimana dalam SIPD tersebut menggunakan rincian objek belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh perangkat daerah mengusulkan rencana kerja pada SIPD RI dengan melakukan entri rincian objek belanja, selanjutnya usulan tersebut dilakukan proses verifikasi oleh Tim Bappeda. Proses verifikasi dilakukan terutama dengan melihat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per sub kegiatan, guna melihat apa rincian aktivitas yang ada di dalamnya sehingga dari awal proses perencanaan sudah dapat diketahui apa tujuan, siapa sasaran dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya, sehingga nanti dapat dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebagaimana dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam proses pengusulan pagu anggaran Tahun 2026, perangkat daerah pada awalnya diarahkan untuk mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, namun demikian setelah dilakukan analisis, penelaahan dan verifikasi ternyata kebutuhan belanja masih belum terpenuhi terutama dalam mendukung kegiatan yang dianggap prioritas di masing-masing perangkat daerah. Selain itu usulan awal tersebut masih belum mempertimbangkan kebutuhan program prioritas dan unggulan yang ada dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Untuk itu maka berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan seluruh tim penyusun RKPD, maka kebutuhan tersebut dipenuhi dengan kembali melakukan verifikasi ulang serta mengurangi aktivitas yang dianggap bukan prioritas.

Rekapitulasi usulan pagu anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Ranhir RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029 serta SIPD RI disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pagu Usulan Perangkat Daerah dan Ranhir RPJMD Kota Sukabumi
Tahun 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH	RANHIR RPJMD 2026	RKPD 2026
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141,747,788,280	141,747,788,280
2	Dinas Kesehatan	524,629,320,857	524,629,320,857
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65,558,598,454	65,558,598,454
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13,110,933,093	13,110,933,093
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,977,775,138	3,977,775,138
6	Dinas Sosial	7,472,669,471	7,472,669,471
7	Dinas Tenaga Kerja	4,721,031,410	4,721,031,410
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	8,173,813,633	8,173,813,633
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12,527,554,130	12,527,554,130
10	Dinas Lingkungan Hidup	29,433,222,148	29,433,222,148
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,674,665,343	6,674,665,343
12	Dinas Perhubungan	18,341,519,005	18,341,519,005

NO	PERANGKAT DAERAH	RANHIR RPJMD 2026	RKPD 2026
1	2	3	4
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,162,670,893	7,162,670,893
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	18,705,748,314	18,705,748,314
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,607,661,845	5,607,661,845
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14,390,433,190	14,390,433,190
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,121,029,824	6,121,029,824
18	Sekretariat Daerah	49,178,621,897	49,178,621,897
19	Sekretariat DPRD	60,005,495,852	60,005,495,852
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16,201,143,510	16,201,143,510
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	55,414,372,764	55,414,372,764
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,160,803,982	9,160,803,982
23	Inspektorat Daerah	12,843,982,100	12,843,982,100
24	Kecamatan Cikole	15,046,579,231	15,046,579,231
25	Kecamatan Gunung Puyuh	11,472,264,087	11,472,264,087

NO	PERANGKAT DAERAH	RANHIR RPJMD 2026	RKPD 2026
1	2	3	4
26	Kecamatan Citamiang	12,633,835,201	12,633,835,201
27	Kecamatan Warudoyong	13,107,293,645	13,107,293,645
28	Kecamatan Baros	9,842,575,093	9,842,575,093
29	Kecamatan Lembur Situ	12,649,523,384	12,649,523,384
30	Kecamatan Cibeureum	10,530,289,740	10,530,289,740
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,110,003,732	10,110,003,732
JUMLAH		1,186,553,219,246	1,186,553,219,246

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Apabila dilihat dari urusannya, dan dikaitkan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka akan terlihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Jumlah Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran
Per Urusan Pada RKPD Tahun 2026

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan	141,339,274,280	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan	524,629,320,857	Dinas Kesehatan
3	Usuran Pemerintahan Bidang	58,878,016,454	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,650,582,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13,110,933,093	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
7	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3,977,775,138	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7,472,669,471	Dinas Sosial
9	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4,676,811,910	Dinas Tenaga Kerja
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644,618,307	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	10,632,866,055	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	29,433,222,148	Dinas Lingkungan Hidup
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,674,665,343	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,529,195,326	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	18,341,519,005	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	6,986,549,443	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	16,945,067,064	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5,607,661,845	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Urusan Pemerintahan Bidang	12,483,719,440	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	Kepemudaan dan Olahraga		
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	51,080,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	125,041,450	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	408,514,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5,978,828,124	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	142,201,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	496,964,525	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1,906,713,750	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1,397,723,550	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	770,681,250	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	990,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	44,219,500	Dinas Tenaga Kerja
31	Sekretariat Daerah	49,178,621,897	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	60,005,495,852	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	15,150,102,230	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34	Keuangan	55,414,372,764	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	Kepegawaian	8,372,919,746	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Pendidikan dan Pelatihan	787,884,236	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Penelitian dan Pengembangan	1,051,041,280	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	Inspektorat Daerah	12,843,982,100	Inspektorat Daerah
39	Kecamatan Administrasi	15,046,579,231	Kecamatan Cikole
40	Kecamatan Administrasi	11,472,264,087	Kecamatan Gunung Puyuh
41	Kecamatan Administrasi	12,633,835,201	Kecamatan Citamiang
42	Kecamatan Administrasi	13,107,293,645	Kecamatan Warudoyong
43	Kecamatan Administrasi	9,842,575,093	Kecamatan Baros
44	Kecamatan Administrasi	12,649,523,384	Kecamatan Lembur Situ
45	Kecamatan Administrasi	10,530,289,740	Kecamatan Cibeureum

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
46	Kesatuan Bangsa dan Politik	10,110,003,732	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah		1,186,553,219,246	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Penyusunan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sangat mempertimbangkan prioritas pembangunan dan program prioritas yang tercantum pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, Dari hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan data bahwa pagu anggaran RKPD Tahun 2026 yang mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan dan indikator kinerja utama kepala daerah adalah sebesar Rp, 125,892,059,537,- atau sekitar 10,6 % dari total belanja RKPD yang tersebar di berbagai perangkat daerah pengampu, Lebih jelasnya rincian pagu anggaran tersebut seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3

Rekapitulasi Anggaran Pada RKPD Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Pencapaian IKU Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,142,979,567	BPKPD
			4,142,979,567	
2	Peningkatan Kesejahtera		69,553,959,598	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	an Masyarakat			
		Program Pengelolaan Pendidikan	14,721,807,000	Disdikbud
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	49,685,477,598	Dinkes
		Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	5,146,675,000	Dinkes
3	Penciptaan Lapangan Kerja		543,098,500	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	487,071,000	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	56,027,500	Disnaker
4	Penataan Kota		36,729,606,351	
		Program Penyelenggaraan Jalan	20,769,662,773	DPUTR
		Program Penyelenggaraan Lalu	2,447,347,600	DISHUB

No	Prioritas Pembangun an	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Lintas dan Angkutan Jalan		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	563,000,000	DPUTR
		Program Kawasan Permukiman	2,911,094,000	DPUTR
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,296,760,468	DPUTR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,640,000,000	DPUTR
		Program Pengelolaan Persampahan	3,151,741,510	DLH
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	950,000,000	DPUTR
5	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangun an		14,922,415,521	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,475,813,321	Setda
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	2,757,737,200	Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
		Program Pengembangan Kebudayaan	127,889,000	Disdikbud
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	58,918,100	Dalduk KB PPA
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	85,000,000	Dalduk KB PPA
		Program Pemenuhan Hak Anak	37,298,250	Dalduk KB PPA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,379,759,650	Disporapar
Jumlah			125,892,059,537	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda

Usulan dan program strategis Tahun 2026 diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan program seperti Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), Honor Ketua RT-RW, BPJS Tenaga Kerja untuk Ketua RT, Ketua RW, Anggota Linmas dan Kader, Termasuk didalamnya penanganan kekumuhan dan *stunting*, Sementara usulan masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Tahun 2026.

Prioritas untuk 5 usulan fisik, 5 usulan non fisik, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan serta inovasi, Untuk strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui konvergensi 3F (3 Fokus), yaitu: Fokus Lokasi (Kelurahan), Fokus Intervensi Aksi (Sensitif dan Spesifik), dan Fokus Kelompok Sasaran (1000 Hari Pertama Kehidupan).

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa proses perencanaan harus mengakomodir harus mengakomodir kebutuhan atau usulan masyarakat melalui Musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD, Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, usulan masyarakat serta pokok pikiran DPRD yang seluruhnya sudah diakomodir oleh perangkat daerah pengampu sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.4

Rekapitulasi Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang Yang Diakomodir
Perangkat Daerah

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
1	Sarana Prasarana Keagamaan	1
2	Bantuan / Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	6
3	Bantuan Pangan	1
4	Bantuan Pendidikan/Beasiswa	4
5	Bantuan Permodalan Umkm	8
6	Biaya Operasional Kegiatan	2
7	Bimtek Kepemudaan	1
8	Bimtek Penguatan Pengurusan Kampung KB	8
9	Bimtek Penguatan Peran Lkk	2
10	Bimtek Penurunan Stunting	1
11	Bimtek/Pelatihan Rt/Rw	4
12	Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi Mitra Sosial (Psm, Tksk, Puskesmas)	2
13	Dana Operasional Posyandu Remaja	1
14	Digital Marketing	3
15	Inovasi Budidaya Tanaman Hortikultura	1
16	Insentif Anggota Linmas	1
17	Insentif Kader Posyandu	3

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
18	Jalan Pemukiman / Rehab / Pengaspalan/	26
19	Pelatihan Bengkel Dan Las	2
20	Pelatihan Berbasis Digital	2
21	Pelatihan Bina Bina (Bkb,Bkr,Bkl)	1
22	Pelatihan Budidaya Ikan	6
23	Pelatihan Budidaya Magot	1
24	Pelatihan Hidroponik	9
25	Pelatihan Kader Posyandu	3
26	Pelatihan Keagamaan	1
27	Pelatihan Keterampilan / Pelatihan Kerja (Tata Boga, Las Pelatihan Sablon Dstnya)	10
28	Pelatihan Kewirausahaan	6
29	Pelatihan Komputer	9
30	Pelatihan Linmas, Kebakaran	2
31	Pelatihan Literasi Dan Pengadaan Buku Bacaan	2
32	Pelatihan Menjahit	2
33	Pelatihan Penanganan Persampahan	6
34	Pelatihan Penempatan Perkarangan Untuk Ketahanan Pangan	2
35	Pelatihan Perlindungan Anak Dan Perempuan Berbasis Keluarga	1
36	Pelatihan Pertanian	2
37	Pelatihan Peternakan Ayam	1
38	Pelatihan Pkk / Kader Posyandu/ Dasa Wisma	2
39	Pelatihan Pola Asuh Anak	1
40	Pelatihan Posyandu Remaja	1
41	Pelatihan Siaga Bencana Untuk RT/RW	3
42	Pelatihan Sistem Mina Padi Bagi KWT	1
43	Pelatihan Teknis Pertanian	2
44	Pelatihan Umkm (Digital Marketing)	5
45	Pelatihan Umkm Pemuda	3
46	Pemasangan Cctv	1
47	Pembangunan Air Limbah	1
48	Pembangunan Gapura Batas Masuk	1
49	Pembangunan Gedung Olahraga (Gor)	2
50	Pembangunan Gedung Serbaguna	1

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
51	Pembangunan Gedung/ Kantor	1
52	Pembangunan Jalan Pemukiman	5
53	Pembangunan Posyandu	3
54	Pembangunan Rabat Beton Dan TPT Pagar	1
55	Pembangunan Sumur Serapan	1
56	Pembangunan Talud/ Irigasi / Embung/ Bendungan Dan Penampungan Air	29
57	Pembangunan TPT	11
58	Pembangunan Tpt Irigasi Sawah	8
59	Pembangunan Gorong-Gorong/Drainase	13
60	Pembenahan Lingkungan	1
61	Pembuatan Mushola Kelurahan	1
62	Pembuatan Septic Tank Komunal	1
63	Pembuatan Sumur Artesis	2
64	Pembuatan TPS	1
65	Pemeliharaan/Rehab Talud/ Irigasi / Normalisasi Sungai/Embung/ Bendungan Dan Penampungan Air	14
66	Pemicuan STBM	1
67	Penambahan Modal Uppks	1
68	Penerangan Jalan Umum (Pju)	8
69	Pengadaan Alat Kesehatan	3
70	Pengadaan Alat Olahraga	2
71	Pengadaan Bibit Pertanian Dan Perikanan	3
72	Pengadaan Laptop Untuk RT RW	1
73	Pengadaan Roda Sampah	2
74	Pengadaan Sarana Air Bersih	10
75	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	1
76	Pengadaan Tanah	2
77	Pengadaan Tong Sampah	2
78	Pengerukan/Pendalaman Dan Perbaikan Selokan	1
79	Penguatan Kampung Berkualitas (KB)	1
80	Penguatan Perpustakaan Kelurahan	1
81	Peningkatan Insentif LKK	2
82	Pencegahan Stunting (Tribina)	2
83	Perbaikan Jembatan	1
84	Posyandu	1

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
85	Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	7
86	Rehab Peningkatan Perluasan Peningkatan Prasarana Air Limbah/ MCK	3
87	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gorong-Gorong / Drainase	30
88	Rumah Tidak Layak Huni	19
89	Sarana Prasarana Olahraga	5
90	Sosialisasi Penanggulangan Bencana, Pelatihan Relawan Bencana Alat Perlindungan Kesipsiagaan Bencana	1
91	Sosialisasi STBM	2
92	Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Kesehatan	1
93	Trotoar Jalan	1

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

Tabel 5.5

Rekapitulasi Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
1	Bantuan anggaran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2
2	Bantuan anggaran sarana prasarana pos yandu	3
3	Bantuan anggaran sarana prasarana RT/RW	4
4	Bantuan anggaran sarana prasarana yayasan	16
5	Bantuan Anggaran Tabigh Akbar dan Santunan Anak Yatim Remaja Mesjid	1
6	Bantuan Anggaran untuk Program Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu dan Santunan Anak Yatim / Jompo	3
7	Pelatihan/ workshop	15
8	Pelatihan/workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	9
9	Pembangunan / rehabilitasi gedung yayasan	8
10	Pembangunan drainase / gorong - gorong	2
11	Pembangunan jalan pemukiman	8

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
12	Pembangunan/ rehabilitasi pos ronda, posyandu, dll	21
13	Pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah	12
14	Pembuatan sumur artesis	4
15	Pengadaan Oprasional Kendaraan yayasan	1
16	Rehabilitasi drainase / gorong - gorong	2
17	Rehabilitasi jalan permukiman	8
18	Sarana dan prasarana tempat peribadatan	6
19	Sarana prasarana lembaga	2

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

Pendapatan Kota Sukabumi masihlah sangat terbatas, dan sebagian besar masih mengandalkan dana transfer dari Provinsi maupun pusat, Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan strategi pembiayaan pembangunan melalui sumber lain yang sah secara ketentuan yang berlaku, Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meminta dukungan pembiayaan Non APBD melalui program CSR (*Corporate Social Responcibility*) atau TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan),

Tahun 2026 Pemerintah Kota Sukabumi akan mencoba melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang prosesnya sudah dimulai pada Tahun 2025 ini. Adapun rencana proyek atau program strategis yang akan diusulkan melalui mekanisme pembiayaan KPBU adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu akan dicoba diijazaki juga melalui mekanisme pinjaman daerah yang salah satu nya dilakukan melalui PT. SMI yaitu berupa pembangunan/rehabilitasi jalan di seuruh wiayah Kota Sukabumi.

Selain itu, tahun 2026 rencana pembiayaan Non APBD bersumber CSR akan difokuskan pada penanganan masalah persampahan dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota akan mengundang semua perusahaan yang telah terdaftar dan akan di paparkan proposal untuk penanggulangan sampah untuk dapat menggugah seluruh perusahaan untuk memberikan pembiayaan CSR dalam program tersebut.

Program yang akan diluncurkan untuk bisa didanai dari dukungan pembiayaan Non APBD khususnya CSR adalah berupa:

- 1) Pengadaan Gerobak Sampah di seluruh RW di Kota Sukabumi
- 2) Pengadaan Motor Sampah (Mosam) untuk 33 Kelurahan
- 3) Pengadaan Mobil/Truck Sampah
- 4) Sosialisasi dan kampanye gerakan memilah sampah dalam rangka *sirkular economy*
- 5) Penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat peduli sampah
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output setiap pelaksanaan sub kegiatan yang mendukung pencapaian output kegiatan serta selanjutnya mendukung pencapaian outcome program yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan lima tahunan serta diterjemahkan dalam dokumen perencanaan tahunan,

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah serta berdasarkan urusan yang diampunya pada Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 atau Buku II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang disajikan dalam tabel lampiran ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcomes* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kota sukabumi, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari beberapa aspek pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Namun demikian seiring perjalanan waktu dilakukan penyelarasan ulang yang di inisiasi oleh Provinsi dan pada akhirnya disepakati oleh pihak Provinsi dan Kota Sukabumi. Target indikator makro hasil penyelarasan tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Kota Sukabumi

Indikator	RPJMD KOTA SUKABUMI 2026	RKPD KOTA SUKABUMI 2026
	(Target)	(Target)
LPE (%)	4,96-5,96	5,43
PDRB perkapita (juta Rupiah)	50,38-51,35	51,02
Kontribusi PDRB	0,58	0,58
Tingkat Kemiskinan (%)	5,99-6,54	6,40
TPT (%)	7,25-7,91	8,00
Rasio Gini (Poin)	0,448-0,439	0,420
IPM / IMM (Poin) Indeks Pembangunan Manusia (Indikator Proxy. Poin)	78,31	78,31
Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/Miliar)	0,45	0,45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	61,53	61,79
Prevalensi Stunting (%)	22,11	21,96

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan kesepakatan Provinsi

Selanjutnya Kota Sukabumi telah menentukan Indikator Pembangunan Daerah yang merupakan indikator antara bagi pencapaian Indikator Makro sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas. Indikator tersebut kemudian disusun target pencapaiannya yang mengacu pada realisasi pada tahun sebelumnya serta kondisi terkini pencapaian indikator. Indikator Pembangunan Daerah tersebut sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2

Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026
1	Inflasi (%)	%	3,01
2	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Juta Orang	28,5
3	PDRB Perkapita (ADHK) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	28,17
4	PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	50.38 - 51.35
5	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Ribu Rupiah/Orang/ Tahun	11.600
6	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	75,52
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Tahun	10,93
8	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,68

Sumber: Hasil analisis BAPPEDA

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal.

Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Karena itu, IKU Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 akan terdiri dari 25 indikator. Adapun IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,69	77,90	78,31
2	Indeks Pendidikan	Poin	72,43	73,63	74,41
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,31	75,52
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,20	6,36 - 7,02	5,99 - 6,54
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,34	7.54 - 8.21	7.25 - 7.92
6	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	77,43	77,98
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,16	79,00	79,27
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	75	76	77
9	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	38,85	38,95
10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	56,5	60,1	61,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
11	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	44,76	45.29 - 45.65	50.38 - 51.35
12	Indeks Kota Kreatif	Poin	87,86	87,86	88,53
13	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	3,26	3,29	3,36
14	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,90	82,52	84,17
15	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	25
16	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	2,47	10	12
17	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,74	66,75	67,74
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	87,37	88,37	88,4
19	Indeks Risiko Bencana	Skor	77,56	75,56	73,56
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,79	3,83	3,87
22	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,18	4,25	4,30
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,20	87,50	88,00
24	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
25	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	76,36	78	80
26	Indeks Sistem Merit	Poin	77,69	77,90	78,31

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Di mana keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut direfleksikan dalam tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah. Adapun aspek pelayanan umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan.

IKD berisikan IKK dan indikator program prioritas lainnya yang terdapat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Dalam penentuan target IKD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan capaian target IKD pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKD tersebut. IKD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,90	82,52	84,17	85,85	87,57	89,32	91,10	DKP3
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	4,56 (2023)	3,74	3,60	3,44	3,25	3,04	2,73	DKP3
3	Kapasitas Air Baku	m³/detik		0,56	0,68	0,81	0,93	1,06	1,19	DPUTR
4	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	19,52 (2023)	24,30	28,09	31,87	35,66	39,44	43,23	DPUTR
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	61,28	61,28	61,53	61,79	62,04	62,29	62,54	DLH
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	6,69	12,07	17,44	22,82	28,19	33,57	DPUTR
7	Timbulan Sampah Terolah	Persen	0,49 (2023)	0,63	1,02	1,16	5,75	19,85	20,95	DLH

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	di Fasilitas Pengolahan Sampah									
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	81,29 (2023)	89,01	93,14	97,47	100	100	100	DLH
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,14	0,45	0,78	1,21	1,76	2,16	DLH
10	Indeks Risiko Bencana	Skor	77,56	75,56	73,56	71,55	70,53	69,51	68,50	BPBD
11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	56,5							DISDUKCAPIL
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,11	5.08 - 5.58	4,96 - 5,96	5.04 - 6.87	5.08 - 7,01	5,24 - 7,62	5,29 - 5,79	BAPPEDA,DISKUMINDAG DPMPTSP,DKP3
2	Rasio Gini	Poin	0,428	0.432 - 0.439	0,448 - 0,439	0.448 - 0.418	0.390 - 0.422	0.396 - 0.422	0.436 - 0.420	BAPPEDA

[illegible]

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tuberkulosis (Treatment Coverage)									
11	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	91	91	91	91	91	91	91	DINKES
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	52,91 (2023)	55,00	61,05	64,10	67,31	70,68	74,21	DISNAKER
14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	10,38	10,50	10,62	10,74	10,86	10,98	11,10	DISDIKBUD
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,63	13,68	13,73	13,78	13,84	13,89	DISDIKBUD

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Skor Literasi/Numerasi									DISDIKBUD
	a. Skor Literasi SD	Poin	62,84	65,72	69,17	70,36	71,55	72,74	73,93	DISDIKBUD
	b. Skor Literasi SMP	Poin	75,75	79,52	80,83	81,52	82,21	82,89	83,58	DISDIKBUD
	c. Skor Numerasi SD	Poin	47,88	47,41	49,96	51,87	53,78	55,70	57,61	DISDIKBUD
	d. Skor Numerasi SMP	Poin	65,65	65,02	69,02	70,06	71,10	72,13	73,17	DISDIKBUD
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	87,81	89,91	91,80	93,81	95,80	97,81	99,80	DISPUSIP
18	Indeks Pendidikan	Poin	72,40	73,63	74,41	75,19	75,98	76,76	77,54	DISDIKBUD
19	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18	KESBANGPOL SATPOL PP
20	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35	DISDIKBUD
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36	KESBANGPOL KESRA SETDA

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	58,70	60,46	61,76	63,06	64,36	64,55	66,25	DP2KBP3A
23	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,359	0,334	0,309	0,284	0,259	0,234	0,209	DP2KBP3A
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,93	4,02	4,21	4,45	4,63	4,85	4,95	BAPPEDA
2	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	BAPPEDA DISKUMINDAG
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,87	4,82	4,77	4,71	4,66	4,6	4,54	BAPPEDA DISKUMINDAG
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70	BAPPEDA DISKUMINDAG
5	Indeks Kota Kreatif	Persen	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90,56	91,23	DISPORAPAR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen		5,34	5,59	5,86	6,15	6,45	6,76	DISKUMINDAG
7	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta. Rp.	28,17	29,61	30,21	31,45	32,35	33,50	34,85	BAPPEDA DISKUMINDAG
8	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rp.	44,76	45.29 -	50.38 -	54,02 -	57.92 -	62,09 -	66.78 -	BAPPEDA DISKUMINDAG
				45.65	51.35	55,77	60,72	66,24	72.99	
9	Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,80	4,82	4,84	4,86	4,88	4,91	4,95	DISKOMINFO
10	Indeks Konektivitas	Skor	N/A	3	3,05	3,1	3,15	3,20	3,25	BAPPEDA, DISHUB DPUTR
11	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	0	0	0	25	25	BAPPEDA, DPMTSP DISKUMINDAG
12	Tingkat Inflasi	Persen	2,59	3,04	3,01	2,98	2,95	2,92	2,89	BAPPEDA, DKP3 DISKUMINDAG, EKONOMI SETDA
13	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	N/A	85	85,5	86	86,5	87	87,5	BAG. PEMERINTAHAN SETDA
14	Rasio Pembentukan	Persen	15,97	16,12	16,17	16,22	16,27	16,32	16,36	DPMTSP

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Modal Tetap Bruto (PMTB)									
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	N/A	67,87	68,40	68,64	68,93	69,22	69,51	BAPPEDA
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	87,37	88,37	88,4	88,43	88,48	88,53	88,58	DPUTR, BAPPEDA
17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	36,30	36,45	36,77	37,66	38,55	39,41	43,19	DPUTR
18	Rasio Akses Masyarakat Terhadap Energi	Persen)	99,99	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
19	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	BAPPEDA
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	N/A	6,70	6,78	6,84	6,91	6,99	7,08	BPKPD
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A	BAG. ORGANISASI SETDA

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	76,36	78	80	81	82	83	84	BAG. ORGANISASI SETDA
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,79	3,83	3,87	3,90	3,94	3,97	4,00	DISKOMINFO
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,18	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50	BAG. ORGANISASI SETDA
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,20	87,50	88,00	88,30	88,50	89,00	90,00	BAG. ORGANISASI SETDA
6	Nilai SAKIP	Poin	76,36	78	80	81	82	83	84	BAG. ORGANISASI

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dengan tema pembangunan “*Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik untuk Ketahanan Sosial Masyarakat*”. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2026 disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026 yang dijabarkan melalui RKPD Tahun 2026 ini disusun dengan tetap memperhatikan point-point sebagai berikut:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dengan 5 (lima) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority programs*) serta program prioritas dan unggulan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah.

Selanjutnya RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 ini akan dijadikan :

1. Dasar bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 terutama bagi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
2. Merupakan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD Tahun 2026, yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Kota Sukabumi.

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang unggul.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI